



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

2025



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini mencakup pertanggungjawaban atas capaian kinerja program dan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui pelaksanaan sasaran "Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan IKN Nusantara".

Laporan Kinerja ini menggambarkan dinamika Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II termasuk dinamika satuan kerja sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik untuk balai maupun satuan kerja di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Samarinda, 19 Januari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kalimantan II



Dr. Anggoro Putro, S.T., M.Sc
NIP. 19830905 200812 1 001

2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode tahun 2025-2029, dimana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

Dalam rangka mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II memiliki tujuan secara umum, yaitu “terlaksananya penyediaan perumahan dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”. Sebagai upaya pencapaian tersebut, maka disusun sasaran sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan keterpaduan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
2. Melaksanakan pembangunan rumah khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus;
3. Melaksanakan fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya bagi MBR;
4. Melaksanakan pembangunan rumah susun; dan
5. Melaksanakan pembangunan fasilitasi PSU bagi MBR dan pembinaan pelaku pembangunan rumah umum dan komersial.

B. Isu Strategis

Dalam pelaksanaannya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II tentu menghadapi berbagai dinamika dan beberapa tantangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Oleh karena itu, LAKIP ini juga menguraikan isu-isu strategis yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, serta langkah-langkah perbaikan yang direncanakan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Secara keseluruhan seluruh DIPA yang diampu oleh BP3KP Kalimantan II sudah dilaksanakan secara optimal, namun ada sedikit kendala yang dihadapi dalam pencapaian

target kinerja, berikut adalah gambaran umum permasalahan serta tindak lanjut dari program yang diampu oleh BP3KP Kalimantan II:

1. DIPA Sekretariat Jenderal

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Sekretariat Jenderal sudah berjalan dengan optimal didukung dengan adanya perencanaan penyerapan anggaran setelah SK Pejabat Perbendaharaan terbit.

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- a. Keterlambatan pelaksanaan program pembangunan baru yang dimulai pada akhir tahun menyesuaikan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan.
- b. Proses pelaksanaan fisik kegiatan swakelola yang terdampak akibat keterbatasan waktu penggunaan anggaran yang baru dapat direalisasikan pada akhir tahun.

Sebagai upaya perbaikan kinerja dalam menghadapi kendala pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penguatan dan optimalisasi kinerja pegawai guna mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang baru.
- b. Optimalisasi kinerja CPNS untuk pelaksanaan fisik kegiatan swakelola.

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

- a. Pemahaman calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih terbatas terkait pelaksanaan bantuan baik dari segi kriteria usulan maupun pelaksanaan.
- b. Terdapat permasalahan pribadi dari penerima bantuan sehingga target tidak tercapai.

Sebagai upaya perbaikan kinerja dalam menghadapi kendala pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian sosialisasi secara aktif kepada calon penerima bantuan terkait pedoman pelaksanaan bantuan perumahan mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- b. Mengembalikan dana yang tidak terealisasi ke kas negara.

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

- a. Belum optimalnya pemindahan lokasi Rumah Susun MBR yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
- b. Progres kegiatan mengalami deviasi surplus, namun belum sepenuhnya menjamin tercapainya target akhir tahun.

- c. Pelaksanaan serah terima aset yang telah lama terbangun belum optimal.
- d. Kurangnya kedisiplinan para pekerja di lokasi konstruksi.

Sebagai upaya perbaikan kinerja dalam menghadapi kendala pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan pihak OIKN terkait pelaksanaan pembangunan.
 - b. Melakukan pengendalian, pemantauan berkala, serta penyusunan rencana tindak lanjut guna memastikan capaian kinerja tetap terjaga hingga akhir tahun.
 - c. Melakukan penertiban administrasi dan legalitas aset, penguatan koordinasi antarunit terkait, serta penetapan rencana tindak lanjut yang terukur untuk mempercepat proses serah terima aset.
 - d. Penguatan pengawasan lapangan, penegakan tata tertib kerja secara konsisten, serta pembinaan kedisiplinan pekerja oleh pengawas dan mandor lapangan.
5. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
- a. Kurangnya kolaborasi dalam penentuan risiko kegiatan Balai dan Satker.
 - b. Kurangnya pegawai yang mempunyai sertifikasi berbasis Manajemen Risiko.
 - c. Banyaknya pegawai baru di lingkungan Balai dan Satker yang masih belum memahami konsep Manajemen Risiko.
 - d. Terpisahnya Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP sehingga dasar penetapan aturan Manajemen Risiko masih belum final.
 - e. Dokumentasi untuk keperluan Lembar Kerja Evaluasi penyusunan Zona Integritas masih belum terorganisir dengan baik.
 - f. Belum efektifnya kinerja POKJA enam (6) area perubahan.

Sebagai upaya perbaikan kinerja dalam menghadapi kendala pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II dengan membuat SK Agen Risiko yang terdiri pegawai teknis dan non-teknis dengan melibatkan pejabat terkait dalam setiap penyusunan profil dan mitigasi risiko

C. Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II melaksanakan kegiatan dengan *output* sebagai capaian terhadap sasaran kegiatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara

kolaboratif. Selain itu, kementerian mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui peningkatan sistem data, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Upaya peningkatan ketahanan permukiman terhadap bencana juga menjadi prioritas melalui rehabilitasi rumah terdampak dan penerapan standar bangunan aman. Seluruh sasaran tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas SDM dan efektivitas pelaksanaan program guna memastikan pelayanan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik bagi masyarakat.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Pelaksanaan kegiatan mencakup empat wilayah, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan IKN Nusantara.

Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Sekretariat Jenderal				
Tingkat layanan dukungan manajemen	Layanan	5	5	100%
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas	Laporan	1	1	100%
Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100%
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4	100%
Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	84	84	100%
Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	426	426	100%
Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0,1	0,1	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100%
Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	1	100%
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100%
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	339	337	99,41%

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100%
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	5	5	100%
Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100%
Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	Unit	1200	1200	100%
Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	Unit	-	-	-
Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	-	-	-
Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100%
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	Unit	328	328	100%
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100%
Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100%

Sebagai catatan, terdapat kekeliruan dalam perhitungan akumulasi target pada Satker Kalimantan Utara akibat adanya perubahan target kegiatan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan dari semula 1 unit menjadi 0 unit, sebagaimana tercantum dalam DIPA Ditjen Perkotaan Revisi ke-4. Perubahan tersebut belum terakomodasi dalam perhitungan akhir sehingga berdampak pada ketidaktepatan akumulasi target dalam Perjanjian Kinerja Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Dengan demikian, total target yang sebelumnya tercantum sebesar 329 unit seharusnya disesuaikan menjadi 328 unit.

Secara keseluruhan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II terhadap komitmen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu 99,91%. Terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai secara maksimal, yaitu pada pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 Unit (2 Penerima Bantuan). Tidak tercapainya kegiatan tersebut secara maksimal disebabkan beberapa kendala yang menyebabkan pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan seperti pengunduran diri calon penerima bantuan, permasalahan tanah, masalah keluarga, tidak memenuhi *readiness criteria*, data penerima yang telah terdata sebagai pengganti, konflik

keluarga. Pada Sasaran Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebesar 0,1 hektar sebagaimana dialokasikan dalam RKA K/L dijabarkan ke dalam 35 unit kegiatan. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi kegiatan mencapai 35 unit atau mencapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

D. Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.671.533.683.000,00 dipergunakan dalam rangka merealisasikan komitmen Balai P3KP Kalimantan untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman serta Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan. Pagu anggaran yang dipergunakan dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 1.670.077.366.000,00 (99,91%).

Satuan Kerja	Pagu (Rp Ribu)	Keuangan		Realisasi Fisik (%)
		Realisasi (Rp)	(%)	
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II				
- DIPA Sekretariat Jenderal	1.470.197	1.451.518	98,73	100
- DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	465.126	464.560	99,88	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	626.466	616.327	98,38	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.291.222	1.263.784	97,88	100
- DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466	290.676	95,79	100
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur				
- DIPA Sekretariat Jenderal	591.394	589.171	99,62	99,68
- DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	2.088.985	2.072.567	99,21	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	7.106.155	7.084.414	99,69	99,13
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	31.661.076	31.623.380	99,88	99,95
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan				
- DIPA Sekretariat Jenderal	647.904	634.647	97,95	100
- DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	2.432.516	2.361.412	97,08	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	912.870	875.883	95,95	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	7.438.518	7.373.935	99,13	100
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara				
- DIPA Sekretariat Jenderal	788.090	750.116	95,18	100
- DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1.058.132	1.058.129	100	100

Satuan Kerja	Pagu (Rp Ribu)	Keuangan		Realisasi Fisik (%)
		Realisasi (Rp)	(%)	
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	140.171	130.439	93,06	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	515.069	507.783	98,59	100
Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara				
- DIPA Sekretariat Jenderal	1.124.712	1.122.112	99,77	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.610.871.614	1.609.806.457	99,93	99,77
TOTAL	1.671.533.683	1.670.007.366	99,91	99,97

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR GAMBAR	XVI
DAFTAR SINGKATAN	XVII
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas dan Fungsi	6
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	7
1.3.1 Struktur Organisasi	7
1.3.2 Sumber Daya Manusia	10
1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian	17
1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan	18
1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia	19
1.4 Sarana dan Prasarana	20
1.5 Isu Strategis	26
1.6 Sistematika Laporan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
2.1 Rencana Strategis	29
2.1.1 Visi dan Misi Kementerian PKP	29
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi	31
2.1.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal	31
2.1.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	32
2.1.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	33
2.1.2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	34
2.1.2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	36
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	36
2.1.4 Sasaran Program	41
2.1.5 Program dan Kegiatan Pembangunan	44

2.2	Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II	45
2.2.1	Perjanjian Kinerja (PK) Awal	46
2.2.2	Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	51
2.2.3	Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)	55
2.3	Metode Pengukuran Kinerja	56
2.4	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	57
2.5	Target Kinerja Tahun 2025 dalam Pemenuhan Target Renstra	66
2.5.1	Reviu Target Renstra Tahun 2025-2029	67
2.5.2	Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra BP3KP Kalimantan II	68
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		74
3.1	Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	74
3.2	Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II	79
3.2.1	Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	79
3.2.2	Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	80
3.2.3	Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	81
3.2.4	Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	82
3.2.5	Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	84
3.2.6	Capaian Realisasi Kinerja Balai P3KP Kalimantan II Tahun 2025	85
3.2.7	Capaian Kinerja pada Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	91
3.3	Capaian Kinerja Kegiatan Lainnya	95
3.4	Analisis Perbandingan Kinerja	104
3.4.1	Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Renstra	104
3.4.2	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja	117
3.4.3	Analisis Perbandingan Kinerja dengan Organisasi Sejenis yang Setara	122
3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	123
3.6	Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja	124
3.6.1	Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja	124
3.6.2	Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja	133

3.6.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala.....	133
3.6.4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala	136
3.7 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan.....	138
3.7.1 Faktor Pendukung Keberhasilan	138
3.7.2 Faktor Penyebab Kegagalan	139
BAB IV PENUTUP	141
4.1 Kesimpulan.....	141
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	144
LAMPIRAN.....	146
Lampiran 1. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Penetapan PK Awal TA 2025	147
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dengan Unit Eselon I Kementerian PKP TA 2025	149
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dengan Unit Eselon I Kementerian PKP TA 2025	159
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Akhir BP3KP Kalimantan II dengan Unit Eselon I Kementerian PKP TA 2025	166
Lampiran 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal TA 2025	174
Lampiran 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Akhir TA 2025.....	209
Lampiran 7. Laporan Kondisi BMN BP3KP Kalimantan II Tahun 2025	244
Lampiran 8. Bukti Dukung Capaian Kinerja	257
Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan BP3KP Kalimantan II	266

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai BP3KP Kalimantan II	10
Tabel 1.2	Daftar Barang Milik Negara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II yang Tercatat Tahun 2025	20
Tabel 1.3	Pemanfaatan Media Balai P3KP Kalimantan II.....	25
Tabel 1.4	Isu Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2025	26
Tabel 2.1	Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK).....	55
Tabel 2.2	Kronologi Perubahan DIPA BP3KP Kalimantan II	58
Tabel 2.3	Target Kinerja Rencana Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2025 – 2029....	67
Tabel 2.5	Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra BP3KP Kalimantan II	68
Tabel 3.1	Rincian Nilai Akuntabilitas Kinerja BP2P Kalimantan II Tahun 2023	75
Tabel 3.2	Permasalahan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian AKIP BP2P Kalimantan II Tahun 2023	76
Tabel 3.3	Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II Terhadap PK Sekretariat Jenderal	79
Tabel 3.4	Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II Terhadap PK Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	80
Tabel 3.5	Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II Terhadap PK Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	81
Tabel 3.6	Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II Terhadap PK Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	83
Tabel 3.7	Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II Terhadap PK Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	84
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Balai P3KP Kalimantan II Tahun 2025	85
Tabel 3.9	Rincian Realisasi Keuangan Satuan Kerja BP3KP Kalimantan II	91
Tabel 3.10	Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	95
Tabel 3.11	Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	96
Tabel 3.12	Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	97
Tabel 3.13	Capaian Berdasarkan Layanan Offline	99
Tabel 3.14	Capaian Berdasarkan Layanan Online	99
Tabel 3.15	Capaian Berdasarkan Kategori Layanan	100
Tabel 3.16	Hasil Pemantauan Program FLPP	101
Tabel 3.17	Laporan Bantuan CSR Perusahaan	103
Tabel 3.18	Laporan Bantuan CSR Perusahaan Lain - Lain.....	103
Tabel 3.19	Matriks Kinerja dan Pendanaan BP3KP Kalimantan II Tahun 2025-2029	104
Tabel 3.20	Perbandingan Target Rencana Strategis Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025	110

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal	117
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	117
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	119
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	120
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	121
Tabel 3.26 Perbandingan Kinerja BP3KP Kalimantan II dengan BP3KP Kalimantan I.....	122
Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	123
Tabel 3.28 Analisis Kegiatan Laporan Kinerja BP3KP Kalimantan II.....	124
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran BP3KP Kalimantan II	141
Tabel 4.2 Realisasi Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II.....	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II.....	9
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	17
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Penempatan.....	18
Gambar 1.5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	18
Gambar 1.6	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	19
Gambar 1.7	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia.....	19
Gambar 2.1	Pohon Kinerja BP3KP Kalimantan II.....	44
Gambar 3.1	Realisasi Anggaran Belanja Barang Satuan Kerja BP3KP Kalimantan II.....	93
Gambar 3.2	Grafik Progres Keuangan dan Fisik DIPA Sekretariat Jender.....	93
Gambar 3.3	Grafik Progres Keuangan dan Fisik DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	94
Gambar 3.4	Grafik Progres Keuangan dan Fisik DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	94
Gambar 3.5	Grafik Progres Keuangan dan Fisik DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	94
Gambar 3.6	Grafik Progres Keuangan dan Fisik DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	94
Gambar 3.7	Dashboard Klinik PKP Kalimantan II.....	100
Gambar 3.8	Halaman Awal e-Office Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	133
Gambar 3.9	Halaman Awal myPKP Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	134
Gambar 3.10	Halaman Awal SIBARU Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	135
Gambar 3.11	Halaman Awal SAKTI Kementerian Keuangan.....	136
Gambar 3.12	Halaman Awal SIMAN Kementerian Keuangan.....	136
Gambar 3.13	Halaman Awal INAPROC SPSE LKPP.....	137
Gambar 3.14	Halaman Awal JDIH.....	137
Gambar 3.15	Halaman Data Peraturan myPKP.....	138

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BMN	: Barang Milik Negara
BP3KP	: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
BSPS	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
CPB	: Calon Penerima Bantuan
CRA	: <i>Corruption Risk Assessment</i>
CROP	: <i>Certified Risk Officer in Public Sector</i>
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	: Direktorat Jenderal
FKAP	: Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKU	: Indikator Kinerja Utama
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KI	: Kawasan Industri
Korkab	: Koordinator Kabupaten
KRO	: Klasifikasi Rincian Output
KRS	: Klinik Rumah Swadaya
LHE	: Lembar Hasil Evaluasi
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MYC	: <i>Multi Years Contract</i>
NAHP	: <i>National Affordable Housing Program</i>
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PK	: Perjanjian Kinerja
PKP	: Perumahan dan Kawasan Permukiman
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Pokja	: Kelompok Kerja
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSU	: Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
Renstra	: Rencana Strategis
RKA-K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

RO	: Rincian Output
RP3KP	: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Sasaran Kegiatan
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SMAP	: Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SMART3	: Sistem Monitoring Akurasi Real Time Terpadu dan Terintegrasi
SP	: Sasaran Program
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SS	: Sasaran Strategis
TFL	: Tenaga Fasilitator Lapangan
Unor	: Unit Organisasi
WBK	: Wilayah Bebas dari Korupsi
ZI	: Zona Integritas

BAB 1

PENDAHULUAN



Latar Belakang
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Sarana dan Prasarana
Isu Strategis
Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II adalah hasil dari reorganisasi dan transformasi kelembagaan yang signifikan dari entitas sebelumnya, yang dulunya dikenal sebagai BP2P Kalimantan II (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II), yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Transformasi ini terjadi seiring dengan perubahan penetapan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pergeseran kelembagaan tersebut:

Entitas Sebelumnya: BP2P Kalimantan II (Kementerian PUPR)

- **Kedudukan Awal:** Sebelum reorganisasi, BP2P Kalimantan II (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II) merupakan unit kerja yang dibentuk pada Juni 2020 di bawah Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen Perumahan) Kementerian PUPR.
- **Wilayah dan Tugas:** BP2P Kalimantan II mengemban tugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.
- **Fokus Program:** Tugas utama Ditjen Perumahan adalah melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan. Laporan kinerja BP2P Kalimantan II Tahun 2024 disusun dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian PUPR periode 2020–2024.

Transformasi dan Pembentukan Kementerian PKP

- **Dasar Hukum dan Waktu Pembentukan:** Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024, dengan Menteri pertama dilantik pada Oktober 2024.
- **Skema Reorganisasi:** Pembentukan Kementerian PKP melibatkan transformasi kelembagaan yang signifikan dengan menyerap fungsi-fungsi terkait perumahan dan kawasan permukiman yang sebelumnya tersebar di

beberapa Unit Eselon I di Kementerian PUPR. Fungsi-fungsi yang diintegrasikan meliputi:

1. Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen Perumahan), yang fokus pada penyediaan perumahan.
 2. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen CK).
 3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- **Paradigma Baru:** Transformasi ini menandai pergeseran paradigma kelembagaan dari pendekatan berbasis program sektoral menjadi pendekatan berbasis wilayah dan menegaskan fokus pada dua aspek utama yaitu perumahan dan kawasan permukiman.

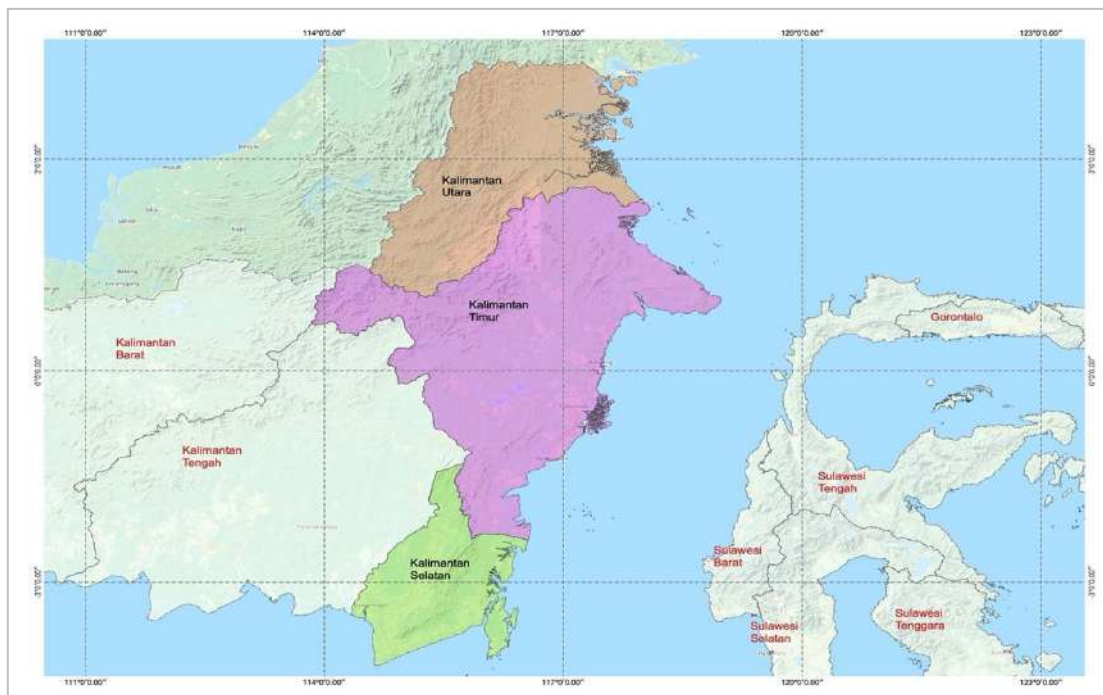
Entitas Saat Ini: BP3KP Kalimantan II (Kementerian PKP)

- **Kedudukan Baru:** Setelah reorganisasi, BP2P Kalimantan II bertransformasi menjadi BP3KP Kalimantan II (Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II), yang merupakan salah satu dari 19 Balai yang dibentuk di seluruh Indonesia.
- **Tanggung Jawab:** BP3KP Kalimantan II kini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan berkoordinasi dengan unit organisasi lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Fungsi yang Diperluas: Fungsi BP3KP diperluas untuk mencakup tidak hanya penyediaan perumahan tetapi juga pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset, disamping fungsi administrasi dan pengawasan internal.

Kedudukan BP3KP Kalimantan II mendukung pencapaian peran dan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah garis komando Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan memiliki garis koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko,

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II memiliki 4 wilayah kerja yaitu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), dan IKN.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk perwujudan kewajiban dari setiap instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah diatur melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkan bahwa setiap unit organisasi, unit kerja, unit pelaksana teknis dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan tanggungjawab tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan kinerja ini menyajikan realisasi capaian atas penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 20 menyebutkan bahwa laporan kinerja dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan masing-masing Identitas pelaporan/akuntansi. Sesuai ketentuan tersebut, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki peran yang sangat strategis, karena memberikan informasi penting antara lain:

1. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian output/outcome sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja;
2. Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai dengan ukuran-ukuran keberhasilan berupa indikator-indikator kinerja non keuangan; Hubungan kinerja dan hasil dengan sumber daya;
3. Faktor-faktor kunci untuk perbaikan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik yang didasarkan pada:

1. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern;
13. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Sistem Pengendalian Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

TUGAS

Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

FUNGSI

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksanaan Wilayah, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi.

a. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi serah terima aset, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

b. Seksi Pelaksana Wilayah

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II didukung oleh dua seksi pelaksanaan wilayah, yaitu wilayah I bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Permukiman serta wilayah II bertanggung jawab atas pelaksanaan Perumahan Perkotaan dan Perumahan Perdesaan. Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pasca bencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah I dan wilayah II.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II didukung oleh 4 Satuan Kerja, yaitu:

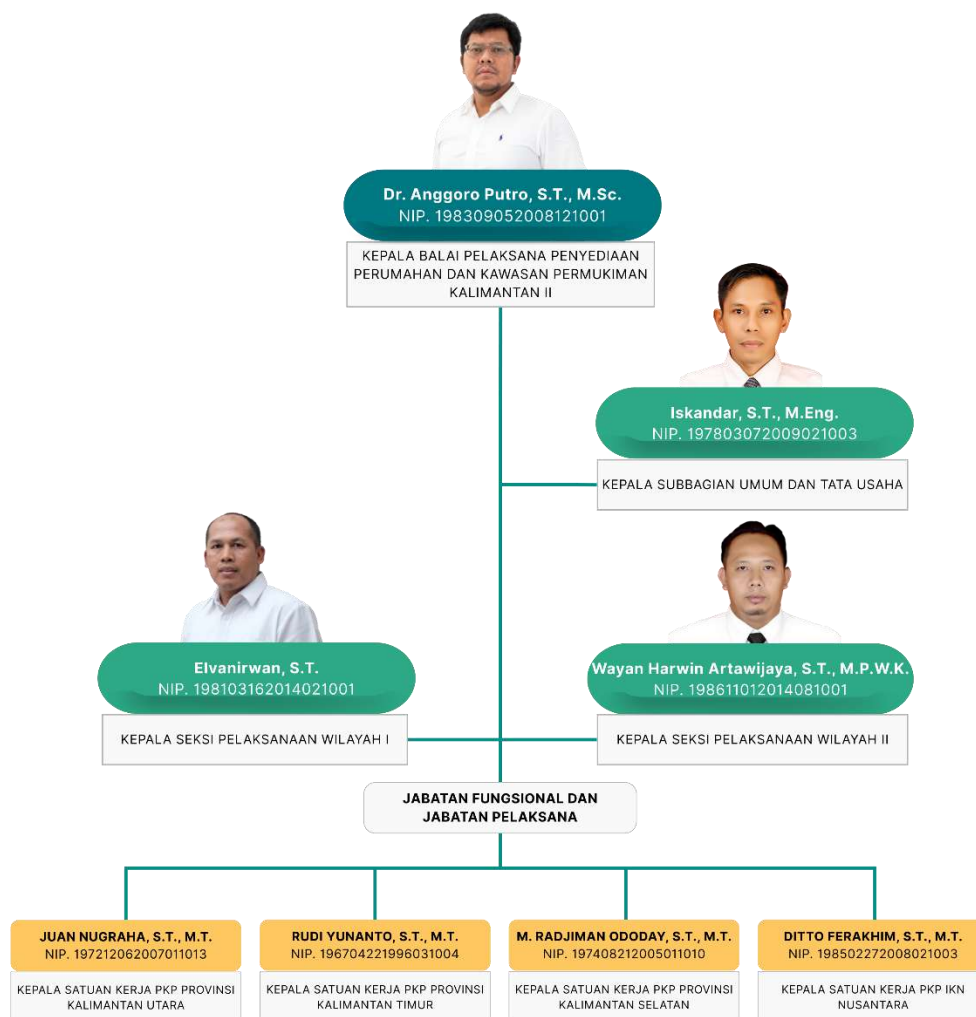
- 1) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara; dan
- 4) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, terdapat 4 satuan kerja perumahan dan kawasan permukiman yang berada di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II, yaitu Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Timur, Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Selatan, Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Utara, dan Satuan Kerja PKP IKN Nusantara, tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja dan didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan / Pengendalian

Bertugas mendukung penyusunan rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan Rumah Susun, Rumah

- Khusus, Rumah Swadaya dan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Umum.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus
Bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Susun Dan Rumah Khusus.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya
Bertugas melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
 - Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
PP-SPM bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran pekerjaan.
 - Bendahara Pengeluaran
Bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan negara yang bertugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan sehingga perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Suatu organisasi perlu didukung dengan pegawai yang sesuai, baik dari kuantitas, kualitas, strategi, dan operasional yang baik untuk mencapai tujuannya. Adapun total jumlah sumber daya manusia yang bekerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pegawai BP3KP Kalimantan II

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	CPNS	KI	OUT	TA
BP3KP KALIMANTAN II								
1	Dr. Anggoro Putro, S.T., M.Sc.	Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II/ Kuasa Pengguna Anggaran	v					
2	Wayan Harwin Artawijaya, S.T., M.P.W.K.	Pejabat Pembuat Komitmen dan Kasi Pelaksana Wilayah II	v					
3	Iskandar, S.T., M.Eng.	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha	v					
4	Elvanirwan, S.T.	Kasi Pelaksana Wilayah I	v					
5	Triwi Umi Martati, S. Sos., M.Si.	Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	v					
6	Ahmad Syafi'i, S.T	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama		v				
7	Hardisa Amin, S.T	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama		v				
8	Hista Yugandhini Taurisia, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama		v				
9	Muhammad Naufal Raga Pratama, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		v				
10	Mina, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		v				
11	Indi Garcinia, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama		v				
12	Apriliani, S.IP	Arsiparis		v				
13	Ul Ulya Zuhruji Fajri, S.Tr. Ak.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama			v			
14	Rizki Rahmadianto, S. Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama			v			
15	Klaudia Anbaratih, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
16	Yosa El Tama, S.E.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
17	Mytha Okti Maulia, S. AP.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	CPNS	KI	OUT	TA
18	Yasra Azzahra, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
19	Juan Ponce Situmorang, S.P.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
20	Putu Aditya Eka Putra, S.Tr. Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama			v			
21	Laurency Debora Nadeak, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
22	Abdy Ikhwan Mudzakky, S. Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
23	Farhan Zul Atsyari, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
24	Muhammad Rafli Suwandi, S. Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
25	Agustinus Aditya Pradana, S. Ds.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
26	M. Ikbal L.M. Said, S. Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
27	Muhammad Amin Muslihat, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
28	Robby Saputra Pangloli, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
29	Eurico Pratama Rachmanto, S. Ars.L.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
30	Fathir Hidayah, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
31	Jarot Setiawan	Pengelola Umum Operasional		v				
32	Moh. Firdaus Sakti Kalale, S.Kom	Tenaga Pendukung Monev				v		
33	Dewi Sri Wahyuni, S.AK	Tenaga Pendukung Pelaksana Keuangan				v		
34	Ihsan Kamil Hasbar, S.Kom	Tenaga Pendukung Pelaksana Keuangan				v		
35	Mudrikul Abror, S.A.B	Tenaga Pendukung Klinik Perumahan				v		
36	Alfiansyah, S.T	Tenaga Pendukung Publikasi				v		
37	Sopyan Hadi	Pengemudi					v	
38	Fadli Hisbulah Julian Pratama	Pengemudi					v	
39	Wahyu Wardana, S.H	Satpam					v	
40	Rudy Hartono	Satpam					v	
41	Secar Julianto	Satpam					v	
42	Supriyadin	Pramubakti					v	
43	M. Angga Wijaksana	Pramubakti					v	

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	CPNS	KI	OUT	TA
SATUAN KERJA PKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
1	Rudi Yunanto, S.T., M.T.	Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kalimantan Timur	v					
2	Karina Mayasari, S.T., M.Eng., MURP.	Pejabat Pembuat Komitmen Kawasan Permukiman, Perumahan Perdesaan, Perumahan Perkotaan	v					
3	Bayu Krisna Suryantara, S.T.	Pejabat Pembuat Komitmen Perumahan Perkotaan	v					
4	Putu Andika Mahayana, S.T.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	v					
5	Myrna Nathania Winarto, S.T.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	v					
6	Adhitia Gustama, S.T.	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)	v					
7	Audrey Therrisia, S. Ars.	Bendahara Pengeluaran	v					
8	Rima Yessy Bulu, ST	Teknik Penyehatan Lingkungan		v				
9	Zendy Pradikta Aufar H, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		v				
10	Edward Layuk Mairi, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
11	Ainun Jamil Meidikna, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama			v			
12	Firdhani Bilqish Islamiyah, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
13	Fitria Wulan Sari, S. Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
14	Febri Nanda Ermas, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
15	Akbar Iqbal Yusuf, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
16	Deta Indrayani, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
17	Muh. Fazil, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
18	Rohani Nofawanty Br Tamba, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
19	Ririn Prasetya Pargitawati., S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama		v				
20	Soleh Arif Wahyu Purnomo	Pengadministrasi Perkantoran		v				
21	Ria Andini., S.E	Arsiparis Ahli Pertama		v				
22	Ridaan Shari., S.E	Arsiparis Ahli Pertama		v				
23	Lisa Molida., S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		v				

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	CPNS	KI	OUT	TA
24	Subhan Noor., ST	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		v				
25	M. Junaidi Nur., ST	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		v				
26	La Rohama	Operator Layanan Operasional		v				
27	Fawawi Multazam., S.T	Arsiparis Ahli Pertama		v				
28	Ifah Silvi Nurainiah	Tenaga Ahli						v
29	Slamet Riady	Tenaga Ahli						v
SATKER PKP IBU KOTA NEGARA NUSANTARA (IKN)								
1	Ditto Ferakhim, S.T., M.T.	Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara	v					
2	Heri Sukarmanto, S.T., M.Eng.	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun II	v					
3	Haninda Prihardi, S.T.	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun III	v					
4	Muhammad Akbar Hadi Purwanto, S.T., M.Si.	Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun IV	v					
5	Siramin, S.IP., M.Si.	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)	v					
6	Renggo Pitojo, S.AP.	Bendahara Pengeluaran	v					
7	Robby Wibisono Permana Putra, S.Ars.	Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	v					
8	Ariq Amrizal Haqy, S.T.	Kepala Urusan Teknik Rumah Susun II	v					
9	Muh. Arafah, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Pelaksana		v				
10	Arina Putri Faza, S. Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
11	Tiara Puspaditya, S. Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
12	Rani Fatimah Azzahra, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
13	Muhammad Hasbi, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
14	Agung Prasetyo, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
15	Ilham Zaky Amrullah, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
16	Tedi Malino, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	CPNS	KI	OUT	TA
17	Dhea Imbara, S.Tr.M	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
18	Andi Fitriani Tantu, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
19	Shabri, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama			v			
20	Wirawan Budi Darmantya,SE	Arsiparis Ahli Pertama		v				
21	Horizon De Himalaya Effendy, S.E	Arsiparis Ahli Pertama		v				
22	M.Y. Atiani Lestari, S.S. M.Si	Arsiparis Ahli Pertama		v				
23	Vincentius Prima Aditya, S.P.W.K.	Tenaga Pendukung Teknis/Staf PPK Randal				v		
24	Novia Astuti, S.M.	Tenaga Pendukung Kepegawaian/Staf PPK Randal				v		
25	Fajar Firdaus Zan, S.E.	Pengadministrasian Umum/Staf PPK Randal				v		
26	Gawan Sasmita, S.Tr.Kom.	Operator Komitmen dan Pembayaran/Staf PPK Randal				v		
27	Muhammad Iqbal Harianto, S.Tr.Kom.	Operator Komitmen dan Pembayaran/Staf PPK Randal				v		
28	Stanley Hendrik, S.E.	Operator Komitmen dan Pembayaran/Staf PPK Randal				v		
29	Neni Nuraeni	Arsiparis/Staf PPK Randal				v		
30	Ermond, S.H.	Operator Bendahara/Staf PPK Randal				v		
31	Dhea Ayu Agathis Widjaja, S.Psi.	Perpajakan/Staf PPK Randal				v		
32	Nila Weldani, S.M.	Keuangan/Staf PPK Randal				v		
33	Hana Pertiwi Helfiah, S.lkom.	Keuangan/Staf PPK Randal				v		
34	Fatkur Rohman Maulana	Pengadministrasian Umum/Staf PPK Randal				v		
35	Ihsan Maulana Saputra	Pramubakti				v		
36	Ilham Soleh	Pramubakti				v		
37	Ester Kresley Tiwa, S.T.	Tenaga Pendukung Teknis/Staf PPK Randal				v		
38	Redyan Noor	Pengemudi/Staf PPK I dan IV				v		
39	Achmeed Syiroj Baihaqi	Operator Komputer/Staf PPK II				v		
40	David Surya Atmaja	Operator Komputer/Staf PPK II				v		
41	Mad Soleh	Operator Komputer/Staf PPK II				v		
42	Yasmin Annisa Apriliati, A.Md.Ak	Pengadministrasian Umum/Staf PPK III				v		
43	Darsono	Pengadministrasian Umum/Staf PPK III				v		

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	CPNS	KI	OUT	TA
44	Fitri Verawanti, S.T.	Tenaga Pendukung Teknis/Staf PPK III				v		
45	Fazrin Amrullah, S.K.	Pengemudi/Staf PPK III				v		
46	Sayid Fami Yahya	Pramubakti				v		
SATKER PKP KALIMANTAN SELATAN								
1	Mohammad Radjiman Ododay, S.T.,MT	Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kalimantan Selatan	v					
2	Muhrani Abdi, S.Kom	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)	v					
3	Winda Anilawati, S.T.	Bendahara Pengeluaran	v					
4	Rieza Perdana, S.T.	PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman	v					
5	Suryo Adhi Kustario, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	v					
6	Ary Wardhana Yusuf, S.Kom	Kaur Administrasi Randal		v				
7	Agus Fakhrian Noor, ST	Kaur Administrasi Ruswa dan RUK		v				
8	Agus Fitra Ahdiyana, ST	Kaur Teknik Randal		v				
9	Awaluddin Abdi, ST	Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman		v				
10	Heru Hediyanto, S.I.P.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
11	Muhammad Ridho Iryarahadi, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama			v			
12	Fahrizal Ahmad, S.P.W.K.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
13	Fanisya Afdhaluna, S. Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
14	Muhammad Alfiannor, S. Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
15	Aditya Putra Al Aziz, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
16	Hasnan Aris Algifari, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
17	Muhammad Iqbal, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
18	Haslani Haryadi, A.Md	Pengelola Layanan Operasional		v				
19	Ade Ramadhan, A.Md	Pengelola Layanan Operasional		v				
20	Amalia Diyanti, A.Md	Pengelola Layanan Operasional		v				
21	Bella Apriyanti, SM	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur-Ahli Pertama		v				

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	CPNS	KI	OUT	TA
22	Ahmad Yusuf Ridho, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman-Ahli Pertama		v				
23	Herlyanti Indah Lestari, ST	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		v				
24	Effendi	Operator Layanan Operasional		v				
25	Rosidah	Operator Layanan Operasional		v				
26	Setiawan Adi Saputra	Pengadministrasi Perkantoran		v				
27	Syahrída, ST	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		v				
28	Fitriyana, S.T.	Tenaga Pendukung Laporan Kegiatan				v		
29	Arie Maulidin, S.T.	Tenaga Ahli BPS						v
30	Kiki Anisawati	Pramubakti					v	
31	Zainal	Satpam					v	
32	Muhammad Risadi	Pengemudi					v	

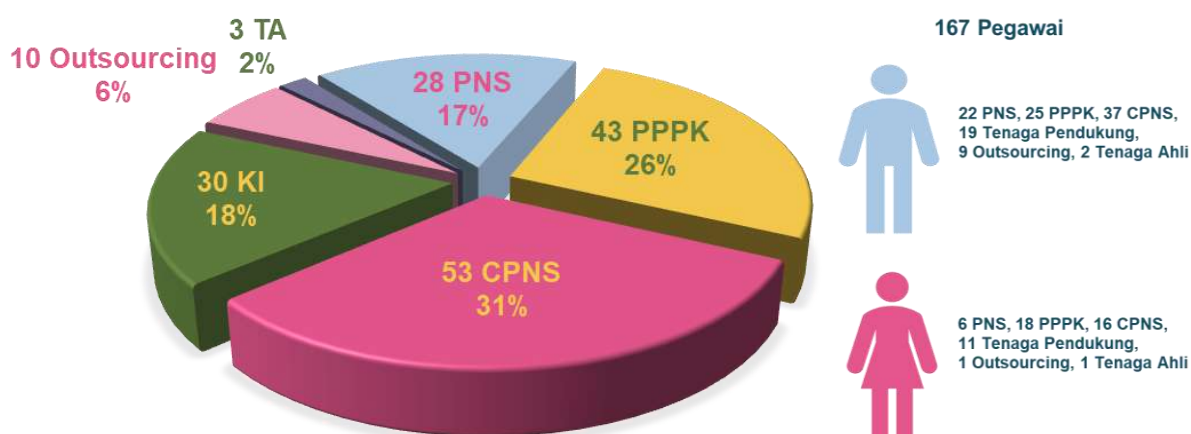
SATKER PKP KALIMANTAN UTARA

1	Juan Nugraha, S.T., M.T.	Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kalimantan Utara	v					
2	Vilda Indrawati, S.E.	Bendahara Pengeluaran	v					
3	Fajerullah Akbar Husain, S.T., M.T	PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman	v					
4	Sarah Septiani, S.E	Urusan Keuangan/Sakti		v				
5	Rizky Aprilya Arisandy, S.T	BMN Satker dan Urusan Perdesaan/Sakti		v				
6	Ir. Candra Ridayadi, S.T., S.Ap	Urusan Pelaksana, Program, dan Sibaru		v				
7	Ir. Rengga Radika Saputra, S.T	Urusan Pelaporan dan Urusan Kawasan Perumahan Perkotaan		v				
8	Michael Federik Butarbutar, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
9	Eko Suwantoso, S.E	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
10	Irfan Wahyudi, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
11	Marthin Anugrah Putra Dengen, S. Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
12	M. Rezky Fahlepy, S. Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama			v			
13	Ubaidah Imamudin Almadani, S. Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
14	Antonius Dipta Aruna, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			

NO	NAMA LENGKAP	NAMA JABATAN	PNS	PPPK	CPNS	KI	OUT	TA
15	Jefry Franszoel Manurung, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama			v			
16	Diny Febriyanti, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur-Ahli Pertama		v				
17	Randy Khummar Mucitra, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		v				
TOTAL			28	43	53	33	10	3

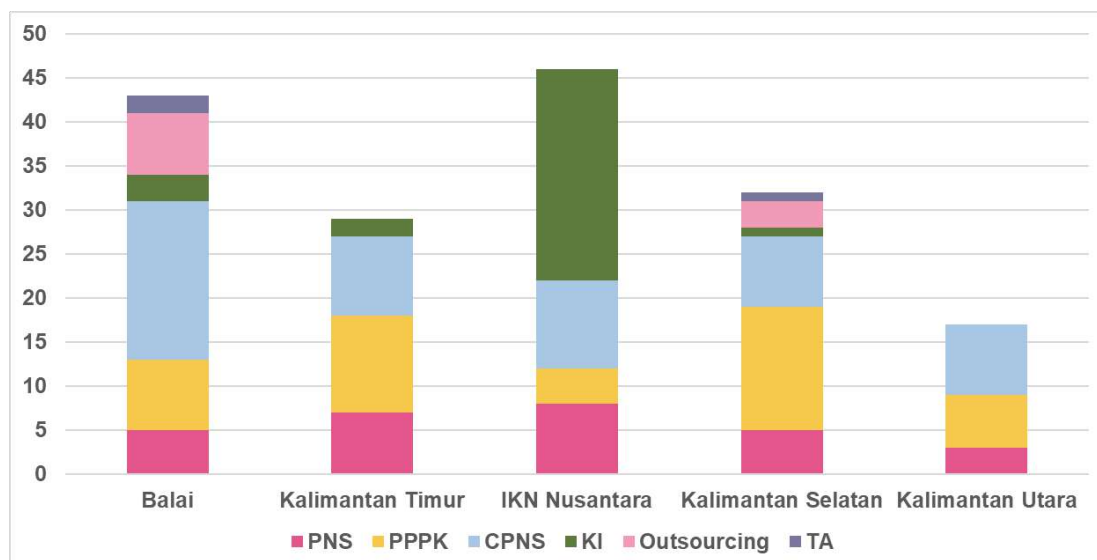
1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II didukung oleh SDM sebanyak 167 orang yang terdiri atas 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 43 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), 53 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 33 orang Tenaga Pendukung, dan 10 orang Tenaga Outsourcing.



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

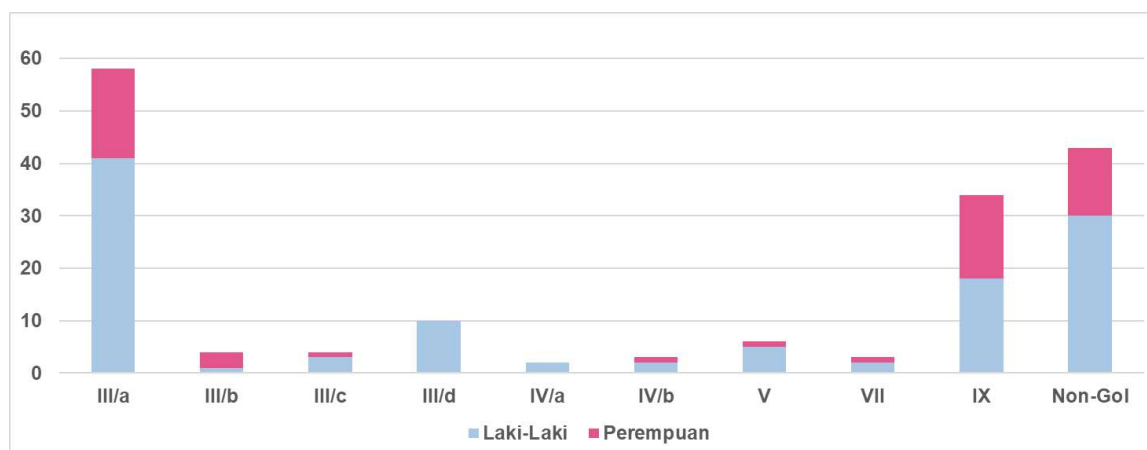
Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II dilaksanakan dengan dukungan SDM yang mencakup wilayah kerja Balai, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara. Pada tahun 2025, jumlah pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II sebanyak 167 orang yang tersebar di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II sebanyak 43 orang, Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 29 orang, di Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 32 orang, di Satuan Kerja PKP Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 17 orang, di Satuan Kerja PKP IKN Nusantara sebanyak 46 orang.



Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Penempatan

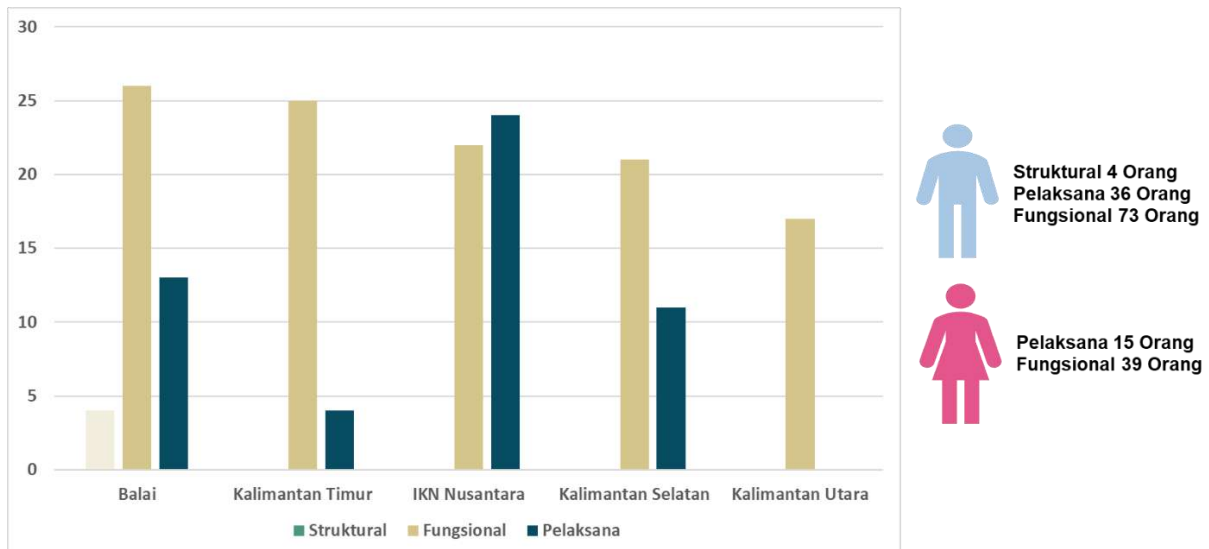
1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Berdasarkan golongan, PNS, PPPK, dan CPNS Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II sebanyak 167 pegawai didominasi oleh golongan III sebanyak 76 orang atau 45,51%. Sementara, golongan IV sebanyak 5 orang. Perbandingan PNS, PPPK, dan CPNS di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II secara menyeluruh berdasarkan golongan dapat dilihat sebagai berikut.



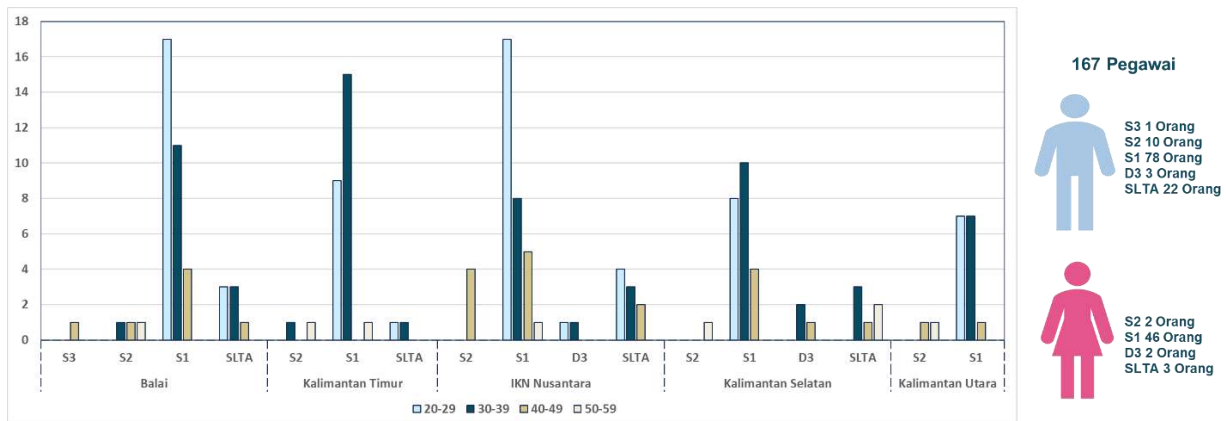
Gambar 1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II didominasi oleh jabatan fungsional sebanyak 112 orang yang didominasi oleh jabatan fungsional penata kelola perumahan.



Gambar 1.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia



Gambar 1.7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS, PPPK, dan CPNS Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mayoritas merupakan lulusan sarjana (S1) sebanyak 125 orang (74,85%), sebanyak 12 orang (7,18%) merupakan lulusan master (S2), dan sebanyak 1 orang (0,60%) merupakan lulusan doktor. Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II memberikan dukungan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan atau tugas belajar. Dukungan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Berdasarkan kelompok usia, pada tahun 2025, pegawai PNS, PPPK, dan CPNS Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II didominasi 40,11% oleh kelompok usia 20-29 tahun sebanyak 67 orang, diikuti oleh kelompok usia 30-

39 tahun sebanyak 66 orang (39,52%), kelompok usia 40-49 tahun sebanyak 26 orang (15,57%) dan 8 orang (4,79%) merupakan kelompok usia > 50 tahun. Berdasarkan komposisi kelompok usia tersebut diharapkan SDM yang ada dapat mendukung produktivitas kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan upaya pencapaian kinerja yang optimal. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II tahun 2025, para pegawai didukung dengan penggunaan perangkat sarana dan prasarana kantor serta Barang Milik Negara (BMN).

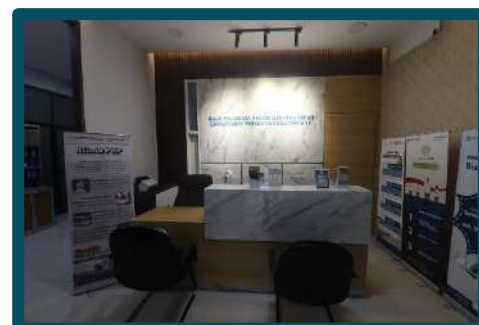
Tabel 1.2 Daftar Barang Milik Negara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II yang Tercatat Tahun 2025

No	Produk	Jumlah	Kondisi
Balai P3KP Kalimantan II			
1	Lemari Besi/Metal	18	Baik
2	AC Split	7	Baik
3	Televisi	4	Baik
4	Laptop	23	Baik
5	Printer	15	Baik
6	Scanner	1	Baik
7	External/Portabel Hardisk	7	Baik
8	Distance Meter	11	Baik
9	Sofa	2	Baik
10	Camera Digital	1	Baik
11	Drone	2	Baik
12	GPS Receiver	1	Baik
13	Tablet PC	2	Baik
14	Software Komputer	4	Baik
15	Pick Up	1	Baik
16	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik
17	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
18	Meja Kerja Kayu	16	Baik

No	Produk	Jumlah	Kondisi
19	Kursi Besi/Metal	25	Baik
20	Loudspeaker	3	Baik
21	Tangga	1	Baik
22	Video Conference	2	Baik
23	Sepeda Motor	2	Baik
24	Mesin Absensi	1	Baik
25	Meja Kerja Besi/Metal	10	Baik
26	Microphone	1	Baik
27	Unit Power Supply	3	Baik
28	Dispenser	5	Baik
29	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik
30	Handy Talky (HT)	8	Baik
31	LCD Projector/Infocus	1	Baik
32	White Board	1	Baik
33	Kursi Fiber Glas/Plastik	18	Baik
34	Meja Lipat	1	Baik
35	Laci Box	1	Baik
36	Kipas Angin	2	Baik
Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur			
1	Pick Up	1	Baik
2	Lemari Besi/Metal	1	Baik
3	Kursi Besi/Metal	14	Baik
4	Drone	1	Baik
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik
6	Kursi Besi/Metal	11	Baik
Satker PKP Provinsi Kalimantan Selatan			
1	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik
2	Meja Kerja Kayu	5	Baik
3	Kursi Besi/Metal	26	Baik
4	Camera Digital	1	Baik
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
6	Meja Lipat	1	Baik
7	Meja Kerja Besi/Metal	10	Baik

No	Produk	Jumlah	Kondisi
Satker PKP Provinsi Kalimantan Utara			
1	Meja Kerja Kayu	6	Baik
2	Kursi Besi/Metal	15	Baik
3	Unit Power Supply	1	Baik
4	GPS Receiver	1	Baik
5	P.C Unit	1	Baik
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik
7	External/ Portable Hardisk	1	Baik
8	Kursi Besi/Metal	10	Baik
9	Kipas Angin	5	Baik
Satker PKP IKN Nusantara			
1	Pick Up	1	Baik
2	Brandkas	1	Baik
3	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
4	LCD Projector/Infocus	2	Baik
5	Televisi	2	Baik
6	Camera Digital	2	Baik
7	Video Conference	1	Baik
8	Drone	2	Baik
9	Handy Talky (HT)	10	Baik
10	Lap Top	22	Baik
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Baik
12	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Baik
13	External/ Portable Hardisk	5	Baik
14	Lemari Besi/Metal	2	Baik
15	Meja Kerja Kayu	5	Baik
16	Kursi Besi/Metal	11	Baik

KANTOR BALAI



Jalan Cendana Komplek PDAM Nomor 167 Kalimantan Timur 75127

Ruang Kepala Balai P3KP Kalimantan II



Ruang Kasubbag Umum dan Tata Usaha



Ruang Kasi Pelaksana Wilayah I

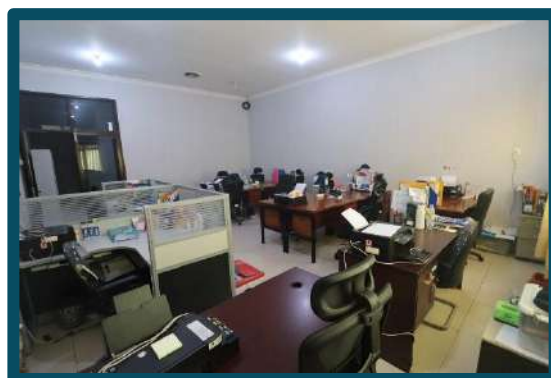


Ruang Kasi Pelaksana Wilayah II

Ruang Rapat



Ruang Staff



Sebagai bagian dari transformasi digital, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II secara proaktif mengoptimalkan sarana prasarana serta mengembangkan berbagai platform digital untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Tabel 1.3 Pemanfaatan Media Balai P3KP Kalimantan II

No	Aplikasi / Media	Keterangan	Alamat
1	Klinik PKP	Merupakan bantuan pemerintah berupa layanan informasi dan bantuan teknis bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas masyarakat dalam	0822-5676-8898

No	Aplikasi / Media	Keterangan	Alamat
		pemenuhan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.	
2	Website	Merupakan website resmi yang menyajikan data terkait Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup Unit Pelaksana Teknis Kementerian PKP	https://pkp.go.id/balai/balai-p3kp-kalimantan-ii
3	Instagram	Merupakan Sosial Media Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	@bp3kp_kalimantan2

1.5 Isu Strategis

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Isu Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2025

ISU STRATEGI TAHUN 2025	
1.	Ketersediaan, distribusi, dan kompetensi SDM di lingkungan organisasi belum optimal sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan sasaran organisasi.
2.	Skema pembiayaan perumahan yang belum terdiversifikasi menyebabkan MBR dan pekerja sektor informal sulit mengakses pembiayaan perumahan, sehingga menghambat keterjangkauan kepemilikan rumah.
3.	Belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi pemanfaatan lahan untuk perumahan.
4.	Dinamika Perubahan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Dalam Penyediaan Perumahan dari Kementerian PUPR berubah ke Kementerian PKP.
5.	Kurang optimalnya Tata Kelola Pelayanan Publik
6.	Belum optimalnya penataan arsip.
7.	Kualitas rumah dan kawasan permukiman yang masih perlu ditingkatkan agar mencapai layak huni.
8.	Belum optimalnya Serah Terima dan Hibah atas aset-aset yang telah diselesaikan pembangunannya.
9.	Regulasi bidang perumahan yang masih tumpang tindih dan terbatas, hal ini karena regulasi yang relevan masih terbatas dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan program dan menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai organisasi yang baru terbentuk
10.	Rendahnya kualitas hunian dan belum terjaminnya kepastian bagi konsumen, terutama MBR

ISU STRATEGI TAHUN 2025	
11.	Lemahnya penegakan hukum, evaluasi kebijakan, serta penyelarasan pusat dan daerah tercermin dari belum optimalnya implementasi dan ketersediaan NSPK, sehingga menghambat konsistensi pelaksanaan program dan pencapaian tujuan organisasi
12.	Kendala implementasi kebijakan hunian berimbang di lapangan.
13.	Belum tersedianya Data dan Sistem Informasi yang Akurat, yang menyebabkan perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan perumahan masih lemah akibat keterbatasan data spasial dan sosial ekonomi yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi.
14.	Kendala pelaksanaan serah terima aset.
15.	Kemitraan dan pendanaan sektor perumahan yang belum dikembangkan dan belum terstruktur.

1.6 Sistematika Laporan

BAB 1 Pendahuluan	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama (<i>strategic issues</i>) yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II.
BAB 2 Perencanaan Kinerja	Pada bab ini diuraikan mengenai visi, misi, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan dalam rencana strategis dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II tahun 2025, metode pengukuran capaian kinerja dan target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II menurut rencana strategis.
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	Pada bab ini diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II pada tahun 2025 sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kinerja (PK).
BAB 4 Penutup	Pada bab ini diuraikan keberhasilan dan/atau kegagalan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II pada tahun 2025 serta rekomendasi dan langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.
LAMPIRAN	Bagian ini berisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, bukti dukung capaian kinerja, penghargaan, berita acara kesepakatan capaian kinerja dan dokumentasi pelaksanaan pembangunan perumahan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



Rencana Strategis
Perjanjian Kinerja
Metode Pengukuran
Target Kinerja Tahun 2025 dalam Pemenuhan Target Renstra

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian PKP

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab membantu Presiden menyelenggarakan pembangunan di bidang perumahan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kepala Negara pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029. Berdasarkan visi Presiden tahun 2025 – 2029 yaitu **Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**, maka Kementerian menyelaraskan visi Kementerian dengan visi tersebut dan menjabarkannya ke dalam tujuan serta sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029.

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “**Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**”, Presiden memiliki misi yaitu delapan asta cita dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan delapan asta cita tersebut dan amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Kementerian menjadi pendukung utama asta cita 6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029, serta mendukung terlaksananya asta cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, ditetapkan 2 (dua) tujuan yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian selama periode 2025–2029. Masing-masing tujuan disertai dengan indikator tujuan untuk mengukur ketercapaiannya. Berdasarkan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II merumuskan tujuan organisasi yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikemukakan sebagai berikut.

1. Tujuan pertama yaitu “peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - e. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - f. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - g. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - h. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 - i. Persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni; dan
 - j. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
2. Tujuan kedua yaitu “peningkatan kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan yaitu persentase peningkatan tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

2.1.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:

- i. Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
- ii. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.

2. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:

- i. Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
- ii. Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.

3. Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:

- i. Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis bebank (ABK) dan kompetensi;
- ii. Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
- iii. Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.

4. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:

- i. Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
- ii. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).

5. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:

- i. Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
- ii. Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.

6. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:

- i. Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan

- ii. Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.

7. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:

- i. Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
- ii. Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

2.1.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penanganan kawasan kumuh, penyediaan PSU, dan penguatan tata kelola secara terintegrasi lintas sektor, guna mendukung kinerja yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Arah kebijakannya difokuskan pada:

- 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan**, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - i. Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - ii. Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - iii. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - iv. Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal.
- 2. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif**, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - i. Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - ii. Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
 - iii. Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- 3. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu**, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrument perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.
- 4. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak**, dilakukan dengan menerapkan strategi:

- i. Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
- ii. Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- iii. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
- iv. Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
- v. Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

2.1.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki peran strategis dalam mendukung agenda nasional untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebagaimana arahan oleh Presiden dalam upaya penyelesaian permasalahan di bidang perumahan. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap hunian layak dan terjangkau adalah:

- 1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan,** dengan strategi:
 - i. Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - ii. Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - iii. Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
 - iv. Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - v. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
- 2. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif,** dengan strategi:
 - i. Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - ii. Pengembangan skema tabungan berencana;
 - iii. Pengembangan bantuan *tunailin-kind* yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;

- iv. Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR);
- v. Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
- vi. Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.

3. Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan di wilayah perdesaan, dengan strategi:

- i. Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
- ii. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
- iii. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
- iv. Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- v. Penguatan kelembagaan.

2.1.2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional di bidang perumahan, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menetapkan sejumlah kebijakan dan strategi prioritas. Langkah-langkah ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan rumah layak huni, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, mendorong integrasi perumahan dengan kawasan strategis dan transportasi publik, serta mengembangkan pembiayaan dan teknologi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, strategi pembangunan dan renovasi rumah difokuskan pada pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan. Adapun strategi pelaksanaan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan diantaranya:

Menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, strategi pembangunan dan renovasi rumah difokuskan pada pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup tujuh strategi utama:

- 1. Mempercepat pembangunan rumah layak huni di wilayah perkotaan**, dengan strategi:
 - i. Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - ii. Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - iii. Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - iv. Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara, pemerintah daerah, dan BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal**, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
- 3. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD)**, dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
- 4. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan**, dengan strategi:
 - i. Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - ii. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - iii. Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - iv. Penguatan kelembagaan.
- 5. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota**, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
- 6. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR**, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
- 7. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital**, dengan strategi

penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.

8. **Percepatan penghunian**, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

2.1.2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Sejalan dengan kebijakan pembangunan perumahan yang dimuat dalam dokumen RPJPN, RPJMN, dan Renstra Kementerian PKP, ditetapkan bahwa arah kebijakan penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko difokuskan pada upaya peningkatan kualitas tata kelola dan dukungan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka disusunlah strategi Direktorat Jenderal sebagai berikut:

1. **Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat**, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
2. **Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya**, dengan strategi sebagai berikut:
 - i. *Risk*, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 - ii. *Compliance*, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - iii. *Financing*, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGHP, skema jaminan penyerapan (off-take guarantee); dan
 - iv. Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Kalimantan II memegang peranan vital dalam memastikan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya selaras dengan visi besar kementerian. Dalam upaya mencapai target hunian layak bagi masyarakat, Balai P3KP Kalimantan II melakukan sinkronisasi kebijakan secara intensif terhadap arah strategis dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Penyelarasan ini bertujuan agar karakteristik pembangunan hunian di Kalimantan—baik di pusat pertumbuhan ekonomi maupun wilayah rural—memiliki standar teknis yang tepat guna dan mampu menjawab tantangan demografis yang ada.

Selain fokus pada fisik bangunan, Balai P3KP Kalimantan II juga mengintegrasikan kebijakan dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman guna menjamin keberlanjutan infrastruktur lingkungan yang komprehensif. Operasionalisasi di lapangan tetap dipandu oleh prinsip akuntabilitas tinggi melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan menyatukan berbagai mandat organisasi ini ke dalam satu ritme kerja yang harmonis, Balai P3KP Kalimantan II berkomitmen menciptakan tata kelola pembangunan yang efisien, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Berikut adalah penjabaran arah kebijakan dan strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II, selaras dengan arah kebijakan dan strategi unit organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1. Peningkatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di lingkungan BP3KP Kalimantan II.

- a. Optimalisasi penyediaan rumah layak huni untuk mewujudkan program 3 Juta Rumah, melalui strategi:
 - Pembangunan rumah susun dan rumah subsidi, terutama untuk MBR dan ASN guna mendukung pembangunan perumahan;
 - Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR dengan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bentuk intervensi langsung kepada masyarakat
 - Penanganan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penataan lingkungan permukiman, serta penguatan peran masyarakat dan pemerintah daerah secara terpadu dan berkelanjutan;
 - Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya;
 - Bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas;

- Pelibatan Swasta dalam Penyediaan PSU dan Infrastruktur Dasar melalui kemitraan pembangunan, pengelolaan, maupun pemeliharaan kawasan permukiman;
 - Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif; dan
 - Penyediaan sanitasi yang layak merupakan bentuk intervensi langsung balai dalam menangani kawasan kumuh sekaligus memastikan pemenuhan standar kesehatan dan kelayakan hunian melalui integrasi sarana sanitasi yang memadai dalam pelaksanaan Program BSPS.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka memperkuat Program yang dilaksanakan pada BP3KP Kalimantan II, melalui strategi:
- Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan *millennials*;
 - Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan;
 - Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran antara balai dan pemerintah daerah melalui integrasi dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, dan dokumen sektoral) untuk memastikan keselarasan program dan lokasi prioritas;
 - Pendampingan pemerintah daerah dalam program BPHTB gratis dan PBG Gratis dan Cepat untuk MBR;
 - Pendampingan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pengusulan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) sebagai dasar perencanaan penanganan kawasan kumuh;
 - Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR;
 - Memanfaatkan teknologi sistem informasi terpadu yang merupakan perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian PKP atau biasa disebut dengan SIBARU bertujuan untuk mengelola tata kelola bantuan perumahan mulai dari tahap pengusulan,

pemantauan pembangunan, hingga pemanfaatan (penghunian dan serah terima aset); dan

- Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik guna membantu masyarakat dalam menyediakan informasi di bidang perumahan melalui program Klinik PKP.
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan dan skema pembiayaan yang inovatif melalui strategi:
- Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/keompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang;
 - Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD Dukungan pengintegrasian rumah sewa (*rental housing*) ke dalam *public housing system*;
 - Dukungan pengoptimalan skema pembiayaan alternatif (*creative financing*) dan *micro finance* untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan secara swadaya;
 - Melaksanakan koordinasi terpadu dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan efektivitas skema pembiayaan bersama (*co-funding*), dukungan APBD, serta optimalisasi sumber pendanaan alternatif termasuk KPBU dan CSR;
 - Mendukung pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan skema pembiayaan pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan rumah layak huni melalui dukungan pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan, strategi ini menjadi bentuk intervensi tidak langsung sebagai koordinator di tingkat unit pelaksana teknis; dan
 - Mendukung pelaksanaan program Kredit Program Perumahan (KPP) salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung penguatan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian akses kredit dengan bunga rendah guna mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, strategi ini menjadi bentuk intervensi tidak langsung sebagai koordinator di tingkat unit pelaksana teknis.

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

- a. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja,** Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi antara Renstra, Rencana Aksi Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan DIPA. Setiap kegiatan dirancang berbasis indikator kinerja yang terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), sehingga pelaksanaan anggaran lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
- b. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan,** Mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui pemantauan kinerja secara berkala, pengendalian internal yang konsisten, serta penyusunan laporan kinerja yang tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi kinerja dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program.
- c. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko,** Menerapkan SPIP secara menyeluruh dengan memperkuat identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Manajemen risiko diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan guna meminimalkan potensi penyimpangan, keterlambatan pelaksanaan, serta ketidaksesuaian *output* dan *outcome*.
- d. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM,** Mengembangkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, manajerial, dan fungsional yang relevan dengan tugas penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, dilakukan penguatan budaya kerja yang berorientasi pada integritas, kinerja, dan pelayanan publik guna mendorong profesionalisme dan tanggung jawab individu maupun organisasi.
- e. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Proses Bisnis,** Memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi pendukung dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan. Digitalisasi proses bisnis dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, keterpaduan informasi, serta transparansi dalam pengelolaan program dan anggaran.
- f. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan,** Meningkatkan koordinasi internal antarunit kerja serta sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi yang efektif diharapkan mampu meningkatkan keselarasan program pusat dan daerah serta memperkuat dukungan terhadap pencapaian target penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai.

- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Responsivitas**, Mendorong penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan memperhatikan standar pelayanan, kecepatan respon, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Evaluasi kepuasan layanan dilakukan secara berkala sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan.
- h. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut**, Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil monev digunakan sebagai bahan pembelajaran organisasi dan dasar penyusunan tindak lanjut perbaikan guna memastikan peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola secara berkelanjutan.

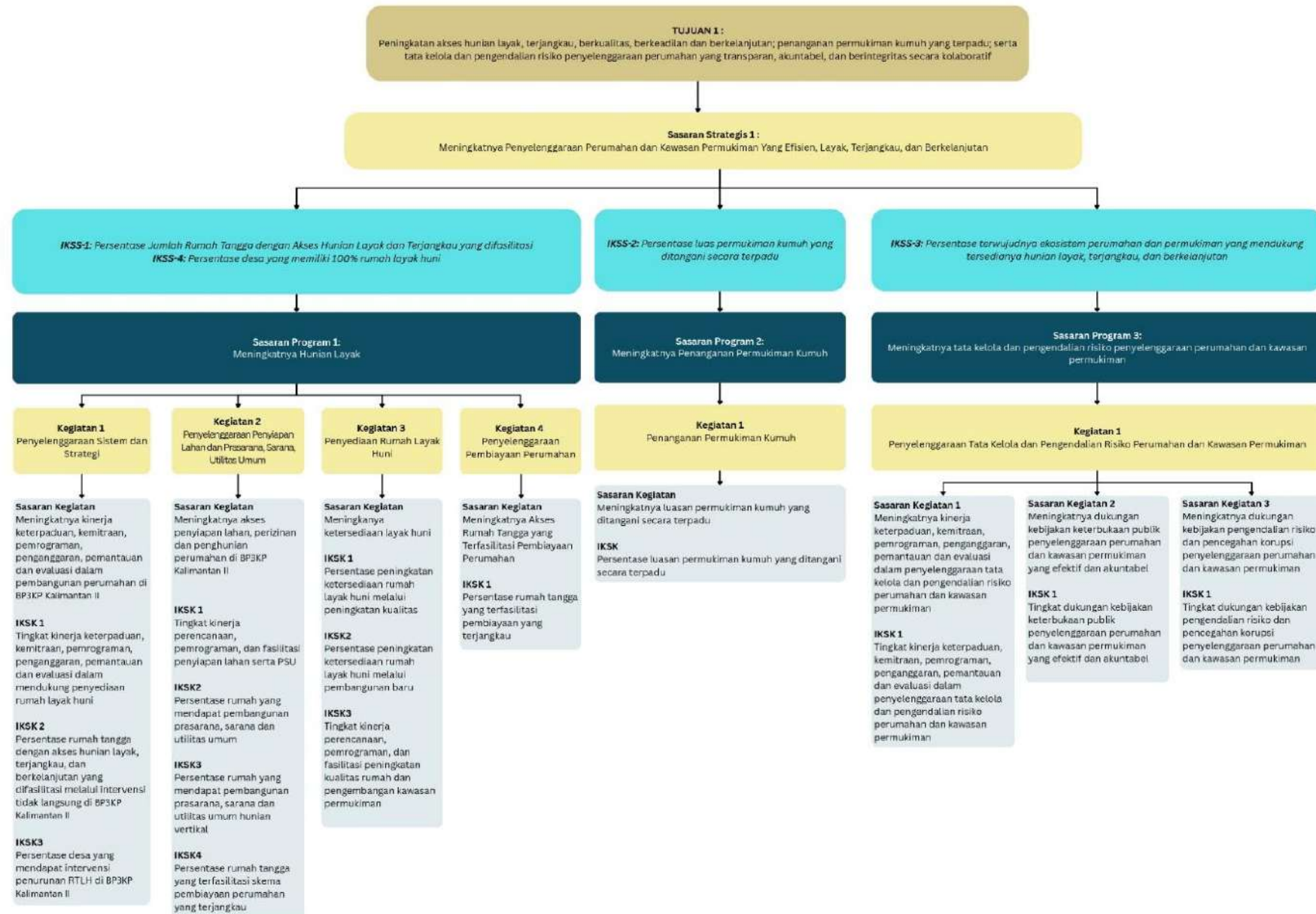
2.1.4 Sasaran Program

Kementerian PKP memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis yang diturunkan dari Tujuan Kementerian yang kemudian dijabarkan ke dalam sasaran program yang akan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi hingga pada unit kerja / unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian PKP periode 2025- 2029, yaitu:

- a. Sasaran strategis (SS)-1, yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”, dengan Sasaran Program (SP) sebagai berikut:
 - 1) SP-1: Meningkatkan Hunian Layak di Kawasan Permukiman;
 - 2) SP-2: Meningkatkan Penanganan Permukiman Kumuh;
 - 3) SP-3: Meningkatkan Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak;
 - 4) SP-4: Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perdesaan;
 - 5) SP-5: Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkat di Wilayah Perkotaan;
 - 6) SP-6: Meningkatkan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Sasaran strategis (SS)-2, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan Sasaran Program (SP) sebagai berikut:
 - 1) SP-1: Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP;
 - 2) SP-2: Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal;
 - 3) SP-3: Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
 - 4) SP-4: Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;

- 5) SP-5: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
- 6) SP-6: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 7) SP-7: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sasaran BP3KP Kalimantan II sejalan dengan Sasaran Strategis (SS) Kementerian, dengan peran sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang bertanggung jawab memastikan implementasi kebijakan terlaksana secara optimal dan menyeluruh di lapangan. Berikut disajikan bagan Sasaran Program dan turunannya pada Sasaran Kegiatan hingga Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh BP3KP Kalimantan II.





Gambar 2.1 Pohon Kinerja BP3KP Kalimantan II

2.1.5 Program dan Kegiatan Pembangunan

Arah kebijakan dan strategi diimplementasikan melalui dua program dan beberapa kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu sebagai berikut:

- a) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman;
 - 2) Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan;
 - 3) Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan; dan
 - 4) Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b) Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
 - 1) Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- 3) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
- 4) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan;
- 5) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan;
- 6) Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- 7) Pengelolaan Keuangan dan BMN.

2.2 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II

Perjanjian kinerja (PK) merupakan salah satu dokumen yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang dilaksanakan pada lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagai catatan, terdapat kekeliruan dalam perhitungan akumulasi target pada Satker Kalimantan Utara akibat adanya perubahan target kegiatan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan dari semula 1 unit menjadi 0 unit, sebagaimana tercantum dalam DIPA Ditjen Perkotaan Revisi ke-4. Perubahan tersebut belum terakomodasi dalam perhitungan akhir sehingga berdampak pada ketidaktepatan akumulasi target dalam Perjanjian Kinerja Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Dengan demikian, total target yang sebelumnya tercantum sebesar 329 unit seharusnya disesuaikan menjadi 328 unit. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, serta transparansi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2025, terdapat Perjanjian Kinerja (PK) awal dan akhir yaitu diantaranya sebagai berikut:

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

A. Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dengan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Juli 2025

Pihak Kedua



Didyk Choiroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	5 Layanan

KEGIATAN

1.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	1.254.564.000
2.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	554.464.000
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	453.314.000
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	712.250.000
5.	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp	987.672.000
		Rp	3.962.264.000

PAGU APBN

Jakarta, 1 Juli 2025

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II



ANGGORO PUTRO

B. Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Jakarta, 30 Agustus 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830906 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, koherensi, penganggaran, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2. Kebijakan Tatalita Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Perancangan Kumuh	4 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	85 Unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyisipan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1. Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	230 Unit

KEGIATAN

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	465.126.000
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	2.427.246.000
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	2.125.845.000
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	4.529.000
Jumlah	Rp	5.022.746.000

Jakarta, 30 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II



ANGGORO PUTRO

C. Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2 Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan

KEGIATAN

1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	476.162.000
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	87.725.000
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	119.113.000
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	140.171.000
	Rp	823.171.000

Jakarta, 1 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II



ANGGORO PUTRO

D. Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 19710707 199703 2 004

Jakarta, 30 Agustus 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Ketepatan, Kesesuaian, Penguasaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Ketepatan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2. Jumlah Laporan Penutupan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1. Ketepatan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Susun ASN dan KANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	1200 Unit
		3. Jumlah Rumah Susun Hutan MGR, Pokja Perumahan Perkotaan	-
3	Meningkatnya Penguasaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Ketepatan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	334 Unit

KEGIATAN	PADU APOR
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp. 320.211.000
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp. 2.150.008.000
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp. 36.989.985.000
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp. 535.069.000
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp. 1.610.577.614.000
	Rp. 1.650.866.887.000,00

Jakarta, 30 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



SRI HARYATI

KAPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II



ANGGORO PUTRO

E. Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 198309052008121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 303.466.000,00

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**



AZIS ANDRIANSYAH

Jakarta, 24 Juni 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KALIMANTAN II**



ANGGORO PUTRO

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

A. Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dengan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2025

Pihak Kedua



Didyk Choiroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Pihak Pertama

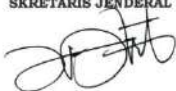


Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II			
SEKRETARIAT JENDERAL			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	5 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	1.470.197.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	647.904.000
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	591.394.000
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	788.090.000
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp	1.124.712.000
		Rp	4.622.297.000

Jakarta, 30 Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II



ANGGORO PUTRO

B. Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2025

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830903 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemutakhiran, pembaruan, pengungkapan, peningkatan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2. Kebijakan Toksis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
2	Meningkatnya keterpaduan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	84 Unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyediaan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1. Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	426 Unit
4	Meningkatnya kawasan permukiman leluasa yang dijangkau secara terpadu	1. Jumlah Peningkatan Permukiman Kumuh	0,1 Hektar

KEGIATAN

1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	465.126.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	2.432.516.000
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	2.088.985.000
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	1.058.132.000
		Rp	6.044.789.000

Jakarta, 30 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II



ANGGORO PUTRO

C. Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 30 Desember 2025



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2. Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	339 Unit

KEGIATAN

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	626.466.000
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	912.870.000
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	7.106.155.000
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	140.171.000
	Rp	8.785.662.000

Jakarta, 30 Desember 2025



IMRAN



ANGGORO PUTRO

D. Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2025

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 1970707 199703 2 004

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

NO	SARANAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Kewaspadaan, Kemitraan, Penganggaran, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
2	Meningkatnya Keterpaduan Rumah Ruri Layak Huni di Perkotaan	2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
		1. Kebijakan penyelenggaraan peningkatan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Susun ASB dan PAKRAM (KKN) Perumahan Perkotaan	1200 Unit
		3. Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	-
		4. Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TG/POLRI Perumahan Perkotaan	-
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	320 Unit

KEGIATAN	PAGO APBN
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp 1.291.223.000
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 7.438.518.000
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp 31.661.076.000
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp 515.069.000
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman BKN Nusantara	Rp 1.610.871.614.000
	Rp 1.651.777.489.000,00

Jakarta, 30 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II



ANGGORO PUTRO

2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)

Terdapat beberapa kali perubahan Perjanjian Kinerja pada BP3KP Kalimantan II dikarenakan adanya penyesuaian dalam dinamika operasional, perubahan target layanan, penyesuaian realisasi yang realistis dan lain lain, adapun kronologi perubahan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun Anggaran 2025 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Satuan	Target (Rp Ribu)		
			PK Awal	PK Revisi	PK Akhir
Perjanjian Kinerja BPKP Kalimantan II dengan Sekretariat Jenderal					
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen					
1	Tingkat layanan dukungan manajemen	Layanan	5	5	5
Anggaran			3.962.264	4.289.097	4.622.297
Perjanjian Kinerja BPKP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
SK. Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni					
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	-	1
2	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan/ Laporan	1	-	1
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	-	4
2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	86	-	84
SK. Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman					
1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	230	-	426
SK. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
1	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	-	-	0,1
Anggaran			5.022.746	-	6.044.759
Perjanjian Kinerja BPKP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
SK. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan					
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	3
2	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	1	1
SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan					

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Satuan	Target (Rp Ribu)		
			PK Awal	PK Revisi	PK Akhir
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	-	3	3
2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	-	339	339
Anggaran			823.171	8.767.828	8.785.662
Perjanjian Kinerja BPKP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					
1	Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/ Laporan	1	1	1
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	5	5	5
SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					
1	Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/ Laporan	1	1	1
2	Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	Unit	1200	1200	1200
3	Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	Unit	-	-	-
4	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	-	-	-
SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					
1	Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan/ Laporan	1	1	1
2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	Unit	334	328	328
Anggaran			1.650.866.887	1.646.508.989	1.651.777.499
Perjanjian Kinerja BPKP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko					
SK. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman					
1	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan/ Laporan	1	-	1
2	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan/ Laporan	1	-	1
Anggaran			303.466	-	303.466

Sumber: Perjanjian Kinerja Balai P3KP Kalimantan II Tahun Anggaran 2025

2.3 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari target yang telah ditetapkan bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari

suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja berupa masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*income*), manfaat, dan dampak. Penilaian ini tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau suatu penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting serta berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Metode pengukuran yang digunakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II dalam menyusun Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja.
- b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran dapat disederhanakan dalam bentuk formulasi rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan. DIPA Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, terdiri dari:

1. DIPA Induk yakni akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga; dan
2. DIPA Petikan yakni DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.

Efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II dapat dilihat dari proses revisi anggaran. Revisi anggaran dilatarbelakangi oleh:

- Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan;

- Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan;
- Adanya perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan. Revisi anggaran bertujuan agar pemanfaatan anggaran dapat lebih efisien sesuai target yang telah ditetapkan.

Revisi anggaran ini juga sebagai tindakan antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan. Selain itu revisi anggaran juga dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah/Presiden yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan. Nantinya revisi anggaran ini dimaksudkan agar mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga, serta meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas dan meningkatkan kualitas belanja APBN.

Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II mengampu 5 DIPA Unit Eselon I yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Berikut adalah perubahan DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II yang telah dilakukan beberapa revisi yang juga menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja Revisi dan Perjanjian Kinerja Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun 2025 dengan kronologi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kronologi Perubahan DIPA BP3KP Kalimantan II

No	Unit Eselon I	Pagu Anggaran	
		Semula	Menjadi
Program Dukungan Manajemen			
1	Sekretariat Jenderal	151.826.000	1.470.197.000
	Kronologi Perubahan	Nominal	
-	DIPA Induk Nomor : SP DIPA-146.01.1.691412/2025 Digital Stamp : DS:8898-2182-0570-7142 Tanggal : 02 Desember 2024	151.886.000	
-	Revisi ke 01 Digital Stamp : DS:8505-5774-6906-6370 Tanggal : 11 Juni 2025	1.254.564.000	
-	Revisi ke 02 Digital Stamp : DS:8505-5774-6906-6370 Tanggal : 14 Juli 2025	1.254.564.000	
-	Revisi ke 03 Digital Stamp : DS:1839-6608-6018-7745 Tanggal : 31 Oktober 2025	1.368.517.000	
-	Revisi ke 04 Digital Stamp : DS:5122-5163-0327-8811 Tanggal : 13 November 2025	1.470.197.000	

No	Unit Eselon I	Pagu Anggaran	
		Semula	Menjadi
-	Revisi ke 05 Digital Stamp : DS:5122-5163-0327-8811 Tanggal : 04 Desember 2025	1.470.197.001	
-	Revisi ke 06 Digital Stamp : DS:5122-5163-0327-8811 Tanggal : 19 Desember 2025	1.470.197.002	
-	Revisi ke 07 Digital Stamp : DS:5122-5163-0327-8811 Tanggal : 19 Desember 2025	1.470.197.003	
-	Revisi ke 08 Digital Stamp : DS:5122-5163-0327-8811 Tanggal : 11 Juni 2032	1.470.197.000	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	50.000.000	465.126.000
	Kronologi Perubahan	Nominal	
-	DIPA Induk Nomor : SP DIPA- 146.03.1.691466/2025 Digital Stamp : DS:3618-1646-6339-4436 Tanggal : 02 Desember 2024	50.000.000	
-	Revisi ke 01 Digital Stamp : DS:3963-1270-0851-5818 Tanggal : 25 Juni 2025	134.826.000	
-	Revisi ke 02 Digital Stamp : DS:3963-1270-0851-5818 Tanggal : 14 Juli 2025	134.826.000	
-	Revisi ke 03 Digital Stamp : DS:6407-9178-1013-1070 Tanggal : 15 Agustus 2025	465.126.000	
-	Revisi ke 04 Digital Stamp : DS:6407-9178-1013-1070 Tanggal : 08 Desember 2025	465.126.000	
-	Revisi ke 05 Digital Stamp : DS:6407-9178-1013-1070 Tanggal : 22 Desember 2025	465.126.000	
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	152.324.000	626.466.000
	Kronologi Perubahan	Nominal	
-	DIPA Induk Nomor : SP DIPA- 146.04.1.691520/2025 Digital Stamp : DS:8307-7289-3045-9208 Tanggal : 02 Desember 2024	152.324.000	
-	Revisi ke 01 Digital Stamp : DS:4894-0643-7225-8274 Tanggal : 03 Juli 2025	476.162.000	
-	Revisi ke 02 Digital Stamp : DS:4894-0643-7225-8274 Tanggal : 14 Juli 2025	476.162.001	
-	Revisi ke 03 Digital Stamp : DS:5108-8463-7685-0058 Tanggal : 24 Oktober 2025	626.466.000	
-	Revisi ke 04 Digital Stamp : DS:5108-8463-7685-0058 Tanggal : 08 Desember 2025	626.466.000	

No	Unit Eselon I	Pagu Anggaran	
		Semula	Menjadi
-	Revisi ke 05 Digital Stamp : DS:5108-8463-7685-0058 Tanggal : 22 Desember 2025	626.466.000	
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	140.000.000	1.291.222.000
	Kronologi Perubahan	Nominal	
-	DIPA Induk Nomor : SP DIPA- 146.05.1.691574/2025 Digital Stamp : DS:8368-6109-9061-8873 Tanggal : 02 Desember 2024	140.000.000	
-	Revisi ke 01 Digital Stamp : DS:9329-2975-8469-7852 Tanggal : 03 Juli 2025	320.211.000	
-	Revisi ke 02 Digital Stamp : DS:9329-2975-8469-7852 Tanggal : 14 Juli 2025	320.211.000	
-	Revisi ke 03 Digital Stamp : DS:1082-9977-2940-5382 Tanggal : 09 Agustus 2025	1.291.222.000	
-	Revisi ke 04 Digital Stamp : DS:1082-9977-2940-5382 Tanggal : 30 September 2025	1.291.222.000	
-	Revisi ke 05 Digital Stamp : DS:1082-9977-2940-5382 Tanggal : 04 Desember 2025	1.291.222.000	
-	Revisi ke 06 Digital Stamp : DS:1082-9977-2940-5382 Tanggal : 15 Desember 2025	1.291.222.000	
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	45.000.000	303.466.000
	Kronologi Perubahan	Nominal	
-	DIPA Induk Nomor : SP DIPA- 146.06.1.691607/2025 Digital Stamp : DS:0080-2774-2394-0852 Tanggal : 02 Desember 2024	45.000.000	
-	Revisi ke 01 Digital Stamp : DS:6247-3331-0451-5205 Tanggal : 24 Juni 2025	303.466.000	
-	Revisi ke 02 Digital Stamp : DS:6247-3331-0451-5205 Tanggal : 14 Juli 2025	303.466.000	
-	Revisi ke 03 Digital Stamp : DS:6247-3331-0451-5205 Tanggal : 04 Desember 2025	303.466.000	
-	Revisi ke 04 Digital Stamp : DS:6247-3331-0451-5205 Tanggal : 15 Desember 2025	303.466.000	
-	Revisi ke 05 Digital Stamp : DS:6247-3331-0451-5205 Tanggal : 26 Desember 2025	303.466.000	

Sumber: DIPA BP3KP Kalimantan II Tahun Anggaran 2025

1. DIPA Sekretariat Jenderal

DIPA Induk

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691412/2025

053808 2142 0370 7142

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini diberikan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Kategori Belanja : (691412) Belanja Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemukiman dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar : Rp. 151.826.000 (SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Bersifat Dari :		Rp.		Jumlah Uang	
1. Rujukan Murni	Rp.	151.826.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Bersifat	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	6. EBSN PBS	Rp.	0

D. Pencapaian dana dibuktikan melalui :
1. KPPN SAMANINDA (046) Rp. 151.826.000

E. Pernyataan Gajaz dan Keterampilan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengisian berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dan pencatatan dalam pelaksanaan bagi Bendahara Umum Negara/Kasir Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Perkiraan Dana dan Perkiraan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kasir Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Bd.
SUHABILLI NAZARA
NP. 197011231665/021000

DIPA Akhir

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691412/2025

053102 6142 0370 8811

Revisi ke 08
Tanggal : 26 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini diberikan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Kategori Belanja : (691412) Belanja Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemukiman dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar : Rp. 1.470.197.000 (SATU MILAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Bersifat Dari :		Rp.		Jumlah Uang	
1. Rujukan Murni	Rp.	1.470.197.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Bersifat	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	6. EBSN PBS	Rp.	0

D. Pencapaian dana dibuktikan melalui :
1. KPPN SAMANINDA (046) Rp. 1.470.197.000

E. Pernyataan Gajaz dan Keterampilan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengisian berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dan pencatatan dalam pelaksanaan bagi Bendahara Umum Negara/Kasir Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Perkiraan Dana dan Perkiraan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kasir Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Bd.
LURY ALFIRMAN
NP. 197003271665/021000

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

DIPA Induk

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691466/2025

053616 1946 6329 1436

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Negara
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini diberikan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Kategori Belanja : (691466) Belanja Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar : Rp. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.03.JA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.03.JA.7650 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

C. Sumber Dana Bersifat Dari :		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	Rp.
1. RUPAH MURNI		50.000.000	0
2. PNBP		0	0
- PNBP TA Bersifat		0	0
3. Pinjaman/hibah Luar Negeri		0	0
- Pinjaman Luar Negeri		0	0
- Hibah Luar Negeri		0	0
4. Pinjaman/hibah Dalam Negeri		0	0
- Pinjaman Dalam Negeri		0	0
- Hibah Dalam Negeri		0	0
5. Hibah Langsung		0	0
- Hibah Luar Negeri Langsung		0	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung		0	0
6. EBSN PBS		0	0
D. Pencapaian dana dibuktikan melalui :			
1. KPPN SAMANINDA	(046) Rp.	50.000.000	

E. Pernyataan Gajaz dan Keterampilan (Declaration)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengisian berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerja dan pencatatan dalam pelaksanaan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Perkiraan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Bd.
SUHABILLAH NAZARI
NP. 197011201996021000

DIPA Akhir

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691466/2025

053617 9175 1915 6016

Revisi ke 05
Tanggal : 22 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Negara
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini diberikan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Kategori Belanja : (691466) Belanja Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar : Rp. 465.126.000 (EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA SERATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.03.JA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.03.JA.7650 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

C. Sumber Dana Bersifat Dari :		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	Rp.
1. RUPAH MURNI		465.126.000	0
2. PNBP		0	0
- PNBP TA Bersifat		0	0
3. Pinjaman/hibah Luar Negeri		0	0
- Pinjaman Luar Negeri		0	0
- Hibah Luar Negeri		0	0
4. Pinjaman/hibah Dalam Negeri		0	0
- Pinjaman Dalam Negeri		0	0
- Hibah Dalam Negeri		0	0
5. Hibah Langsung		0	0
- Hibah Luar Negeri Langsung		0	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung		0	0
6. EBSN PBS		0	0
D. Pencapaian dana dibuktikan melalui :			
1. KPPN SAMANINDA	(046) Rp.	465.126.000	

E. Pernyataan Gajaz dan Keterampilan (Declaration)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengisian berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerja dan pencatatan dalam pelaksanaan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Perkiraan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Bd.
LURY ALFIRMAN
NP. 197003211965021000

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

DIPA Induk



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691574/2025



053006419943610673

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini diberikan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (18)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Kategori Sahur	: (691574)	Suku Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp. 140.000.000	(SERATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

146.05.1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.05.1.7651 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	140.000.000

C. Sumber Dana Bersifat Dari:

1. RUPAH MURNI	Rp.	140.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Bersifat	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	6. EBSN PBS	Rp.	0

D. Pencapaian dana dibuktikan melalui:

1. KPPN SAMANINDA (046) Rp. 140.000.000

E. Pernyataan Gajaz dan Keterampilan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengisian berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerja dan pencatatan dalam pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Perkiraan Dana dan Perkiraan Penarikan yang tercantum dalam DIPA Petikan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Bd.
SUHABILLAH NAZARA
NP. 1970112011990201000

DIPA Akhir



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691574/2025



053006419943610673

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini diberikan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (18)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Kategori Sahur	: (691574)	Suku Pelaksana Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp. 1.291.222.000	(SATU MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

146.05.1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.05.1.7651 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

		Rp.	Jumlah Uang
		Rp.	1.291.222.000

C. Sumber Dana Bersifat Dari:

1. RUPAH MURNI	Rp.	1.291.222.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Bersifat	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	6. EBSN PBS	Rp.	0

D. Pencapaian dana dibuktikan melalui:

1. KPPN SAMANINDA (046) Rp. 1.291.222.000

E. Pernyataan Gajaz dan Keterampilan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengisian berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerja dan pencatatan dalam pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Perkiraan Dana dan Perkiraan Penarikan yang tercantum dalam DIPA Petikan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Bd.
LURY ALFIRMAN
NP. 1970032011990201000

Dalam kurun waktu 12 bulan di Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan beberapa kali revisi anggaran disertai dengan beberapa kali perubahan pada Pagu DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II. Perubahan atas Pagu DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya:

A. DIPA Sekretariat Jenderal

- **DIPA Revisi Ke-02**
 1. Pembukaan Blokir Anggaran;
 2. Realokasi Anggaran.
- **DIPA Revisi Ke-03**
 1. Pembukaan Blokir Anggaran;
 2. Realokasi Anggaran.
- **DIPA Revisi Ke-04**
 1. Pembukaan Blokir Anggaran;
 2. Realokasi Anggaran.

B. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- **DIPA Revisi Ke-03**
 1. Pembukaan Blokir Anggaran;
 2. Realokasi Anggaran;
 3. Penambahan Program/Kegiatan/KRO/RO.

C. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

- **DIPA Revisi Ke-02**
 1. Pembukaan Blokir Anggaran;
 2. Realokasi Anggaran;
 3. Penambahan Program/Kegiatan/KRO/RO.

D. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

- **DIPA Revisi Ke-03**
 1. Pembukaan Blokir Anggaran;
 2. Realokasi Anggaran.

2.5 Target Kinerja Tahun 2025 dalam Pemenuhan Target Renstra

Target kinerja diartikan sebagai sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II yang perlu diukur adalah kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun 2025-2029.

2.5.1 Reviu Target Renstra Tahun 2025-2029

Target kinerja yang ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, serta selaras dengan sasaran strategis organisasi dan target Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Keterkaitan ini memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sekaligus menjadi dasar pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan target yang terukur dan akuntabel, pelaksanaan program diharapkan berkontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai. Berikut adalah target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun 2025 – 2029.

Tabel 2.3 Target Kinerja Rencana Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2025 – 2029

KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT	2025-2029	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		
Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat - Daerah	70	Laporan
	19	Dokumen
	47	Rekomendasi Kebijakan
	1	Kegiatan
Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		
Pembangunan PSU Rumah Tapak	3.937	unit
Pembangunan Rumah Swadaya	37.264	unit
Pembangunan Rumah Khusus	7.172	unit
Pembangunan Rumah Susun	1.494	unit
Permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	95	hektar
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Layanan Perkantoran	25	Layanan
Layanan Umum	81	Layanan
Jumlah Layanan Sarana Internal	25	Layanan
Jumlah Layanan Data dan Informasi	12	Layanan
Jumlah Layanan BMN	8	Layanan
Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	20	Layanan

Sumber: Rencana Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2025-2029

2.5.2 Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra BP3KP Kalimantan II

Target kinerja BP3KP Kalimantan II Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BP3KP Kalimantan II merupakan penjabaran sasaran strategis periode 2025–2029. Target tersebut menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan tahun berjalan, sekaligus sebagai tolok ukur dalam pengendalian dan evaluasi kinerja guna memastikan pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara terarah dan terukur. Berikut adalah Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra BP3KP Kalimantan II

Tabel 2.4 Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra BP3KP Kalimantan II

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)	
-1	-2	-3	-4	-5	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:					
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi				
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak					
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II					
OUTPUT KEGIATAN:					
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	50.000
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	-
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	4	184.260
	4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	-
	5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	472.297

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)
-1			-2	-3	-4	-5
		6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
		7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-
		8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	3	349.473
		9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
		10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	-
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum						
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II						
OUTPUT KEGIATAN:						
		1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	277	19.667.000
		2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-
		3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-
		4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-
		5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	-
		6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni						
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni						

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)
-1			-2	-3	-4	-5
OUTPUT KEGIATAN:						
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	572	19.448.000	
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	-	
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	482	964.000.000	
	4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	-	
	5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	4	12.302	
	6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	-	
	7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	
	8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	-	
	9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	3	2.335.810	
	10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	
	11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan						
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan						
OUTPUT KEGIATAN:						
	1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS						
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh						

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)
-1		-2		-3	-4	-5
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh						
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu						
		OUTPUT KEGIATAN:				
	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		Hektar	-	-
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS						
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						
		OUTPUT KEGIATAN:				
	1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko		Laporan	-	-
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
		OUTPUT KEGIATAN:				
	1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas		Rekomendasi Kebijakan	1	129.232
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
		OUTPUT KEGIATAN:				
	1	Jumlah penerapan manajemen risiko		Rekomendasi Kebijakan	1	174.233
	2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan		Rekomendasi Kebijakan	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)
-1	-2		-3	-4	-5
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II					
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II					
OUTPUT KEGIATAN:					
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	40.076.544
	2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	65.486
	3	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	94.377
	4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Kawasan Permukiman)	Layanan	-	-
	5	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Kawasan Permukiman)	Layanan	-	-
	6	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Kawasan Permukiman)	Layanan	-	-
	7	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-
	8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-
	9	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-
	10	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-
	11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-
	12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-

Sumber: Rencana Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2025-2029

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja
Analisis Perbandingan Kinerja
Analisis Realisasi Anggaran
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BP3KP Kalimantan II. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup:

- a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan
- b. Tingkat pencapaian sasaran Balai P3KP Kalimantan II yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II merupakan Unit Pelaksana Teknis yang sejak tahun 2025 berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perubahan ini merupakan pembaruan nomenklatur dari unit sebelumnya, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada Tahun 2024 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman belum melaksanakan Evaluasi AKIP pada Balai maupun Satker sebagai dampak dari terbentuknya Kementerian baru yang masih dalam penyesuaian baik dalam hal peraturan perundang-undangan maupun hal lain terkait lainnya. Sehingga dalam pembahasan ini, upaya peningkatan akuntabilitas kinerja menggunakan data hasil evaluasi AKIP 2023 sebagai dasar pembahasan. Pada Tahun 2024 BP2P Kalimantan II telah melaksanakan Evaluasi AKIP berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) TA 2023.

Merujuk pada penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi atas AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 78,65 atau dikategorikan BB (Sangat Baik), yang menunjukkan bahwa AKIP sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja,

memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level staf, dengan rincian per komponen sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Nilai Akuntabilitas Kinerja BP2P Kalimantan II Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,20
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,95
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,50
Nilai Akuntabilitas		100,00	78,65

Sumber: Surat Direktur Jenderal Perumahan Nomor PW.0204-Dr/490 tanggal 13 Mei 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Tahun 2023

Belum tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II disebabkan masih adanya kelemahan-kelemahan yang berdasarkan pada catatan rekomendasi dalam surat Direktur Jenderal Perumahan Nomor PW.0204-Dr/490 tanggal 13 Mei 2024 dengan perihal Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Tahun 2023, berdasarkan catatan tersebut Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II berupaya menindaklanjuti catatan tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2 Permasalahan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian AKIP BP2P Kalimantan II Tahun 2023

No.	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja			
a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	-	-	-
b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain crosscutting)	-	-	-
c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Belum semua bukti tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi AKIP Tahun 2022 disampaikan seperti inovasi yang dilakukan yaitu dilakukannya rapat progres mingguan di wilayah BP2P Kalimantan II	Semua rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi AKIP perlu ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik	Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RTL) atas seluruh rekomendasi LHE Implementasi AKIP serta melakukan pendokumentasian bukti dukung secara sistematis
2.	Pengukuran Kinerja			
a.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	-	-	-
b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Pada target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan belum didetailkan dengan rincian sub output kegiatan	Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan agar dapat didetailkan dengan rincian sub output kegiatan	Menyempurnakan indikator dan target kinerja kegiatan dengan merinci capaian ke dalam sub output kegiatan yang terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

No.	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	-	-	-
3. Pelaporan Kinerja				
a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Belum ada bukti supervisi berjenjang terkait penyusunan Laporan Kinerja dari pimpinan, misalnya disposisi Pimpinan berupa masukan/koreksi pimpinan, atau dapat berupa notula rapat terkait penyusunan Laporan Kinerja	Perlu ada supervisi berjenjang dari pimpinan dalam menyusun Laporan Kinerja	Menetapkan dan melaksanakan mekanisme supervisi serta reviu berjenjang oleh pimpinan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja
b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnanya	Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN dan Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas	Dalam Laporan kinerja agar dapat menyajikan perbandingan Realisasi atau capaian tahun berjalan secara standar nasional atau RPJMN serta Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas	Menyajikan analisis perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional/RPJMN serta benchmarking dengan instansi sejenis yang setara sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja di dalam Laporan Kinerja
c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	-	-	-
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-	-	-

No.	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	Belum ada bukti penggunaan aplikasi dalam proses evaluasi SAKIP	Apabila ada kewajiban penggunaan sistem e-sakip dalam mengevaluasi SAKIP agar dapat Balai memanfaatkan/menggunakan sistem e-sakip tersebut	Mengimplementasikan penggunaan sistem e-SAKIP dalam evaluasi AKIP internal serta menyiapkan SDM dan data dukung agar terintegrasi dan akuntabel
c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	-	-	-

Sumber: Surat Direktur Jenderal Perumahan Nomor PW.0204-Dr/490 tanggal 13 Mei 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Tahun 2023

3.2 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II

Laporan Kinerja BP3KP Kalimantan II Tahun 2025 ini berisi hasil pengukuran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan BP3KP Kalimantan II selama periode Tahun Anggaran 2025 yang merujuk pada sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis, pada subbab ini akan membahas terkait capaian kinerja BP3KP Kalimantan II terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Tahun Anggaran 2025. Adapun Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran yaitu Perjanjian Kinerja dengan status revisi akhir.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh BP3KP Kalimantan II dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta 5 (lima) Unit Organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan serta Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Kegiatan di lingkungan BP3KP Kalimantan I dilaksanakan dalam rangka mendukung dua program, yaitu:

- 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- 2) Program Dukungan Manajemen.

Khusus Tahun Anggaran 2025 ini, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya melekat pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman, DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan, DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan, serta DIPA Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen hanya melekat pada DIPA Sekretariat Jenderal.

3.2.1 Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Kalimantan II terhadap DIPA Sekretariat Jenderal menetapkan satu Sasaran Kegiatan yaitu “Meningkatnya Dukungan manajemen Sekretariat Jenderal” dengan satu indikator kinerja yaitu “Tingkat Layanan Dukungan Manajemen dan ditetapkan 5 Layanan sebagai target dengan capaian kinerja yang tercapai pada kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal yaitu sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025. Berikut adalah Rincian Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II Terhadap PK Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Dukungan Manajemen							
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1	Tingkat layanan dukungan manajemen	Layanan	5	5	100
			Satker Balai	Layanan	1	1	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
		Satker PKP Kaltim	Layanan	1	1	100
		Satker PKP Kalsel	Layanan	1	1	100
		Satker PKP Kaltara	Layanan	1	1	100
		Satker PKP IKN	Layanan	1	1	100

Sumber: Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada BP3KP Kalimantan II

3.2.2 Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Kalimantan II terhadap DIPA Ditjen Kawasan Permukiman menetapkan empat Sasaran Kegiatan yaitu:

- 1) Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni;
- 2) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman;
- 3) Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman; dan
- 4) Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.

Masing-masing Sasaran Kegiatan memiliki masing-masing indikator kinerja yang melekat pada setiap sasaran kegiatan. Adapun capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II Terhadap PK Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman						
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	100
		Satker Balai	Laporan	1	1	100
		2 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100
		Satker Balai	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
		Satker Balai	Laporan	1	1	100
		Satker PKP Kaltim	Laporan	1	1	100
		Satker PKP Kalsel	Laporan	1	1	100
		Satker PKP Kaltara	Laporan	1	1	100
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	84	84	100
		Satker PKP Kaltim	Unit	84	84	100
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1 Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	426	426	100
		Satker PKP Kalsel	Unit	426	426	100
4	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0,1	0,1	100
		Satker PKP Kaltara	Hektar	0,1	0,1	100

Sumber: Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada BP3KP Kalimantan II

3.2.3 Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Kalimantan II terhadap DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan menetapkan dua Sasaran Kegiatan yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- 2) Meningkatkan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan.

Masing-masing Sasaran Kegiatan memiliki masing-masing indikator kinerja yang melekat pada setiap sasaran kegiatan. Adapun terdapat target kinerja yang tercapai tidak menyentuh angka maksimal yaitu pada Indikator Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan dengan capaian hanya 99,41%. Hal ini disebabkan adanya deviasi target kinerja sebesar -2 Unit Rumah Swadaya pada unit kerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2025, di mana target ditetapkan 308 unit namun hanya tercapai 306 unit. Adapun rincian Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II Terhadap PK Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan							
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100
			Satker PKP Kaltim	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Kalsel	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Kaltara	Laporan	1	1	100
		2	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	1	100
			Satker Balai	Kegiatan	1	1	100
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100
			Satker Balai	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Kaltim	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Kalsel	Laporan	1	1	100
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	339	337	99,41
			Satker PKP Kaltim	Unit	308	306	99,35
			Satker PKP Kalsel	Unit	31	31	100

Sumber: Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada BP3KP Kalimantan II

3.2.4 Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Kalimantan II terhadap DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan menetapkan tiga Sasaran Kegiatan yaitu:

- 1) Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan;
- 2) Meningkatkan Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan; dan
- 3) Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan.

Masing-masing Sasaran Kegiatan memiliki masing-masing indikator kinerja yang melekat pada setiap sasaran kegiatan. Sebagai catatan, terdapat kekeliruan dalam perhitungan akumulasi target pada Satker Kalimantan Utara akibat adanya perubahan target kegiatan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan dari semula 1 unit menjadi 0 unit, sebagaimana tercantum dalam DIPA Ditjen Perkotaan Revisi ke-4. Perubahan tersebut belum terakomodasi dalam perhitungan akhir sehingga berdampak pada

ketidaktepatan akumulasi target dalam Perjanjian Kinerja Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Dengan demikian, total target yang sebelumnya tercantum sebesar 329 unit seharusnya disesuaikan menjadi 328 unit. Secara keseluruhan capaian kinerja yang tercapai pada kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan secara keseluruhan sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025. Berikut adalah Rincian Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II Terhadap PK Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100
			Satker Balai	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	5	5	100
			Satker Balai	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Kaltim	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Kalsel	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Kaltara	Laporan	1	1	100
			Satker PKP IKN	Laporan	1	1	100
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100
			Satker Balai	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100
		2	Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	Unit	1200	1200	100
			Satker PKP IKN	Unit	1200	1200	100
		3	Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	Unit	-	-	-
			Satker PKP Kaltim	Unit	-	-	-
		4	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian	%
			Satker PKP Kalsel	Unit	-	-	-
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100
			Satker Balai	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	Unit	328	328	100
			Satker PKP Kaltim	Unit	263	263	100
			Satker PKP Kalsel	Unit	65	65	100

Sumber: Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada BP3KP Kalimantan II

3.2.5 Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Kalimantan II terhadap DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menetapkan dua Sasaran Kegiatan yaitu:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman; dan
- 2) Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Masing-masing Sasaran Kegiatan memiliki masing-masing indikator kinerja yang melekat pada setiap sasaran kegiatan. Berikut adalah Rincian Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II Terhadap PK Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian	%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	1	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100
			Satker Balai	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100
			Satker Balai	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	1	100

Sumber: Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada BP3KP Kalimantan II

3.2.6 Capaian Realisasi Kinerja Balai P3KP Kalimantan II Tahun 2025

Capaian realisasi kinerja Satuan Kerja Balai P3KP Kalimantan II Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Uraian capaian kinerja disusun dengan membandingkan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator, guna menilai tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi balai. Analisis ini menjadi dasar dalam mengevaluasi keberhasilan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara optimal dan berkelanjutan.

Berikut adalah Realisasi Keuangan dan Fisik Balai P3KP Kalimantan II Tahun 2025 yang disajikan per DIPA Unit Organisasi mencakup DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Balai P3KP Kalimantan II Tahun 2025

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
Program Dukungan Manajemen											
Sekretariat Jenderal											
1	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			4.622.297	4.547.565	100%	98,38%	100%	100%	100%
2	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan	4.622.297	4.547.565	100%	98,38%	100%	100%	100%
3	7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	5	Layanan	4.622.297	4.547.565	100%	98,38%	100%	100%	100%
		Satker Balai	1	Layanan	1.470.197	1.451.519	100%	98,73%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kaltim	1	Layanan	591.394	589.171	100%	99,62%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kalsel	1	Layanan	647.904	634.647	100%	97,95%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kaltara	1	Layanan	788.090	750.116	100%	95,18%	100%	100%	100%
		Satker PKP IKN	1	Layanan	1.124.712	1.122.112	100%	99,77%	100%	100%	100%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman											
1	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			6.044.759	5.956.666	100%	98,54%	100%	100%	100%
2	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	607.215	599.580	100%	98,74%	100%	100%	100%
3	7659.FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1	Laporan	84.826	84.465	100%	99,57%	100%	100%	100%
4	7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4	Laporan	522.389	515.114	100%	98,61%	100%	100%	100%
		Satker Balai	1	Laporan	333.450	333.325	100%	99,96%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kaltim	1	Laporan	92.164	85.016	100%	92,24%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kalsel	1	Laporan	92.246	92.245	100%	100%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kaltara	1	Laporan	4.529	4.528	100%	99,98%	100%	100%	100%
5	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian) [PN]		Rekomendasi Kebijakan / Laporan	46.850	46.770	100%	99,83%	100%	100%	100%
6	7659.PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	46.850	46.770	100%	99,83%	100%	100%	100%
7	FISIK	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	84	Unit	1.996.821	1.987.551	100%	99,54%	100%	100%	100%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
		Satker PKP Kaltim	84	Unit	1.996.821	1.987.551	100%	99,54%	100%	100%	100%
8	FISIK	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	426	Unit	2.340.270	2.269.166	100%	96,96%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kalsel	426	Unit	2.340.270	2.269.166	100%	96,96%	100%	100%	100%
9	FISIK	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	0,1	Hektar	1.053.603	1.053.600	100%	100%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kaltara	0,1	Hektar	1.053.603	1.053.600	100%	100%	100%	100%	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan											
1	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			1.651.777.499	1.650.566.338	100%	99,93%	100%	100%	100%
2	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)		Rekomendasi Kebijakan / Laporan	942.323	929.372	100%	98,63%	100%	100%	100%
3	7661.ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	408.618	408.395	100%	99,95%	100%	100%	100%
4	7661.ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	221.235	213.033	100%	96,29%	100%	100%	100%
5	661.ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	312.470	307.944	100%	98,55%	100%	100%	100%
6	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	2.589.637	2.558.089	100%	98,78%	100%	100%	100%
7	7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5	Laporan	2.589.637	2.558.089	100%	98,78%	100%	100%	100%
		Satker Balai	1	Laporan	348.899	325.411	100%	93,27%	100%	100%	100%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
		Satker PKP Kaltim	1	Laporan	619.775	619.173	100%	99,90%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kalsel	1	Laporan	598.031	598.017	100%	100%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kaltara	1	Laporan	515.069	507.783	100%	98,59%	100%	100%	100%
		Satker PKP IKN	1	Laporan	507.863	507.705	100%	99,97%	100%	100%	100%
8	FISIK	Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	1200	Unit	1.610.363.751	1.609.298.751	100%	99,93%	100%	99,97%	100%
		Satker PKP IKN	1200	Unit	1.610.363.751	1.609.298.751	100%	99,93%	100%	99,97%	100%
9	FISIK	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	328	Unit	7.361.672	7.301.416	100%	99,18%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kaltim	263	Unit	5.809.695	5.793.255	100%	99,72%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kalsel	65	Unit	1.551.977	1.508.161	100%	97,18%	100%	100%	100%
10	FISIK	Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	65	Unit	25.231.606	25.210.952	100%	99,92%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kaltim	65	Unit	25.231.606	25.210.952	100%	99,92%	100%	100%	100%
11	FISIK	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1	Unit	5.288.510	5.267.757	100%	99,61%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kalsel	1	Unit	5.288.510	5.267.757	100%	99,61%	100%	100%	100%
Direktotar Jenderal Perumahan Perdesaan											
1	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			8.785.662	8.677.202	100%	98,77%	100%	99,80%	100%
2	7660.AEA	Koordinasi (kegiatan)		Kegiatan	476.162	476.162	100%	100%	100%	100%	100%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
3	7660.AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Kegiatan	476.162	476.162	100%	100%	100%	100%	100%
4	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	626.811	595.783	100%	95,05%	100%	100%	100%
5	7660.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3	Laporan	347.009	316.373	100%	91,17%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kaltim	1	Laporan	119.113	118.809	100%	99,75%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kalsel	1	Laporan	87.725	67.125	100%	76,52%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kaltara	1	Laporan	140.171	130.439	100%	93,06%	100%	100%	100%
6	7660.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3	Laporan	279.802	279.410	100%	99,86%	100%	100%	100%
		Satker Balai	1	Laporan	150.304	150.304	100%	100%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kaltim	1	Laporan	110.664	110.272	100%	99,65%	100%	100%	100%
		Satker PKP Kalsel	1	Laporan	18.834	18.834	100%	100,00%	100%	100%	100%
7	FISIK	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	339	Unit	7.682.689	7.605.257	100%	98,99%	100%	99,41%	100%
		Satker PKP Kaltim	308	Unit	6.876.378	6.815.333	100%	99,11%	100%	99,35%	100%
		Satker PKP Kalsel	31	Unit	806.311	789.924	100%	97,97%	100%	100%	100%
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko											
1	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			303.466	290.676	100%	95,79%	100%	100%	100%

No	Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
2	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)		Rekomendasi Kebijakan / Laporan	303.466	290.676	100%	95,79%	100%	100%	100%
3	7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	121.410	116.233	100%	95,74%	100%	100%	100%
4	7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	182.056	174.444	100%	95,82%	100%	100%	100%
Total					1.671.533.683	1.670.038.447	100%	99,91%	100%	99,97%	100%

Sumber: <https://my.pkp.go.id/>

Secara umum, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi kinerja yang dicapai telah selaras dengan target yang ditetapkan, sebagaimana tercermin dari tingkat capaian keuangan sebesar 99,91% dan capaian fisik sebesar 99,97%, yang mengindikasikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai secara maksimal pada pelaksanaan fisik, yaitu pada pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 Unit (2 Penerima Bantuan). Tidak tercapainya kegiatan tersebut secara maksimal disebabkan beberapa kendala yang menyebabkan pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan seperti pengunduran diri calon penerima bantuan, permasalahan tanah, masalah keluarga, tidak memenuhi *readiness criteria*, data penerima yang telah terdata sebagai pengganti, konflik keluarga.

3.2.7 Capaian Kinerja pada Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Berdasarkan efektifitas kinerja, Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II telah melaksanakan target kinerja yang telah diperjanjikan dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan masing-masing Unit Eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dengan realisasi keuangan sebesar **98,11%**.

Kronologi capaian tersebut disebabkan adanya:

1. Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
2. Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-401/AG/AG.3/2025 tanggal 24 April 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-3 pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP TA 2025;
3. Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-200/PB.2/2025 tanggal 25 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran.

Berikut adalah rincian realisasi keuangan untuk kegiatan di Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II:

Tabel 3.9 Rincian Realisasi Keuangan Satuan Kerja BP3KP Kalimantan II

No	Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu (RP Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik	
					RN	RL	RN	RL
Program Dukungan Manajemen								
Sekretariat Jenderal								
1	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1.470.197	1.451.573	100	98,73	100	100
2	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	1.470.197	1.451.573	100	98,73	100	100
3	7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.470.197	1.451.573	100	98,73	100	100
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
1	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	465.126	464.560	100	99,88	100	100
2	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	415.126	414.730	100	99,90	100	100

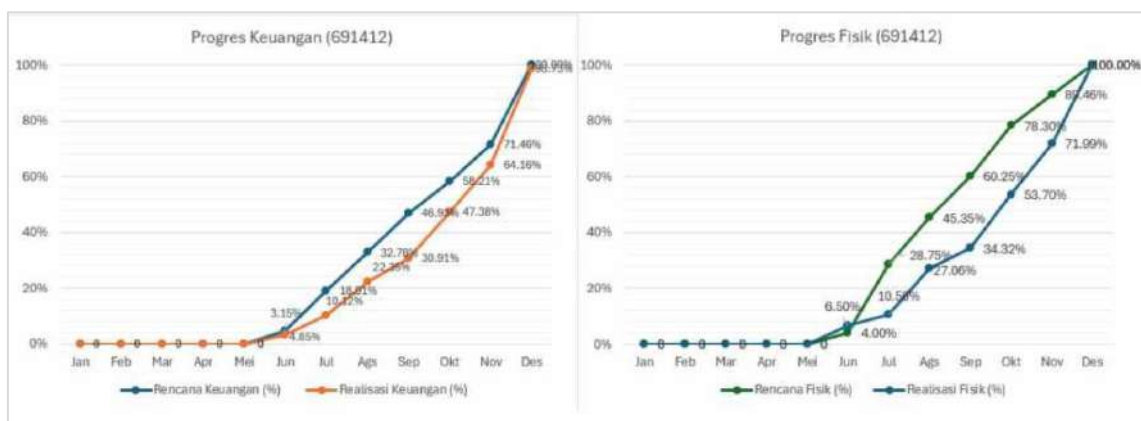
No	Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu (RP Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik	
					RN	RL	RN	RL
3	7659.FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	84.826	84.465	100	99,57	100	100
4	7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	330.300	330.265	100	99,99	100	100
5	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian) [PN]	50.000	49.830	100	99,66	100	100
6	7659.PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000	49.830	100	99,66	100	100
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan								
1	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.291.222	1.254.784	100	97,18	100	100
2	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	942.323	929.372	100	98,63	100	100
3	7661.ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	408.618	408.395	100	99,95	100	100
4	7661.ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	221.235	213.033	100	96,29	100	100
5	661.ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	312.470	307.944	100	98,55	100	100
6	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	348.899	325.411	100	93,27	100	100
7	7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	348.899	325.411	100	93,27	100	100
Direktotar Jenderal Perumahan Perdesaan								
1	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	626.466	616.327	100	98,38	100	100
2	7660.AEA	Koordinasi (kegiatan)	476.162	466.066	100	97,88	100	100
3	7660.AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	476.162	466.066	100	97,88	100	100
4	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	150.304	150.261	100	99,97	100	100
5	7660.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	150.304	150.261	100	99,97	100	100
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko								
1	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	303.466	290.676	100	95,79	100	100

No	Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik	
					RN	RL	RN	RL
2	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	303.466	290.676	100	95,79	100	100
3	7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	129.233	124.055	100	95,99	100	100
4	7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	174.233	166.621	100	95,63	100	100
Total			4.156.477	4.077.865	100	98,11	100	100

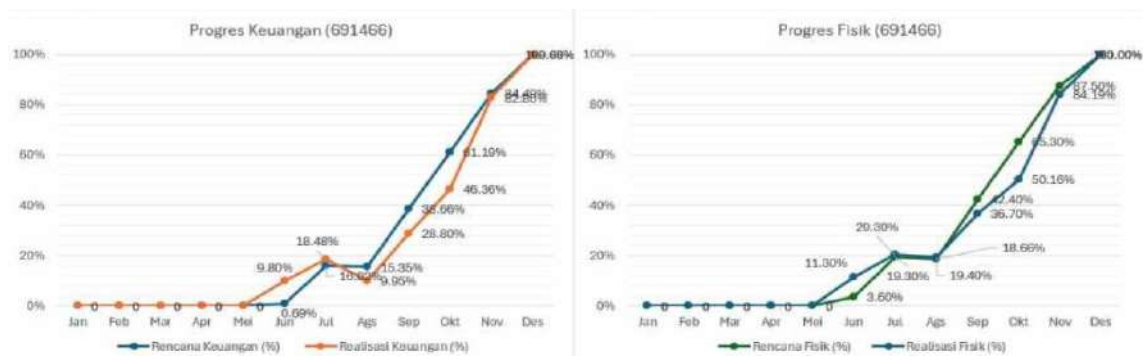
Sumber: Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja BP3KP Kalimantan II



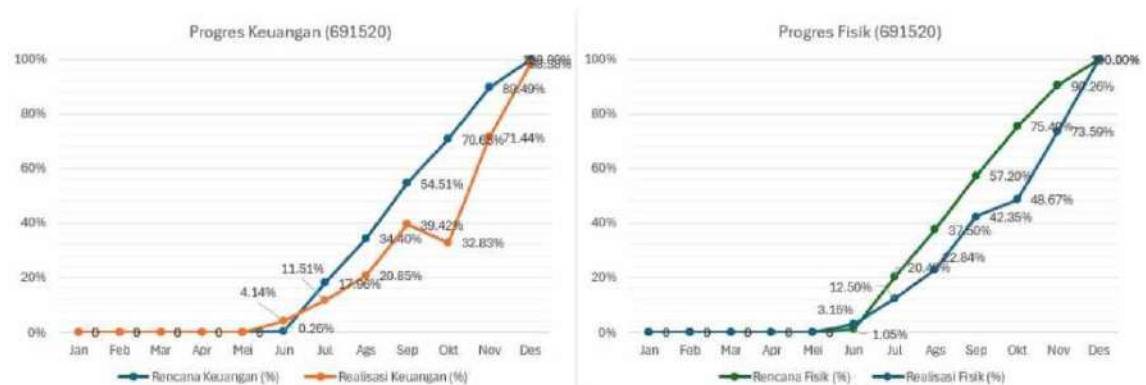
Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Belanja Barang Satuan Kerja BP3KP Kalimantan II



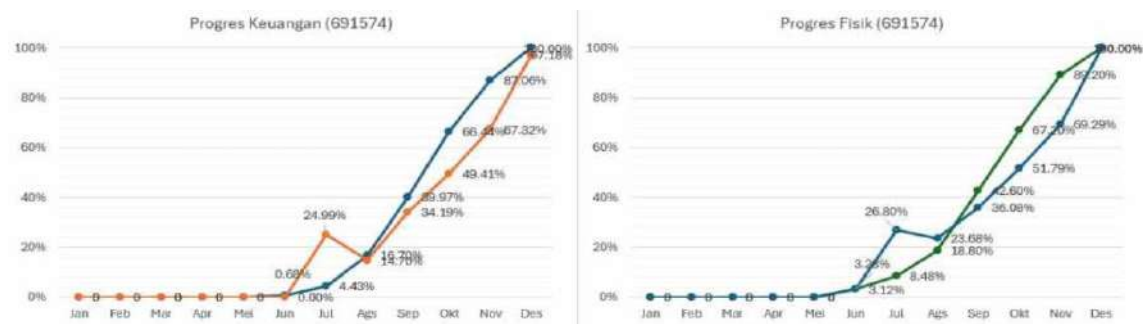
Gambar 3.2 Grafik Progres Keuangan dan Fisik DIPA Sekretariat Jenderal



Gambar 3.3 Grafik Progres Keuangan dan Fisik DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



Gambar 3.4 Grafik Progres Keuangan dan Fisik DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



Gambar 3.5 Grafik Progres Keuangan dan Fisik DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



Gambar 3.6 Grafik Progres Keuangan dan Fisik DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

3.3 Capaian Kinerja Kegiatan Lainnya

Capaian kinerja kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II, meliputi dukungan pelaksanaan SKB 3 Menteri, peningkatan sanitasi, layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), fasilitator Pemerintah Daerah terkait program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), fasilitator pemerintah daerah terkait kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta pendampingan program Kredit Program Perumahan (KPP) kepada Pemerintah Daerah. Uraian ini disajikan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi program-program tersebut dalam mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

A. Realisasi Tindak Lanjut 3 SKB Menteri

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pekerjaan Umum telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri sebagai bentuk dukungan terhadap target pembangunan tiga juta rumah. Kebijakan ini ditetapkan untuk mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Langkah tersebut merupakan strategi percepatan pencapaian Program Tiga Juta Rumah, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses terhadap hunian layak.

Dalam implementasinya, kebijakan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan aksesibilitas MBR terhadap rumah layak serta penguatan peran pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Namun demikian, diperlukan pengawasan yang ketat agar fasilitas pembebasan BPHTB dan retribusi PBG tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk pengembang skala besar di luar sasaran MBR.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan sebagai wilayah kerja BP3KP Kalimantan II telah menindaklanjutinya melalui penerbitan peraturan kepala daerah. Berikut disajikan status implementasi kebijakan dimaksud berdasarkan perkembangan penerbitan regulasi daerah terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG di masing-masing provinsi.

Tabel 3.10 Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/ Kota	Pembebasan BPHTB	Pembebasan Retribusi PBG	Status Implementasi
		Nomor Perkada	Nomor Perkada	
1	Kota Balikpapan	Perwali Balikpapan No 33 tahun 2024	Perwali Balikpapan No. 34 Tahun 2024	100%

No	Kabupaten/ Kota	Pembebasan BPHTB	Pembebasan Retribusi PBG	Status Implementasi
		Nomor Perkada	Nomor Perkada	
2	Kota Samarinda	Perwali Samarinda Nomor 58 Tahun 2024	1. Perwali Samarinda No. 57 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 2. Perwali Samarinda No. 33 Tahun 2025 (Perubahan Atas Perwal 57/2024)	100%
3	Kota Bontang	Perwali Bontang No. 36 Tahun 2025	Perwali Bontang No.37 Tahun 2025	100%
4	Kab Berau	Perbup Berau No. 51 Tahun 2024	Perbup Berau No. 52 Tahun 2024	100%
5	Kab Kutai Kartanegara	Perbup Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2025	Perbup Kutai Kartanegara No. 4 Tahun 2025	100%
6	Kab Kutai Barat	Perbup Kutai Barat No. 1 Tahun 2025	Perbup Kutai Barat No. 2 Tahun 2025	100%
7	Kab Kutai Timur	Perbup Kutai Timur No. 35 Tahun 2024	Perbup Kutai Timur No. 36 Tahun 2024	100%
8	Kab Mahakam Ulu	Perbup Mahakam Ulu No. 1 Tahun 2025	Perbup Mahakam Ulu No. 2 Tahun 2025	100%
9	Kab Paser	Perbup Paser No. 39 Tahun 2024	Perbup Paser No. 40 Tahun 2024	100%
10	Kab Penajam Paser Utara	Perbup Penajam Paser Utara No. 49 Tahun 2024	Perbup Penajam Paser Utara No. 48 Tahun 2024	100%

Sumber: Hasil Rekap Pendataan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penghapusan BPHTB dan Retribusi PBG

Tabel 3.11 Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Pembebasan BPHTB	Pembebasan Retribusi PBG	Status Implementasi
		Nomor Perkada	Nomor Perkada	
1	Kota Banjarbaru	Perwali Banjarbaru No. 48 Tahun 2024	Perwali Banjarbaru No. 47 Tahun 2024	100%
2	Kota Banjarmasin	Perwali Banjarmasin No 16 tahun 2025		100%
3	Kab Balangan	Perbup Balangan No. 72 Tahun 2024	Perbup Balangan No. 4 Tahun 2025	100%
4	Kab Banjar	Perbup Banjar No. 44 Tahun 2024	Perbup Banjar No. 49 Tahun 2024	100%
5	Kab Barito Kuala	Perbup Barito Kuala No. 74 Tahun 2024	Perbup Barito Kuala No. 75 Tahun 2024	100%
6	Kab Hulu Sungai Selatan	Perbup Hulu Sungai Selatan No. 54 Tahun 2024	Perbup Hulu Sungai Selatan No. 55 Tahun 2024	100%
7	Kab Hulu Sungai Tengah	Perbup Hulu Sungai Tengah No. 48 Tahun 2024	Perbup Hulu Sungai Tengah No. 49 Tahun 2024	100%
8	Kab Hulu Sungai Utara	Perbup HSU No 1 tahun 2025		100%
9	Kab Kotabaru	Perbup Kotabaru No 87 tahun 2024		100%
10	Kab Tabalong	Perbup Tabalong No. 7 Tahun 2025	Perbup Tabalong No. 6 Tahun 2025	100%

No	Kabupaten/Kota	Pembebasan BPHTB	Pembebasan Retribusi PBG	Status Implementasi
		Nomor Perkada	Nomor Perkada	
11	Kab Tapin	Perbup Tapin No. 03 Tahun 2025	Perbup Tapin No. 05 Tahun 2025	100%
12	Kab Tanah Bumbu	Perbup Tanah Bumbu No. 70 Tahun 2024	Perbup Tanah Bumbu No. 71 Tahun 2024	100%
13	Kab Tanah Laut	Perbup Tanah Laut No. 68 Tahun 2024		100%

Sumber: Hasil Rekap Pendataan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penghapusan BPHTB dan Retribusi PBG

Tabel 3.12 Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Pembebasan BPHTB	Pembebasan Retribusi PBG	Status Implementasi
		Nomor Perkada	Nomor Perkada	
1	Kota Tarakan	Perwali Tarakan No. 2 Tahun 2025	Perwali Tarakan No. 1 Tahun 2025	100%
2	Kabupaten Bulungan	Perbup Bulungan No. 47 Tahun 2024	Perbup Bulungan No. 48 Tahun 2024	100%
3	Kab Malinau	Perbup Malinau No. 66 Tahun 2024	Perbup Malinau No. 67 Tahun 2024	100%
4	Kab Nunukan	Perbup Nunukan No. 42 Tahun 2024	Perbup Nunukan No. 43 Tahun 2024	100%
5	Kab Tana Tidung	Perbup Tana Tidung No. 5 Tahun 2025	Perbup Tana Tidung No. 4 Tahun 2024	100%

Sumber: Hasil Rekap Pendataan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Penghapusan BPHTB dan Retribusi PBG

B. Realisasi Layanan Klinik PKP

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus mengatur penyelenggaraan kebijakan Bantuan Pembangunan Perumahan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana terhadap bantuan tersebut dapat diberikan layanan informasi dan bantuan teknis berupa Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman. Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni dan memberikan layanan informasi serta bantuan teknis untuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni. Untuk melaksanakan amanat dalam Pasal 2 ayat (12) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, serta dalam rangka penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman yang efisien, efektif, dan akuntabel, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan Klinik PKP yaitu mengukur kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak huni dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan perumahan, meningkatkan keswadayaan masyarakat melalui program pendampingan dan pemberian bantuan teknis, serta mendorong

pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Singkatnya, Klinik PKP berfungsi sebagai “one-stop service” bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, pendampingan, dan solusi teknis terkait perumahan dan permukiman, sehingga dapat memperkuat akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Informasi

Klinik PKP menyediakan informasi tentang rumah layak huni, berupa informasi mengenai perencanaan rumah, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, atau pemanfaatan dan pemeliharaan rumah.

b. Konsultasi

Layanan konsultasi diberikan kepada masyarakat yang mengajukan pertanyaan atau permintaan konsultasi atas permasalahan terkait perumahan.

c. Pendampingan dan Bantuan Teknis

Pendampingan dan Bantuan teknis merupakan tindak lanjut dari layanan konsultasi. Bantuan teknis dapat diberikan dalam bentuk layanan pendampingan perencanaan pembangunan/perbaikan rumah sederhana, advis teknis penggunaan bahan bangunan, pemberian masukan teknis pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah sederhana, atau pendampingan pengawasan konstruksi rumah sederhana.

Layanan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan rumah, berikut adalah beberapa jenis layanan Klinik Perumahan Kawasan Permukiman:

Perencanaan Rumah	• Perancangan rumah sederhana; • Database desain rumah dan RAB; • Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); • Prosedur Sertifikat laik Fungsi (SLF); • Prosedur legalisasi lahan; • Konsep <i>Green Building</i>; • Layanan Perencanaan rumah lainnya.
Pembiayaan Rumah	• Fasilitas pemilihan sumber pendanaan dan pembiayaan; • Pemilihan Lembaga jasa keuangan; • Analisis kemampuan mengangsur; • Fasilitas pengajuan kredit perolehan lahan atau kredit pemilikan/pembangunan rumah; • Fasilitas pemilihan rumah subsidi layak huni; • Layanan pembiayaan rumah lainnya.

Pelaksanaan Konstruksi	• Teknik konstruksi; • Metode membangun/memperbaiki rumah; • Standar material/bahan bangunan; • Pemilihan tukang; • Pelatihan tukang bekerjasama dengan Lembaga terkait; • Pemberdayaan masyarakat; • Layanan pelaksanaan konstruksi lainnya.
Pengawasan Konstruksi	• Teknik pengawasan; • Format kartu kendali konstruksi mandiri; • Pemberdayaan masyarakat; • Layanan pengawasan konstruksi lainnya.
Pemanfaatan rumah, rumah susun, perumahan, dan kawasan permukiman	• Tata cara pemeliharaan; • Tata cara perawatan; • Tata cara pengelolaan; • Pengembangan kawasan; • Pemberdayaan masyarakat; • Layanan pemanfaatan.
Penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	• Konsultasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan; • Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) kepada Pemda; • Pemberdayaan masyarakat; • Informasi upaya-upaya pencegahan kumuh; • Layanan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh lainnya.
Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat	• Sosialisasi pemakaian aplikasi BENARPKP; • Layanan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat lainnya.

Capaian layanan berdasarkan metode dan kategori layanan pada Tahun Anggaran 2025 yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Capaian Berdasarkan Layanan Offline

No	Kategori Layanan Offline	Jumlah Layanan
1	Informasi	41
2	Konsultasi	148
3	Pendampingan dan bantuan teknis	0
Total		189

Sumber: Laporan Akhir Klinik PKP BP3KP Kalimantan II

Tabel 3.14 Capaian Berdasarkan Layanan Online

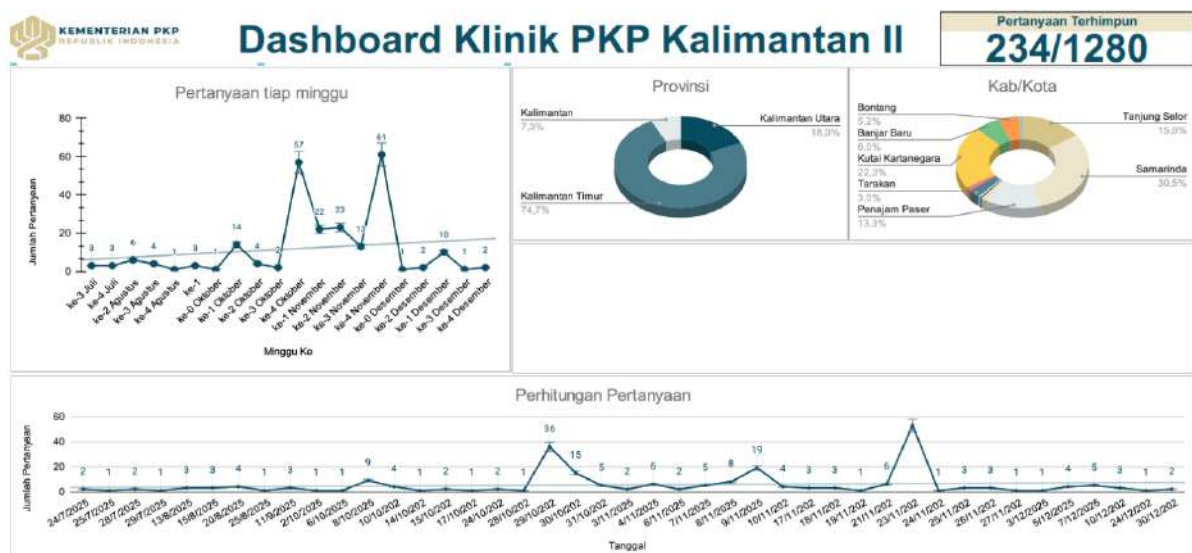
No	Kategori Layanan Offline	Jumlah Layanan
1	Layanan Online	39
2	Layanan Mobile	6
Total		45

Sumber: Laporan Akhir Klinik PKP BP3KP Kalimantan II

Tabel 3.15 Capaian Berdasarkan Kategori Layanan

No	Kategori Layanan Offline	Jumlah Layanan
1	Perencanaan rumah	37
2	Pembiayaan rumah	117
3	Pelaksanaan konstruksi	9
4	Pengawasan konstruksi	0
5	Pemanfaatan rumah, rumah susun, perumahan dan kawasan permukiman	61
6	Penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	8
7	Fasilitas penanganan pengaduan masyarakat	2
Total		234

Sumber: Laporan Akhir Klinik PKP BP3KP Kalimantan II



Gambar 3.7 Dashboard Klinik PKP Kalimantan II

C. Pendampingan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan program subsidi pembiayaan perumahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini dilaksanakan melalui mekanisme pembiayaan campuran antara dana pemerintah (APBN) dan dana perbankan, serta dikelola secara operasional oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

FLPP memberikan kemudahan bagi MBR melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga tetap rendah sepanjang tenor, uang muka terjangkau, dan jangka waktu kredit yang panjang. Program ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan rumah layak dan pengurangan *backlog*

perumahan. Kementerian PKP, tentunya tidak bisa bekerja sendiri namun harus bersinergi dan membangun super team dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah. Dengan adanya dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Bank Tanah, SMF dan BP Tapera dalam mendorong capaian pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Secara umum, FLPP bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan rumah bagi MBR, menjaga keterjangkauan harga dan cicilan rumah subsidi, serta mendukung target pembangunan nasional di sektor perumahan. Skema FLPP bekerja melalui kolaborasi antara pemerintah dan bank penyalur, di mana pemerintah menyediakan porsi dana murah jangka panjang sehingga suku bunga KPR dapat ditetapkan tetap dan lebih rendah dibandingkan skema komersial. Harga rumah yang dibiayai mengikuti batasan harga rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. Dengan karakteristik tersebut, FLPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai stimulus sektor properti dan penggerak ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas pembangunan perumahan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian PKP, BP3KP Kalimantan II melakukan pendataan progres pelaksanaan program FLPP di wilayah kerjanya mencakup Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Capaian Program FLPP Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung akses kepemilikan rumah bagi MBR. Realisasi penyaluran KPR FLPP telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan penyalur, dan pengembang perumahan.

Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya minat masyarakat terhadap rumah subsidi, dukungan kebijakan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga rumah, serta percepatan proses administrasi dan verifikasi penerima manfaat. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, seperti ketersediaan lahan yang sesuai dengan ketentuan tata ruang, kesiapan infrastruktur dasar, serta pengawasan terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat agar tetap sesuai dengan kriteria MBR. Berikut adalah progres program FLPP per tahun 2025 di wilayah kerja BP3KP Kalimantan II.

Tabel 3.16 Hasil Pemantauan Program FLPP

No	Capaian	Jumlah
1	Proses Pembangunan	663 unit
2	Readu Stock	1.644 unit
3	Proses Bank	775 unit
4	Tersedia	46.845 unit
	Terjual	92.425 unit
Total		95.507 unit

Sumber: <https://sikumbang.tapera.go.id/>

D. Pendampingan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung Program 3 Juta Rumah dilaksanakan melalui kemitraan strategis dengan dunia usaha untuk menyediakan infrastruktur permukiman, bantuan material atau dukungan teknis bagi pembangunan rumah MBR, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Implementasi CSR berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan perumahan, pemenuhan fasos fasum, dan keberlanjutan dampak program. Meskipun kontribusi CSR tidak dihitung sebagai realisasi anggaran pemerintah, keberadaannya memperkuat pencapaian target program nasional melalui penambahan sumber daya non-anggaran.

Capaian kegiatan CSR pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung Program 3 Juta Rumah di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, serta pemangku kepentingan terkait, kegiatan CSR telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan CSR diwujudkan dalam bentuk penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), bantuan material pembangunan atau perbaikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta penguatan fasilitas pendukung lingkungan permukiman. Kontribusi tersebut memperkuat intervensi program pemerintah yang bersumber dari APBN, sehingga menciptakan efek pengungkit (*multiplier effect*) terhadap percepatan penyediaan hunian layak.

Pelaksanaan CSR di wilayah kerja Balai Kalimantan II juga mencerminkan meningkatnya komitmen kolaboratif antara sektor publik dan swasta dalam mendukung pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. Total pelaksanaan kegiatan CSR mencapai 145 unit dimana komitmen awal yang dibuat yaitu sebanyak 304 unit angka tersebut menunjukkan pencapaian sebesar 47,70%, dengan rincian total CSR perusahaan besar membuat komitmen sebanyak 237 unit dan terselesaikan 78 unit dan untuk total CSR lain-lain membuat komitmen sebanyak 80 unit dan terselesaikan seluruhnya. Pada capaian tersebut total pembangunan rumah baru terselesaikan sebanyak 65 unit yang awalnya dikomitmenkan sebanyak 224 unit, dan pelaksanaan renovasi rumah yang terselesaikan seluruhnya sebanyak 80 unit. Secara keseluruhan, capaian kegiatan CSR tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan perumahan, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Berikut adalah capaian pendampingan program bantuan CSR yang dilaksanakan oleh BP3KP Kalimantan II.

Tabel 3.17 Laporan Bantuan CSR Perusahaan

No	Kabupaten/ Kota	Nama CSR	Peningkatan Kualitas			Pembangunan Baru		
			Rencana	Proses	Realisasi	Rencana	Proses	Realisasi
1	Kota Balikpapan	Bedah Rumah dalam Rangka HUT REI ke 53	10 unit	-	10 unit	-	-	-
2	Kabupaten Berau	PT. Berau Coal	-	-	-	100 unit	38 unit	13 unit
3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	-	-	20 unit	-	20 unit
4	Kabupaten Tabalong	PT. Adaro Indonesia	-	-	-	100 unit	72 unit	28 unit
5	Kota Bontang	PT. Pupuk Kaltim	-	-	-	4 unit	-	4 unit
6	Kabupaten Tanah Laut	TNI AL Banjarmasin dan PT. SNI	3 Unit	-	3 Unit	-	-	-
JUMLAH			13 unit	-	13 unit	224 unit	110 unit	65 unit

Sumber: Laporan Satgas CSR BP3KP Kalimantan II

Tabel 3.18 Laporan Bantuan CSR Perusahaan Lain - Lain

No.	Kabupaten/Kota	Nama CSR	Peningkatan Kualitas			Pembangunan Baru		
			Rencana	Proses	Realisasi	Rencana	Proses	Realisasi
1	Kab. Barito Kuala	Baznas RI	3 Unit	-	3 Unit	-	-	-
2	Kab. Hulu Sungai Utara	Baznas RI	3 Unit	-	3 Unit	-	-	-
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	Baznas RI	3 Unit	-	3 Unit	-	-	-
4	Kab. Tabalong	Baznas RI	3 Unit	-	3 Unit	-	-	-
5	Kab. Tanah Laut	Baznas RI	3 Unit	-	3 Unit	-	-	-
6	Kab. Tapin	Baznas RI	3 Unit	-	3 Unit	-	-	-
7	Kab. Banjar	Baznas RI	12 Unit	-	12 Unit	-	-	-
8	Kota Banjarbaru	Baznas RI	3 Unit	-	3 Unit	-	-	-
9	Kota Banjarmasin	Baznas RI	8 Unit	-	8 Unit	-	-	-
10	Kab. Nunukan	Baznas RI	5 Unit	-	5 Unit	-	-	-
11	Kab. Bulungan	Baznas RI	10 Unit	-	10 Unit	-	-	-
12	Kab. Malinau	Baznas RI	4 Unit	-	4 Unit	-	-	-
13	Kota Tarakan	Baznas RI	7 Unit	-	7 Unit	-	-	-
JUMLAH			67 Unit	-	67 Unit	-	-	-

Sumber: Laporan Satgas CSR BP3KP Kalimantan II

3.4 Analisis Perbandingan Kinerja

3.4.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Target Renstra

Tabel 3.19 Matriks Kinerja dan Pendanaan BP3KP Kalimantan II Tahun 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9		-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan															
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:															
1 Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi															
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak															
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II															
OUTPUT KEGIATAN:															
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50.000	175.000	184.450	194.410	204.908	808.769
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	60.000	63.240	66.655	70.254	260.149
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	4	-	-	-	-	4	184.260	-	-	-	-	184.260
	4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	32.632	34.394	36.251	38.208	141.485
	5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	472.297	-	-	-	-	472.297
	6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	1.168.686	1.231.795	1.298.312	1.368.421	5.067.214
	7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	452.253	476.675	502.415	529.546	1.960.888
	8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	3	4	4	4	4	19	349.473	1.551.126	1.634.886	1.723.171	1.816.222	7.074.878
	9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	190.000	200.260	211.074	222.472	823.806
	10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	5	5	5	5	20	-	445.000	469.030	494.358	521.053	1.929.441

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR				SATUAN		TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
										2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1				-2				-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum																					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II																					
	OUTPUT KEGIATAN:																				
		1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum		Unit	277	915	915	915	915	3.937	19.667.000	4.059.971	13.945.401	14.586.569	15.441.460	77.051.526				
		2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal		Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU		Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	88.900	93.701	98.760	281.361				
		4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan		Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	2.899.352	3.055.917	3.220.937	3.394.867	12.571.073				
		5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan		Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	293.370	309.212	325.909	343.509	1.272.000				
		6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan		Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	105.000	110.670	116.646	122.945	455.261				
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni																					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni																					
	OUTPUT KEGIATAN:																				
		1	Jumlah unit rumah swadaya		Unit	572	9.173	9.173	9.173	9.173	37.264	19.448.000	222.055.398	233.131.795	244.208.193	255.284.590	974.127.975				
		2	Jumlah rumah khusus yang terbangun		Unit	-	1.793	1.793	1.793	1.793	7.172	-	772.204.486	795.332.378	833.119.663	870.906.948	3.271.563.476				
		3	Jumlah rumah susun yang terbangun		Unit	482	220	264	264	264	1.494	964.000.000	414.155.460	501.151.200	523.881.600	546.612.000	2.949.800.260				
		4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Laporan	-	1	1	1	1	4	-	88.500	93.279	98.316	103.625	383.720				
		5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh		Laporan	4	-	-	-	-	4	12.302	-	-	-	-	12.302				

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
		6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	482.511	508.567	536.029	564.975	2.092.082
		7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	246.000	259.284	273.285	288.043	1.066.612
		8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	1.920.000	2.023.680	2.132.959	2.248.138	8.324.777
		9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	3	-	-	-	-	3	2.335.810	-	-	-	-	2.335.810
		10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520.299
		11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	2.582.700	2.722.166	2.869.163	3.024.098	11.198.126
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan																
OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	85.000	89.590	94.428	99.527	368.545
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu															
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh																
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																
OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	15,00	40,00	20,00	20,00	95	-	31.575.000	-	-	-	31.575.000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Rp Ribu)						
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan															
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman																
	OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52.600	75.000	100.000	125.000	352.600
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel																
	OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	129.232	182.150	200.365	220.410	242.451	974.608
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
	OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	174.233	225.000	247.500	272.250	299.475	1.218.458
		2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	225.000	247.500	272.250	299.475	1.044.225
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman															
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II																

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II																
	OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	5	5	5	5	25	40.076.544	109.713.909	115.199.604	120.959.585	127.007.562	512.957.204
		2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	5	5	5	5	25	65.486	214.200	224.910	236.156	247.963	988.715
		3	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	5	5	5	5	25	94.377	999.248	1.049.211	1.101.670	1.156.754	4.401.260
		4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Kawasan Permukiman)	Layanan	-	5	5	5	5	20	-	464.000	489.056	515.465	543.300	2.011.821
		5	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Kawasan Permukiman)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	28.500	30.039	31.661	33.371	123.571
		6	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Kawasan Permukiman)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	27.000	28.458	29.995	31.614	117.067
		7	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	4	4	4	4	16	-	477.000	502.758	529.907	558.522	2.068.187
		8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	14.131	14.894	15.698	16.546	61.269
		9	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	5	5	5	5	20	-	125.000	131.750	138.865	146.363	541.978
		10	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	85.000	89.590	94.428	99.527	368.545
		11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	85.000	89.590	94.428	99.527	368.545
		12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	5	5	5	5	20	-	500.000	527.000	555.458	585.453	2.167.911

Sumber: Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Matriks Kinerja dan Pendanaan BP3KP Kalimantan II Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penurunan dari target yang ditetapkan oleh Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Subbab ini memuat analisis perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Capaian dihitung dari perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target yang ditetapkan tahun 2025 pada dokumen Rencana Strategis. Pendanaan pelaksanaan realisasi dilaksanakan melalui DIPA Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai tingkat keselarasan dan kontribusi capaian tahunan terhadap sasaran strategis jangka menengah, sekaligus mengidentifikasi deviasi yang terjadi sebagai dasar perumusan langkah tindak lanjut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai progres pencapaian target Renstra secara terukur dan berkelanjutan. Berikut adalah Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Rencana Strategis Tahun 2025.

Tabel 3.20 Perbandingan Target Rencana Strategis Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET RENSTRA	ANGGARAN (Rp Ribu)	REALISASI	ANGGARAN (Rp Ribu)	GAP Realisasi	Keterangan	
					2025		2025				
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan											
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:											
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi										
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak											
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II											
	OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman			Rekomendasi Kebijakan	1	50.000	1	46.770	0	Sesuai Target
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman			Dokumen	-	-	-	-	-	-
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja			Laporan	4	184.260	1	84.465	3	Realisasi Kurang Memenuhi Target Renstra

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA	ANGGARAN (Rp Ribu)	REALISASI	ANGGARAN (Rp Ribu)	GAP Realisasi	Keterangan
					2025		2025			
		4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	-	-	-	-	-
		5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	472.297	1	476.162	0	Sesuai Target
		6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-
		8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	3	349.473	3	316.373	0	Sesuai Target
		9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II										
	OUTPUT KEGIATAN:									
		1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	277	19.667.000	426	2.269.166	149	Realisasi Melebihi Target Renstra
		2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA	ANGGARAN (Rp Ribu)	REALISASI	ANGGARAN (Rp Ribu)	GAP Realisasi	Keterangan
					2025		2025			
		3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	-	-	-	-
		4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-
		5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-
		6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni										
	OUTPUT KEGIATAN:									
		1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	572	19.448.000	751	16.894.223	179	Realisasi Melebihi Target Renstra
		2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	-	-	-	-	-
		3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	482	964.000.000	1.200	1.609.298.751	718	Realisasi Melebihi Target Renstra
		4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	-	-	-	-	-
		5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	4	12.302	4	515.114	0	Sesuai Target
		6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA	ANGGARAN (Rp Ribu)	REALISASI	ANGGARAN (Rp Ribu)	GAP Realisasi	Keterangan
						2025		2025			
		7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-
		8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
		9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	3	2.335.810	3	279.410	0		Sesuai Target
		10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-
		11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan											
	OUTPUT KEGIATAN:										
		1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS											
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu										

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA	ANGGARAN (Rp Ribu)	REALISASI	ANGGARAN (Rp Ribu)	GAP Realisasi	Keterangan
						2025		2025			
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh											
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu											
OUTPUT KEGIATAN:											
		1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	-	0,1	1.053.600	0,1		Kegiatan terealisasi meskipun tidak tercantum dalam target Renstra
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS											
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan										
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman											
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman											
OUTPUT KEGIATAN:											
		1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET RENSTRA	ANGGARAN (Rp Ribu)	REALISASI	ANGGARAN (Rp Ribu)	GAP Realisasi	Keterangan
					2025		2025			
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel										
	OUTPUT KEGIATAN:									
		1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	129.232	1	116.233	0	Sesuai Target
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
	OUTPUT KEGIATAN:									
		1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	174.233	1	174.444	0	Sesuai Target
		2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman										
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman									
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II										
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II										
	OUTPUT KEGIATAN:									

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA	ANGGARAN (Rp Ribu)	REALISASI	ANGGARAN (Rp Ribu)	GAP Realisasi	Keterangan
					2025		2025			
		1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	40.076.544	5	4.547.565	0	Sesuai Target
		2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	65.486	-	-	-	Kegiatan Tidak Ditargetkan Walaupun Ditargetkan di Target Renstra
		3	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	5	94.377	-	-	-	Kegiatan Tidak Ditargetkan Walaupun Ditargetkan di Target Renstra
		4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Kawasan Permukiman)	Layanan	-	-	-	-	-	-
		5	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Kawasan Permukiman)	Layanan	-	-	-	-	-	-
		6	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Kawasan Permukiman)	Layanan	-	-	-	-	-	-
		7	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-
		8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-
		9	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-
		10	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-
		11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-
		12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Matriks Kinerja dan Pendanaan BP3KP Kalimantan II Tahun 2025, Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 BP3KP Kalimantan II

3.4.2 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja

Analisis perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis serta mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BP3KP Kalimantan II. Melalui perbandingan tersebut, dapat diidentifikasi tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Berikut adalah analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target yang tertuang pada perjanjian kinerja dengan lima unit organisasi Kementerian PKP meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1	Tingkat layanan dukungan manajemen	5 Layanan	5 Layanan	100%
			Satker Balai	1 Layanan	1 Layanan	100%
			Satker PKP Kaltim	1 Layanan	1 Layanan	100%
			Satker PKP Kalsel	1 Layanan	1 Layanan	100%
			Satker PKP Kaltara	1 Layanan	1 Layanan	100%
			Satker PKP IKN	1 Layanan	1 Layanan	100%
NO	SATUAN KERJA			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			Rp 1.470.197.000	Rp 1.451.518.992	98,73%
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan			Rp 647.904.000	Rp 634.647.000	97,95%
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur			Rp 591.394.000	Rp 589.170.806	99,62%
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara			Rp 788.090.000	Rp 750.116.000	95,18%
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara			Rp 1.124.712.000	Rp 1.122.112.000	99,77%
TOTAL				Rp 4.622.297.000	Rp 4.547.564.798	98,38%

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan data pada Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 BP3KP Kalimantan II

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman,	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan	1 Laporan	1 Laporan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni		Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja			
			Satker Balai	1 Laporan	1 Laporan	100%
		2	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%
			Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan	4 Laporan	100%
			Satker Balai	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Satker PKP Kaltim	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Satker PKP Kalsel	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Satker PKP Kaltara	1 Laporan	1 Laporan	100%
		2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	84 Unit	84 Unit	100%
			Satker PKP Kaltim	84 Unit	84 Unit	100%
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	426 Unit	426 Unit	100%
			Satker PKP Kalsel	426 Unit	426 Unit	100%
4	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	0,1 Hektar	0,1 Hektar	100%
			Satker PKP Kaltara	0,1 Hektar	0,1 Hektar	100%
NO	SATUAN KERJA			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			Rp 465.126.000	Rp 464.560.000	99,88%
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan			Rp 2.432.516.000	Rp 2.361.412.000	97,08%
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur			Rp 2.088.985.000	Rp 2.072.566.866	99,21%
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara			Rp 1.058.132.000	Rp 1.058.128.000	100,00%
TOTAL				Rp 6.044.759.000	Rp 5.956.666.866	98,54%

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan data pada Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 BP3KP Kalimantan II

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja dengan
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan	3 Laporan	100%
			Satker PKP Kaltim	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Satker PKP Kalsel	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Satker PKP Kaltara	1 Laporan	1 Laporan	100%
		2	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
			Satker Balai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan	3 Laporan	100%
			Satker Balai	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Satker PKP Kaltim	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Satker PKP Kalsel	1 Laporan	1 Laporan	100%
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	339 Unit	337 Unit	99,41%
			Satker PKP Kaltim	308 Unit	306 Unit	99,35%
			Satker PKP Kalsel	31 Unit	31 Unit	100%
NO	SATUAN KERJA			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			Rp 626.466.000	Rp 616.327.100	98,38%
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan			Rp 912.870.000	Rp 875.883.000	95,95%
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur			Rp 7.106.155.000	Rp 7.044.414.000	99,13%
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara			Rp 140.171.000	Rp 130.439.000	93,06%
TOTAL				Rp 8.785.662.000	Rp 8.667.063.100	98,65%

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan data pada Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 BP3KP Kalimantan II

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja dengan
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%
		Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan	5 Laporan	100%
		Satker Balai	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Satker PKP Kaltim	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Satker PKP Kalsel	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Satker PKP Kaltara	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Satker PKP IKN	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%
		Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%
		2 Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	1200 Unit	1200 Unit	100%
		Satker PKP IKN	1200 Unit	1200 Unit	100%
		3 Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	-	-	-
		Satker PKP Kaltim	-	-	-
		4 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	-	-	-
		Satker PKP Kalsel	-	-	-
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
			Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	328 Unit	328 Unit	100%
			Satker PKP Kaltim	263 Unit	263 Unit	100%
			Satker PKP Kalsel	65 Unit	65 Unit	100%
NO	SATUAN KERJA			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			Rp 1.291.222.000	Rp 1.254.783.649	97,18%
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan			Rp 7.438.518.000	Rp 7.373.935.000	99,13%
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur			Rp 31.661.076.000	Rp 31.623.379.924	99,88%
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara			Rp 515.069.000	Rp 507.783.000	98,59%
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara			Rp 1.610.871.614.000	Rp 1.609.928.569.242	99,94%
TOTAL				Rp1.651.777.499.000	Rp 1.650.688.450.815	99,93%

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan data pada Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 BP3KP Kalimantan II

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	1	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%
			Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%
		2	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%
			Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan	100%
NO	SATUAN KERJA			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			Rp 303.466.000	Rp 290.676.250	95,79%
TOTAL				Rp 303.466.000	Rp 290.676.250	95,79%

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan data pada Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 BP3KP Kalimantan II

Secara keseluruhan, realisasi kinerja menunjukkan tingkat pencapaian yang baik dan selaras dengan target Perjanjian Kinerja, serta menjadi landasan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya pada kegiatan yang tidak terlaksana 100%.

3.4.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Organisasi Sejenis yang Setara

Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja serta sebagai upaya peningkatan kinerja pada waktu mendatang, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II melakukan perbandingan kinerja dengan capaian organisasi sejenis yang setara indikator kegiatannya. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I menjadi referensi perbandingan dalam mengevaluasi capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II pada tahun 2025. Perbandingan tersebut dilakukan karena Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I berkontribusi terhadap pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 3.26 Perbandingan Kinerja BP3KP Kalimantan II dengan BP3KP Kalimantan I

No	DIPA Unit Organisasi	BP3KP Kalimantan II			BP3KP Kalimantan I		
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Keuangan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Keuangan
1	Sekretariat Jenderal	1,470,197,000	1,451,572,992	98.73%	1,073,888,000	945,223,300	88.02%
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	465,126,000	464,560,000	99.88%	535,508,000	341,717,900	63.81%
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	626,466,000	616,327,100	98.38%	498,538,000	324,809,200	65.15%
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1,291,222,000	1,263,783,649	97.88%	1,181,193,000	798,687,500	67.62%
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303,466,000	290,676,250	95.79%	303,466,000	270,625,200	89.18%

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 BP3KP Kalimantan I dan BP3KP Kalimantan II

Berdasarkan data tabel diatas, secara umum BP3KP Kalimantan II menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang lebih optimal dibandingkan BP3KP Kalimantan I. Hal ini tercermin dari tingkat capaian keuangan hampir seluruh unit organisasi di Kalimantan II yang berada di atas 95%, bahkan mendekati 100%.

BP3KP Kalimantan II, memiliki realisasi anggaran yang sangat tinggi. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman tercatat sebagai DIPA yang terserap sangat optimal mencapai 99,88%, diikuti DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (98,38%), DIPA Sekretariat Jenderal (98,73%), serta DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (97,88%). Capaian terendah tetap tergolong baik, yaitu DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola

dan Pengendalian Risiko dengan 95,79%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran relatif efektif dan merata di seluruh unit.

Sebaliknya, BP3KP Kalimantan I menunjukkan variasi capaian keuangan yang cukup signifikan antar DIPA masing-masing Unor. DIPA Sekretariat Jenderal dan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih tercatat sebagai capaian yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 88,02% dan 89,18%. Namun, tiga DIPA lainnya mencakup DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (63,81%), DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (65,15%), dan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (67,62%) menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah, sehingga berpotensi memerlukan perhatian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, perbandingan ini mengindikasikan bahwa BP3KP Kalimantan II lebih konsisten dan efektif dalam pelaksanaan anggaran, sementara BP3KP Kalimantan I masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi realisasi anggaran, khususnya pada unit-unit teknis perumahan dan kawasan permukiman. Analisa ini dapat menjadi dasar untuk evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme pengendalian anggaran di BP3KP Kalimantan I.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BP3KP Kalimantan II memiliki Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelaksanaan kerja, terutama di bidang Teknik. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BP3KP Kalimantan II dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Unit Organisasi	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pegawai	Rasio Penugasan/Orang
1	Kepala Balai	19	15	6,33
2	Kepala Subbag Tata Usaha	14	25	2,80
3	Kepala Seksi Wilayah I	12	6	10,00
4	Kepala Seksi Wilayah II	7	9	3,89
Total		52	55	23,02

Sumber: Hasil analisis, 2025

*Rumus Perhitungan Penugasan: $(5 / \text{jumlah pegawai}) \times \text{jumlah kegiatan}$
Dengan asumsi 1 kegiatan ideal dilaksanakan oleh 5 orang.*

Dilihat dari latar belakang Pendidikan dan Keahlian, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II yang saat ini melaksanakan kegiatan dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, dinilai sudah cukup efektif didukung dengan adanya penambahan sebanyak 53 CPNS di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan hasil pengawasan. Sehubungan hal tersebut diatas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II sebagai salah satu unit kerja yang membawahi Satuan Kerja Kalimantan Timur, Satuan Kerja Kalimantan Selatan, Satuan Kerja Kalimantan Utara dan Satuan Kerja IKN Nusantara memandang perlu optimalisasi untuk sebagai Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan secara optimal, yang lebih terencana, menyeluruh, sistematis, dan efektif.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemanfaatan laporan kinerja. Terdapat berbagai aspek yang menjadi penekanan, yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai terhadap laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan pengaruh budaya kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II ini dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek-aspek di atas.

3.6.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II memiliki beberapa kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap proses pemrograman dan penganggaran yang merupakan bentuk *output* Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka laporan Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan, kegiatan-kegiatannya dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.28 Analisis Kegiatan Laporan Kinerja BP3KP Kalimantan II

No	Kegiatan	Laporan
1	Manajemen Risiko	Pelaksanaan Manajemen Risiko di BP3KP merupakan kewajiban organisasi yang dilaksanakan sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan Pasal 5, BP3KP memiliki fungsi dalam pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta pengendalian anti korupsi dan penyuapan. Selanjutnya, Pasal 17 menegaskan peran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan

No	Kegiatan	Laporan
		Pengendalian Risiko dalam melakukan pembinaan kepada UPT, termasuk BP3KP, guna memastikan penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu, Pasal 19 mewajibkan pimpinan UPT untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai dasar terwujudnya akuntabilitas publik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Realisasi penerapan manajemen risiko di BP3KP menunjukkan efektivitas dalam menurunkan tingkat risiko pada sasaran strategis dan operasional melalui penguatan pengendalian dan mitigasi yang tepat sasaran. Risiko-risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja dapat dikendalikan secara lebih dini, sehingga dampak risiko terhadap pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terkendali. Pengendalian risiko dilaksanakan secara konsisten melalui pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian strategi pengendalian, yang berkontribusi pada peningkatan keandalan proses bisnis dan pencapaian kinerja organisasi. Selain berfungsi sebagai instrumen pengendalian, penerapan manajemen risiko juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan awareness pengendalian risiko di lingkungan BP3KP. Pimpinan dan pegawai semakin memahami peran manajemen risiko sebagai bagian dari pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sehingga prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan pengendalian risiko menjadi bagian dari budaya kerja.
2	Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan di bawah kepemimpinan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR), dengan Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas (KPTA) sebagai unit pengampu. Pelaksanaan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, yang mengarahkan reformasi birokrasi menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui penguatan tata kelola, integritas, dan kualitas pelayanan publik. Direktorat KPTA mengarahkan pembangunan Zona Integritas dengan mengacu pada enam area perubahan,

No	Kegiatan	Laporan
		yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keenam area perubahan tersebut menjadi kerangka utama dalam mendorong perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur, sekaligus sebagai instrumen untuk memastikan terjadinya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bagian dari upaya menuju predikat WBK/WBBM, Direktorat Jenderal TKPR melalui Direktorat KPTA secara konsisten melaksanakan kegiatan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan sekaligus menjadi bukti dukung dalam menilai efektivitas implementasi enam area perubahan, sehingga pembangunan Zona Integritas tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak nyata pada peningkatan kinerja, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.
3	Barang Milik Negara	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Kalimantan II dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara efektif dan tertib administrasi. BP3KP Kalimantan II memiliki petugas BMN di setiap satkernya guna mendukung pengelolaan BMN yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaan, kondisi, dan pemanfaatan aset negara dapat terkelola dengan baik. Dalam pengelolaannya kegiatan BMN BP3KP Kalimantan II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dengan fokus pada penyempurnaan pengaturan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara. Pengelolaan BMN mencakup seluruh siklus aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penatausahaan dan pengamanan. Melalui pengelolaan yang tertib dan berkelanjutan, BMN di Balai P3KP Kalimantan II dioptimalkan pemanfaatannya untuk menunjang kegiatan operasional Balai serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

No	Kegiatan	Laporan
4	Komunikasi Publik	Pelaksanaan Komunikasi Publik mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Balai P3KP menjadi bagian dari pelaksana komunikasi publik Kementerian PKP yang tersebar di wilayah kerja, sehingga berpotensi memperluas jangkauan informasi dan mempercepat respon dalam komunikasi. Balai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, serta sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai program dan kebijakan perumahan serta kawasan permukiman. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel untuk memperkuat citra positif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Balai. Kegiatan Komunikasi Publik di Balai berfokus pada publikasi penyebaran informasi program perumahan dan penanganan isu perumahan melalui berbagai kanal seperti situs web resmi (pkp.go.id/balai/balai-p3kp-kalimantan-ii), media sosial, hubungan dengan media serta layanan pengaduan konsumen terintegrasi seperti SP4N Lapor untuk transparansi dan edukasi, yang dikelola oleh Tim Komunikasi Publik. Pada Tahun Anggaran 2025 adapun capaian yang telah Balai P3KP Kalimantan II lakukan antara lain: 1). 149 postingan Instagram, 2). 78 postingan di Website, 3). 1 Aduan dan Tindaklanjut di Kanal SP4N Lapor, 3). 2 Video terposting di Youtube, 4). 7 Media Cetak, 82 Media Digital, dan 4 Tayangan TV Nasional yang telah di handling dan monitoring.
5	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Balai merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Melalui SAKIP, Balai menyusun perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan organisasi,

No	Kegiatan	Laporan
		melaksanakan kegiatan sesuai indikator kinerja yang ditetapkan, serta melakukan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian SAKIP pada Balai masih dalam proses dikarenakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Kementerian yang baru terbentuk pada tahun 2024 pada Kabinet Merah Putih. Pada Tahun Anggaran 2025 Balai melaksanakan kegiatan SAKIP mencakup Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Laporan Triwulan, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
6	Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU)	Sistem informasi terpadu yang merupakan perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian PKP atau biasa disebut dengan SIBARU bertujuan untuk mengelola tata kelola bantuan perumahan mulai dari tahap pengusulan, pemantauan pembangunan, hingga pemanfaatan (penghunian dan serah terima aset). Permohonan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus sesuai dengan amanat Pasal 2 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus dilakukan melalui sistem informasi bantuan perumahan pada laman resmi Kementerian PKP. Dalam hal permohonan usulan melalui SIBARU, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II melakukan pendataan usulan, melakukan verifikasi administrasi seperti pemeriksaan kelengkapan dokumen yang disampaikan melalui laman sibaru.pkp.go.id., dan melaksanakan koordinasi dengan pengusul bantuan perumahan baik dengan Pemerintah Daerah, Pelaku Pembangunan Perumahan, Perguruan Tinggi, Yayasan atau Lembaga Sosial/Kemanusiaan/Pendidikan.
7	Klinik PKP	Layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Unit Organisasi dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni an meberikan layanan informasi serta bantuan eknis untuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni.

No	Kegiatan	Laporan
		Pelaksanaan Teknis Layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II telah berjalan pada Tahun Anggaran 2025. Klinik PKP telah menjaring dan membantu masyarakat khususnya di wilayah kerja BP3KP Kalimantan II dalam hal sosialisasi dan menjawab pertanyaan teknis dengan metode konsultasi secara langsung terhadap masyarakat.
8	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan wujud dari pemerataan pembangunan lintas sektor, salah satunya berupa Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS). Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya perlu disertai dengan pendampingan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) yang diselenggarakan berbasis pada pemberdayaan masyarakat merupakan program yang pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya. Program ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya merupakan salah satu program kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Program 3 (Tiga) Juta Rumah sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II terus melaksanakan kegiatan yang menjadi program Kementerian PKP di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, secara gotong royong membangun rumah untuk rakyat dapat diwujudkan. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Tahun Anggaran 2025 di BP3KP

No	Kegiatan	Laporan
		Kalimantan II tersebar di Kota dan Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan. Total jumlah penerima bantuan 749 unit, yang tersebar 653 unit di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dan 96 unit di 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terselesaikan 100% pada akhir tahun 31 Desember 2025.
9	Monitoring IKN Nusantara	Menindaklanjuti pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diamanatkan untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan hunian di Ibu Kota Negara Nusantara, melalui Balai P3KP Kalimantan II. Pelaksanaan kegiatan monitoring bertujuan meningkatkan kinerja pelaksanaan Balai P3KP Kalimantan II serta tercapainya target kegiatan sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa monitoring, evaluasi dan koordinasi pada setiap paket pekerjaan pembangunan hunian di IKN.
10	Program 3 Juta Rumah	Dalam rangka mewujudkan Program 3 (Tiga) Juta Rumah sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan khususnya di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan dan terus berperan aktif membangun koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga gotong royong membangun rumah untuk rakyat dapat diwujudkan. Tujuan dilaksanakan kegiatan "Percepatan Pendataan Perumahan wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II yaitu sebagai sarana penyepakatan upaya kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder bidang perumahan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan dalam rangka mencapai target Program 3 Juta Rumah dan menyamakan persepsi bahwa program Tiga Juta Rumah merupakan sebuah ekosistem yang melibatkan berbagai sumber pendanaan, tidak hanya APBN/APBD, tetapi juga FLPP/KPR Bersubsidi, rumah nonsubsidi/komersial (developer), perumahan swadaya (bedah rumah/BSPS), dan CSR (Corporate Social Responsibility). Pendataan ini penting untuk memastikan program ini berjalan sinergis di lapangan oleh pemerintah Pusat, Balai, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun CSR.

No	Kegiatan	Laporan
11	Penanganan Kawasan Kumuh	Penanganan Kawasan Kumuh mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Penanganan Kawasan Kumuh merupakan upaya pemenuhan sasaran meningkatnya luasan permukiman yang ditangani secara terpadu sebagaimana tertuang dalam amanat RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, Balai melakukan upaya yang meliputi fasilitasi pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam penyusunan SK Kumuh, perhitungan baseline numerik kawasan kumuh maupun konsultasi terkait penyusunan dokumen RP2KPKPK, hal ini guna memastikan penyusunan yang selaras dengan kebijakan nasional, pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang tepat sasaran, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian, penanganan kawasan kumuh menjadi proses yang komprehensif. Adapun untuk memastikan ketersediaan dokumen perencanaan pada Pemerintah Daerah, Balai juga melaksanakan monitoring RP3KP dan RP2KPKPK. Melalui kegiatan ini, Balai tidak hanya melakukan monitoring ketersediaan RP3KP dan RP2KPKPK, namun juga memfasilitasi pendampingan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Pendampingan yang dilakukan diantaranya adalah terhadap penyusunan dokumen maupun review dokumen yang telah disusun. Adapun acuan pedoman yang digunakan dalam pendampingan atau konsultasi dokumen RP3KP adalah SE Dirjen Perumahan No. 06 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RP3KP, sedangkan pedoman yang digunakan dalam pendampingan atau konsultasi dokumen RP2KPKPK adalah SE Dirjen Cipta Karya No. 30 Tahun 2020 tentang RP2KPKPK. Melalui pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh serta monitoring RP3KP dan RP2KPKPK, Balai telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan output berupa dokumen dan data, tetapi juga memperkuat proses pendampingan, koordinasi, dan evaluasi bersama Pemerintah Daerah.

No	Kegiatan	Laporan
12	Peningkatan Sanitasi	Pada TA. 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Utara pada TA. 2025 mendapatkan alokasi bantuan peningkatan kualitas sanitasi rumah sebanyak 80 unit. Namun dikarenakan pagu anggaran yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan sebanyak 80 unit, maka berdasarkan surat Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor : CK0601-Dp/655 tanggal 13 November 2025 Hal Penyesuaian Target Output Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Tahun Anggaran 2025, semula target output sebanyak 80 unit yang tersebar di 3 Kelurahan, yaitu Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan Lingkas Ujung dan Kelurahan Mamburungan Timur, berubah menjadi 35 unit (0,1 hektar) yang tersebar di 2 Kelurahan, yaitu Kelurahan Lingkas Ujung (25 unit) dan Kelurahan Mamburungan Timur (10 unit). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan serta untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun progres akhir pelaksanaan kegiatan sampai dengan minggu ke-10 adalah sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini sendiri dilaksanakan secara swakelola tipe 1, dimulai dari minggu ke-1 (21-27 Oktober 2025) sampai dengan minggu ke-10 (24-31 Desember 2025).
13	Kegiatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk pemberian subsidi perolehan rumah, penyediaan tanah, dan/atau prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Bantuan Pembangunan PSU adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdiri dari bantuan pembangunan PSU perumahan tapak, PSU rumah susun, dan PSU kawasan permukiman. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Pembangunan PSU diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan

No	Kegiatan	Laporan
		Pengendalian Risiko Nomor 02/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman. Bantuan Pembangunan PSU di wilayah kerja BP3KP Kalimantan II Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan di 4 lokasi perumahan dengan total 426 unit bantuan. Adapun keempat lokasi bantuan tersebut berada di Perumahan Lyandra Jaya, Kabupaten Barito Kuala; Perumahan D'Sunny Cluster, Kota Banjarmasin; Perumahan Hanum Imperial 2, Kabupaten Banjar; Perumahan Permata Regency, Kota Banjarmasin. Seluruh paket pekerjaan PSU tersebut telah 100% diselesaikan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>) pada bulan Desember 2025

Sumber: Hasil analisis, 2025

3.6.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Sistem informasi eOffice dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya pada Pusat Data dan Informasi. Sistem Informasi ini membantu dalam tata persuratan secara elektronik, sehingga koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di Inspektorat Jenderal menjadi lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2025 eOffice sudah efektif digunakan di seluruh unit kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (<https://eoffice.pkp.go.id>)



Gambar 3.8 Halaman Awal e-Office Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

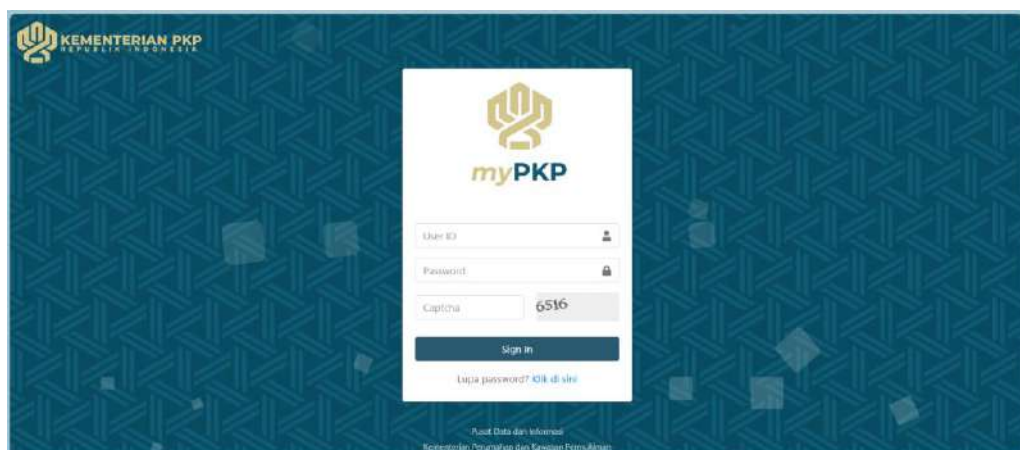
3.6.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II telah memanfaatkan data dan informasi

dari Sistem Informasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang keseluruhannya terangkum dalam website Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (<https://pkp.go.id>), yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Secara spesifik sistem informasi yang digunakan yaitu:

a. myPKP

myPKP merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data progres pelaksanaan kegiatan yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sistem informasi ini berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh seluruh unit organisasi, unit kerja, maupun satuan kerja yang ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di seluruh Indonesia. Data dari sistem ini digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada Pimpinan Unit Kerja maupun dari Pimpinan Unit Kerja kepada Unit Organisasi maupun dari Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. myPKP dapat diakses pada alamat <https://my.pkp.go.id>, serta telah tersedia dalam versi android maupun iOS sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.



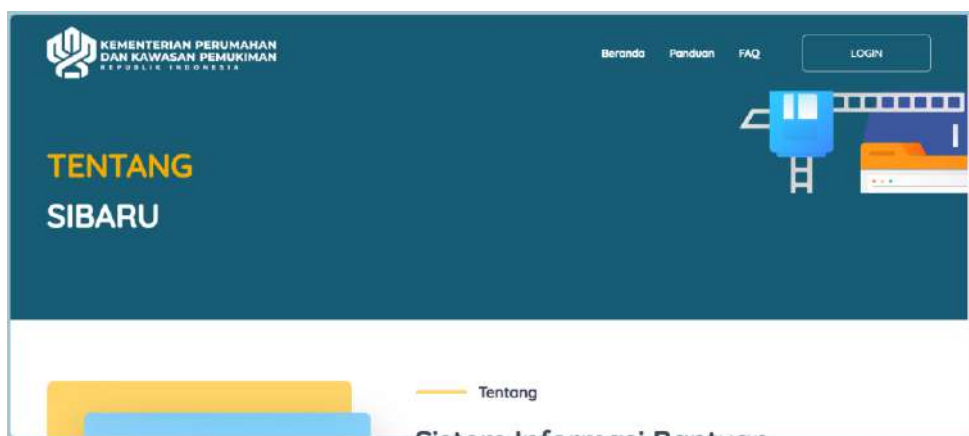
Gambar 3.9 Halaman Awal myPKP Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

b. SIBARU

Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) adalah perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirancang untuk menyediakan sistem informasi tata

kelola bantuan perumahan yang terpadu dan mendukung proses bisnis pengelolaan bantuan perumahan mulai dari tahap pengusulan bantuan, monitoring pelaksanaan pembangunan dan sebaran lokasinya, hingga akhirnya bantuan perumahan tersebut dihuni dan/atau diserahterimakan ke calon penerima manfaat.

Dalam prakteknya, secara sistem SIBARU bersinergi dengan berbagai sistem aplikasi lain baik di internal maupun di luar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan interoperabilitas data dilakukan oleh sistem *backend* yang saling terintegrasi. Prinsip dasarnya adalah memberikan kemudahan bagi pengguna dalam layanan satu pintu, sehingga SIBARU dapat difungsikan sebagai satu-satunya portal pintu masuk yang dapat diakses oleh calon pengusul dalam menyampaikan usulan bantuan perumahan. SIBARU dapat diakses pada alamat <https://sibaru.pkp.go.id>.



Gambar 3.10 Halaman Awal SIBARU Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

c. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/ Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI dapat diakses pada alamat <https://sakti.kemenkeu.go.id/>.

d. Aplikasi SIMAN V2

The image shows the SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) login page. The background is a large, modern bridge with a red arch. The SIMAN logo, a green and white circle, is on the left. To its right is the text "SIMAN" in large, bold, dark blue letters, followed by "Sistem Informasi Manajemen Aset Negara" in smaller, dark blue letters. Below this is a dark blue rounded rectangle with the word "Login" in white. Underneath the "Login" button is the text "Selengkapnya" in dark blue. At the top right, there are three links: "Pelatihan", "Panduan", and "Informasi Lainnya". At the bottom left is the logo of the "KEMENTERIAN KEUANGAN" (Ministry of Finance) and the text "DIREKTORAT JENDRAL EKSPANSI NEGARA". At the bottom right, there are two circular logos: a red one with a white "S" and a yellow one with the number "134".

3.6.4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa secara elektronik (eProcurement) melalui

<https://spse.inaproc.id/>. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Pasal 108 mengatur bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).



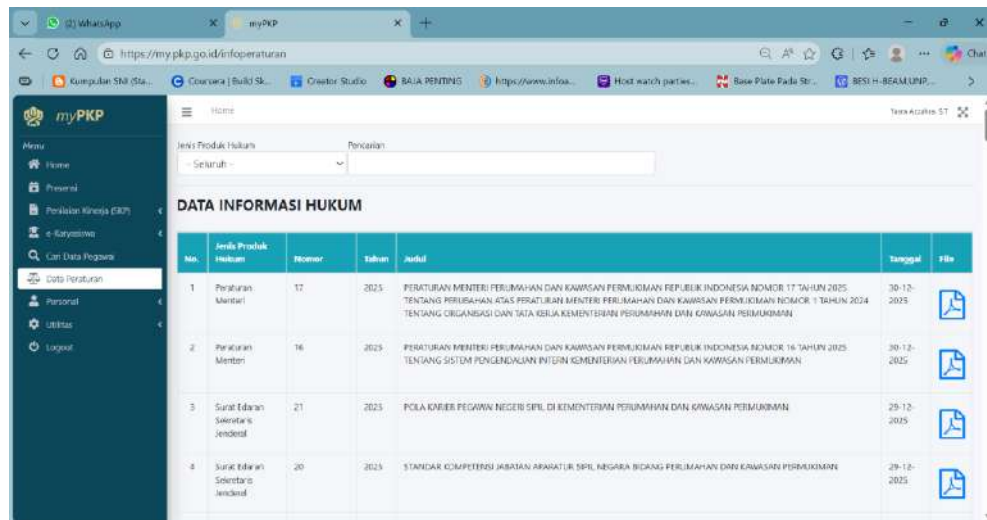
Gambar 3.13 Halaman Awal INAPROC SPSE LKPP

b. JDIH

JDIH adalah singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ini adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. JDIH bertujuan untuk menyediakan informasi peraturan perundang-undangan yang dapat diakses oleh masyarakat dan aparat pemerintah, serta melayani kebutuhan informasi hukum secara lengkap, akurat, dan cepat. Selain pada JDIH (<https://jdih.go.id>), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mempunyai menu Data Peraturan pada website <https://my.pkp.go.id/infooperaturan>.



Gambar 3.14 Halaman Awal JDIH



No.	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Judul	Tanggal	File
1	Peraturan Menteri	17	2023	PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30-12-2023	
2	Peraturan Menteri	16	2023	PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN MUTU DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30-12-2023	
3	Surat Edaran Sekretaris Jenderal	21	2023	POLA KARRIER PEGAWAI NEGARI SIPIL DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29-12-2023	
4	Surat Edaran Sekretaris Jenderal	20	2023	STANDAR KOMPETENSI JABATAN AMBATUR SIPIL NEGARA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29-12-2023	

Gambar 3.15 Halaman Data Peraturan myPKP

3.7 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

3.7.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian ini dapat dilihat sebagai perwujudan sinergi dan komitmen yang nyata dari seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah daerah, serta mengembangkan teknik komunikasi yang baik dan efektif dalam memberikan penjelasan terkait pentingnya proses serah terima aset bagi pemerintah daerah;
- Menyusus program atau rapat rutin dengan pihak pemerintah daerah khususnya dengan pejabat penting di daerah dalam hal ini Kepala daerah atau Sekretaris daerah terkait rencana dan program pengembangan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Melaksanakan rapat konsolidasi internal dalam rangka evaluasi dan pembahasan progres seluruh kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II;
- Melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pengadaan pelatihan ataupun bimbingan teknis di tingkat internal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II atau melalui pelatihan eksternal yang ada di luar Balai P3KP Kalimantan II (Diklat/Kurusu/Pelatihan);
- Menyusun *Master Schedule* pelaksanaan seluruh kegiatan BP3KP Kalimantan II dengan penetapan *Person in Charge* (PIC) pada setiap kegiatan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pemerataan beban kerja, serta akuntabilitas kinerja.

3.7.2 Faktor Penyebab Kegagalan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2025, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan struktur organisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebabkan adanya perubahan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Balai dan Satuan Kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan menyebabkan tertundanya penyerapan anggaran di awal tahun dan baru berjalan efektif pada akhir tahun;
- b. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan *Master Schedule* yang telah ditetapkan, terutama pada aspek pengendalian waktu dan koordinasi internal;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal sehingga berdampak pada keterlambatan sebagian tahapan kegiatan;
- d. Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya diantisipasi dalam perencanaan awal;
- e. Tertundanya pekerjaan fisik yang baru dimulai pada akhir tahun sehingga berdampak pada kurang optimalnya perencanaan dan kualitas pelaksanaan.

BAB 4

PENUTUP



Simpulan Umum
Rekomendasi dan Tindak Lanjut

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun 2025 ini merupakan wujud tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Laporan ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran pada TA 2025 yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada Laporan Kinerja ini disampaikan pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Laporan Hasil Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Metode pengukuran berdasarkan PK Awal Tahun 2025 yang ditetapkan setelah terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Balai dan Satuan Kerja, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pada akhir tahun anggaran (per 31 Desember 2025) sesuai dengan total nilai pagu revisi terakhir Rp1.671.533.683.000,- telah terealisasi sebesar Rp1.670.007.366.000,- dengan tingkat capaian fisik sebesar 100% dan penyerapan keuangan sebesar 99,91%;

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran BP3KP Kalimantan II

Satuan Kerja	Pagu (Rp Ribu)	Keuangan		Realisasi Fisik (%)
		Realisasi (Rp)	(%)	
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II				
- DIPA Sekretariat Jenderal	1.470.197	1.451.573	98,73	100
- DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	465.126	464.560	99,88	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	626.466	616.327	98,38	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.291.222	1.263.784	97,88	100
- DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466	290.676	95,79	100
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur				
- DIPA Sekretariat Jenderal	591.394	589.171	99,62	99,68
- DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	2.088.985	2.072.567	99,21	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	7.106.155	7.084.414	99,69	99,13
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	31.661.076	31.623.380	99,88	99,95

Satuan Kerja	Pagu (Rp Ribu)	Keuangan		Realisasi Fisik (%)
		Realisasi (Rp)	(%)	
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan				
- DIPA Sekretariat Jenderal	647.904	634.647	97,95	100
- DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	2.432.516	2.361.412	97,08	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	912.870	875.883	95,95	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	7.438.518	7.373.935	99,13	100
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara				
- DIPA Sekretariat Jenderal	788.090	750.116	95,18	100
- DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1.058.132	1.058.129	100	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	140.171	130.439	93,06	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	515.069	507.783	98,59	100
Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara				
- DIPA Sekretariat Jenderal	1.124.712	1.122.112	99,77	100
- DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.610.871.614	1.609.806.457	99,93	99,77
TOTAL	1.671.533.683	1.670.007.366	99,91	99,97

Sumber: Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 BP3KP Kalimantan II

- b. Terlaksananya peningkatan kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersebar di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Timur, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Utara, dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara, meliputi jumlah layanan dukungan manajemen yang mencakup seluruh satuan kerja sebanyak 5 layanan (100%);
- c. Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, dan terjangkau, dan berkelanjutan, adapun detail dari capaian BP3KP Kalimantan II yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan II

No	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
Program Dukungan Manajemen										
Sekretariat Jenderal										
1	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			4.622.297	4.547.565	100%	98,38%	100%	100%	100%
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan	4.622.297	4.547.565	100%	98,38%	100%	100%	100%
3	Layanan Perkantoran	5	Layanan	4.622.297	4.547.565	100%	98,38%	100%	100%	100%

No	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman										
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
1	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			6.044.759	5.956.666	100%	98,54%	100%	100%	100%
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	607.215	599.580	100%	98,74%	100%	100%	100%
3	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1	Laporan	84.826	84.465	100%	99,57%	100%	100%	100%
4	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4	Laporan	522.389	515.114	100%	98,61%	100%	100%	100%
5	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian) [PN]		Rekomendasi Kebijakan / Laporan	46.850	46.770	100%	99,83%	100%	100%	100%
6	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	46.850	46.770	100%	99,83%	100%	100%	100%
7	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	84	Unit	1.996.821	1.987.551	100%	99,54%	100%	100%	100%
8	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	426	Unit	2.340.270	2.269.166	100%	96,96%	100%	100%	100%
9	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	0,1	Hektar	1.053.603	1.053.600	100%	100%	100%	100%	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
1	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			1.651.777.499	1.650.566.338	100%	99,93%	100%	100%	100%
2	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)		Rekomendasi Kebijakan / Laporan	942.323	929.372	100%	98,63%	100%	100%	100%
3	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	408.618	408.395	100%	99,95%	100%	100%	100%
4	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	221.235	213.033	100%	96,29%	100%	100%	100%
5	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	312.470	307.944	100%	98,55%	100%	100%	100%
6	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	2.589.637	2.558.089	100%	98,78%	100%	100%	100%
7	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5	Laporan	2.589.637	2.558.089	100%	98,78%	100%	100%	100%
8	Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	1200	Unit	1.610.363.751	1.609.298.751	100%	99,93%	100%	99,97%	100%
9	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	328	Unit	7.361.672	7.301.416	100%	99,18%	100%	100%	100%

No	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
						RN	RL	RN	RL	Kinerja
10	Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	65	Unit	25.231.606	25.210.952	100%	99,92%	100%	100%	100%
11	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1	Unit	5.288.510	5.267.757	100%	99,10%	100%	100%	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										
1	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			8.785.662	8.677.202	100%	98,77%	100%	99,80%	100%
2	Koordinasi (kegiatan)		Kegiatan	476.162	476.162	100%	100%	100%	100%	100%
3	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Kegiatan	476.162	476.162	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)		Laporan	626.811	595.783	100%	95,05%	100%	100%	100%
5	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3	Laporan	347.009	316.373	100%	91,17%	100%	100%	100%
6	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3	Laporan	279.802	279.410	100%	99,86%	100%	100%	100%
7	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	339	Unit	7.682.689	7.605.257	100%	98,99%	100%	99,41%	100%
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko										
1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			303.466	290.676	100%	95,79%	100%	100%	100%
2	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)		Rekomendasi Kebijakan / Laporan	303.466	290.676	100%	95,79%	100%	100%	100%
3	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	121.410	116.233	100%	95,74%	100%	100%	100%
4	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	182.056	174.444	100%	95,82%	100%	100%	100%
Total				1.671.533.683	1.670.038.447	100%	99,91%	100%	99,97%	100%

Sumber: Laporan Akhir Progres Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 BP3KP Kalimantan II

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II;
- Melaksanakan kegiatan rapat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi yang ada antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kalimantan II dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada, dengan waktu pelaksanaan satu kali dalam kurun waktu dua minggu atau pada pelaksanaan apel pagi dengan mengembangkan konsep pelaksanaan apel pagi.

- c. Mempercepat proses penyesuaian pejabat KPA/PPK/Pejabat Perbendaharaan melalui koordinasi intensif dengan unit pembina.
- d. Memperkuat fungsi Master Schedule sebagai alat pengendalian utama pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemutakhiran *Master Schedule* secara berkala dan menetapkan kewajiban pelaporan progres kegiatan oleh masing-masing PIC.
- e. Menetapkan jadwal monitoring rutin dan mekanisme pelaporan progres kegiatan sebagai dasar pengambilan keputusan dan percepatan tindak korektif.
- f. Menyusun perencanaan kegiatan yang lebih adaptif disertai buffer waktu dan skenario penyesuaian jadwal pada tahap awal perencanaan.

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja
Bukti Dukung Capaian Kinerja
Penghargaan
Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja
Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 1. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Penetapan PK Awal TA 2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KALIMANTAN II

Jalan Candana No. 167 Kompleks PDAM, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75127 e-Mail: bp3kp.kalimantan2@pkp.go.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PK) AWAL TA 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Anggoro Putro, S.T., M.Sc.**
NIP : 198309052008121001
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Unit Kerja : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
2. Nama : **Rudi Yunanto, S.T., M.T.**
NIP : 196704221996031004
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
Unit Kerja : Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
3. Nama : **Mohamad Radjiman Ododay, S.T., M.T.**
NIP : 197408212005011010
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
Unit Kerja : Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
4. Nama : **Juan Nugraha, S.T., M.T.**
NIP : 197212062007011013
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
Unit Kerja : Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
5. Nama : **Ditto Ferakhim, S.T., M.T.**
NIP : 198502272008021003
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara
Unit Kerja : Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

Dengan ini menyatakan telah bersepakat bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal TA 2025 setelah terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Balai dan Satuan Kerja Nomor 113/KPTS/Sj/2025; 80/KPTS/Dp/2025; 67/KPTS/Dd/2025; 06/KPTS/Dk/2025; 24/KPTS/Dk/2025; Tanggal 19 Mei 2025 (terlampir);
2. Poin 1 ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Kesepakatan Unit Eselon I Kementerian PKP pada Kegiatan Pembinaan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) TA 2025 Wilayah Barat (Bandung, 5-7 November 2025);

3. Berkomitmen untuk saling berkoordinasi, bekerja sama, dan menjaga komunikasi yang efektif guna mendukung kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini;
4. Bersepakat untuk melaksanakan kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur atau diperlukan penyesuaian, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

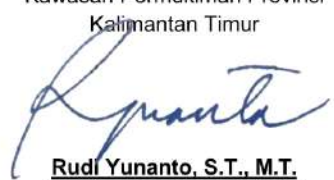
Demikian Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 November 2025

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kalimantan II


Dr. Anggoro Putro, S.T., M.Sc.
NIP. 198309052008121001

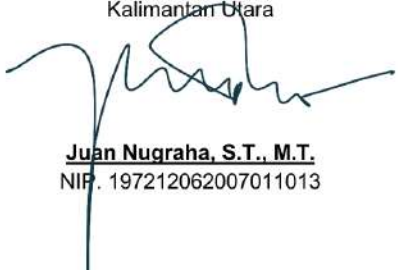
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Timur


Rudi Yunanto, S.T., M.T.
NIP. 196704221996031004

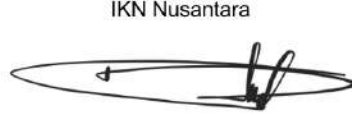
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Selatan


Mohamad Radjiman Ododay, S.T., M.T.
NIP. 197408212005011010

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Kalimantan Utara


Juan Nugraha, S.T., M.T.
NIP. 197212062007011013

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman
IKN Nusantara


Ditto Ferakhim, S.T., M.T.
NIP. 198502272008021003

LAMPIRAN

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dengan Unit Eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025

Lampiran 2.1 PK Awal BP3KP Kalimantan II dengan Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

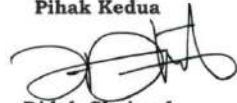
Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Didyk Choiroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Jakarta, 1 Juli 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	5 Layanan

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
- 5 Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

PAGU APBN

Rp	1.254.564.000
Rp	554.464.000
Rp	453.314.000
Rp	712.250.000
Rp	987.672.000
Rp	3.962.264.000

Jakarta, 1 Juli 2025

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KALIMANTAN II**

ANGGORO PUTRO

Lampiran 2.2 PK Awal BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Jakarta, 30 Agustus 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	85 Unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1 Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	230 Unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

PAGU APBN

Rp	465.126.000
Rp	2.427.246.000
Rp	2.125.845.000
Rp	4.529.000
Rp	5.022.746.000

Jakarta, 30 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN


FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

Lampiran 2.3 PK Awal BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

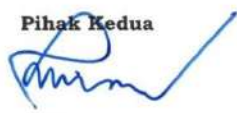
Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2 Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

PAGU APBN

Rp	476.162.000
Rp	87.725.000
Rp	119.113.000
Rp	140.171.000
Rp	823.171.000

Jakarta, 1 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II



ANGGORO PUTRO

Lampiran 2.4 PK Awal BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 19710707 199703 2 004

Jakarta, 30 Agustus 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	1200 Unit
		3 Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	-
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	334 Unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
- Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

PAGU APEN

Rp	320.211.000
Rp	2.150.008.000
Rp	36.989.985.000
Rp	535.069.000
Rp	1.610.871.614.000
Rp	1.650.866.887.000,00

Jakarta, 30 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

Lampiran 2.5 PK Awal BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 198309052008121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

- 1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 303.466.000,00

Jakarta, 24 Juni 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**


AZIS ANDRIANSYAH

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KALIMANTAN II**


ANGGORO PUTRO

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dengan Unit Eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025

Lampiran 3.1 PK Revisi BP3KP Kalimantan II dengan Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Didyk Choiroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Jakarta, 17 November 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

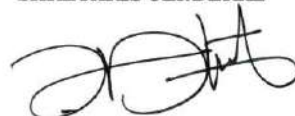
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	5 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp 1.368.517.000
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 554.464.000
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp 453.314.000
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp 788.090.000
5 Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp 1.124.712.000
	Rp 4.289.097.000

Jakarta, 17 November 2025

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

Lampiran 3.2 PK Revisi BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 30 Oktober 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2 Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	339 Unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

PAGU APBN

Rp	626.466.000
Rp	895.036.000
Rp	7.106.155.000
Rp	140.171.000
Rp	8.767.828.000

Jakarta, 30 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

Lampiran 3.3 PK Revisi BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 19710707 199703 2 004

Jakarta, 21 Oktober 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	1200 Unit
		3 Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	-
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	329 Unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
- Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

PAGU APBN

Rp	1.291.222.000
Rp	2.150.008.000
Rp	31.661.076.000
Rp	535.069.000
Rp	1.610.871.614.000
Rp	1.646.508.989.000,00

Jakarta, 21 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Akhir BP3KP Kalimantan II dengan Unit Eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025

Lampiran 4.1 PK Akhir BP3KP Kalimantan II dengan Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Didyk Choiroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Jakarta, 30 Desember 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	5 Layanan

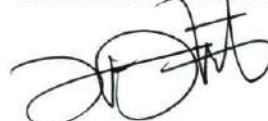
KEGIATAN

PAGU APBN

1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	1.470.197.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	647.904.000
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	591.394.000
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	788.090.000
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp	1.124.712.000
		Rp	4.622.297.000

Jakarta, 30 Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

Lampiran 4.2 PK Akhir BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Jakarta, 30 Desember 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Perangaran Kumuh	4 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	84 Unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyediaan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1 Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	426 Unit
4	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	0,1 Hektar

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

PAGU APBN

Rp	455.125.000
Rp	2.432.516.000
Rp	2.088.985.000
Rp	1.058.132.000
Rp	6.044.759.000

Jakarta, 30 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN


FITRIANI NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II


ANGGORO PUTRO

Lampiran 4.3 PK Akhir BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 30 Desember 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	339 Unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

PAGU APBN

Rp	626.466.000
Rp	912.870.000
Rp	7.106.155.000
Rp	140.171.000
Rp	8.785.662.000

Jakarta, 30 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

Lampiran 4.4 PK Akhir BP3KP Kalimantan II dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 197107011997032004

Jakarta, 30 Desember 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 198309052008121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	1200 Unit
		3 Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	-
		4 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	-
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	329 Unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
- Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

PAGU APBN

Rp	1.291.222.000
Rp	7.438.518.000
Rp	31.661.076.000
Rp	515.069.000
Rp	1.610.871.614.000
Rp	1.651.777.499.000,00

Jakarta, 30 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

Lampiran 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal TA 2025

Lampiran 5.1 DIPA Awal Sekretariat Jenderal TA 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691412/2025


053898 2182-0570-7142

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Sakker	: (691412)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp. 151.826.000	(SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	151.826.000
146.01.WA	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	151.826.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	151.826.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	151.826.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang teruang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUHAASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8896-2182-0570-7142

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691412) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			151.826.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			151.826.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen,	151.826.000
Rincian Output	:	01	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Rekomendasi, Unit Layanan	151.826.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
I B. SUMBER DANA



DS:8896-2182-0570-7142

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691412) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I B. 1

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	151.826.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	151.826.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8896-2182-0570-7142

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (691412) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691412	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	-	151.826	-	-	-	151.826		
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	151.826	-	-	-	151.826		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	151.826	-	-	-	151.826		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	151.826	-	-	-	151.826	16. 51	
01	RM	-	151.826	-	-	-	151.826	046	
JUMLAH		-	151.826	-	-	-	151.826		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691412) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	691412	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	9.296	9.296	15.000	20.000	20.000	20.000	25.000	33.234	151.826
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	9.296	9.296	15.000	20.000	20.000	20.000	25.000	33.234	151.826
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	9.296	9.296	15.000	20.000	20.000	20.000	25.000	33.234	151.826
	146.01.WA.7665	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	9.296	9.296	15.000	20.000	20.000	20.000	25.000	33.234	151.826

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
IV A. B L O K I R



DS:8896-2182-0570-7142

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691412] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
IV B. C A T A T A N



DS:8896-2182-0570-7142

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691412] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

Lampiran 5.2 DIPA Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691466/2025



DS:3618-1646-6339-4436

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode>Nama Satker	: (891466)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp.	50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang	50.000.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.		50.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	50.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	50.000.000
-------------------	-----------	------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3615-1646-6339-4436

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			50.000.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			50.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)			
	:	2. 02	Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)			
	:	3. 03	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Klasifikasi Rincian Output	1 :	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	50.000.000
Rincian Output	:	01 PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	50.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025
I B. SUMBER DANA



DS:3615-1646-6339-4436

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	50.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	50.000.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp.
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3615-1646-6339-4436

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691466	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	-	50.000	-	-	-	50.000	16. 51	
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	50.000	-	-	-	50.000		
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	50.000	-	-	-	50.000		
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	50.000	-	-	-	50.000		
01	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	046	
JUMLAH		-	50.000	-	-	-	50.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttl.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	691466	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	15.000	50.000
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	15.000	50.000
		146.03.1A.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	15.000	50.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	15.000	50.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025
IV A. B L O K I R



Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691466] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025
IV B. C A T A T A N



Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691466] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

Lampiran 5.3 DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691520/2025



05/6307-7289-3045-9208

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (891520)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp.	152.324.000 (SERATUS LIMA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	152.324.000
146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	152.324.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	152.324.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	152.324.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS.8307-7289-3045-9208

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			152.324.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			152.324.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan			
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan			
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan			
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan			
		5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7660.AEA Koordinasi	1,00	kegiatan	152.324.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	kegiatan	152.324.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
I B. SUMBER DANA



DS.8307-7289-3045-9208

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	152.324.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	152.324.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS.8307-7289-3045-9208

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691520	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	-	152.324	-	-	-	152.324	16. 51	
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	152.324	-	-	-	152.324		
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	-	152.324	-	-	-	152.324		
7660.AEA	Koordinasi (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	152.324	-	-	-	152.324	046	
01	RM	-	152.324	-	-	-	152.324		
JUMLAH		-	152.324	-	-	-	152.324		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	691520	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	10.000	17.153	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	25.270	152.324
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	10.000	17.153	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	25.270	152.324
	146.04.1A.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	0	0	0	0	10.000	17.153	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	25.270	152.324
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	10.000	17.153	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	25.270	152.324

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
IV A. B L O K I R



Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691520] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
IV B. C A T A T A N



Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691520] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

Lampiran 5.4 DIPA Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691574/2025



DS.0368-6108-9061-8873

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode>Nama Satker	: (691574)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp.	140.000.000 (SERATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	140.000.000
146.05.IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	140.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	140.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	140.000.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Kelentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8366-6109-9061-6673

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			140.000.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			140.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan			
		2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan			
		3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan			
		4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan			
		5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)			
Klasifikasi Rincian Output	1	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan	120.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000
		02	ABF.002 Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000
		03	ABF.003 Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000
		04	ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	30.000.000
		05	ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	30.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	20.000.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan	20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2025
I B. SUMBER DANA



DS.8366-6109-9061-6673

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	140.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	140.000.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8366-6109-9061-6673

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691574	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	-	140.000	-	-	-	140.000		
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	140.000	-	-	-	140.000		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	140.000	-	-	-	140.000		
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	120.000	-	-	-	120.000	16.51	
01 RM		-	120.000	-	-	-	120.000	046	
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	20.000	-	-	-	20.000	16.51	
01 RM		-	20.000	-	-	-	20.000	046	
JUMLAH		-	140.000	-	-	-	140.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8368-6109-9061-8873

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	691574	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	4.118	14.060	6.289	9.000	10.671	19.048	28.863	47.951	140.000
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	4.118	14.060	6.289	9.000	10.671	19.048	28.863	47.951	140.000
	146.05.1A.7651	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	4.118	14.060	6.289	9.000	10.671	19.048	28.863	47.951	140.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	4.118	14.060	6.289	9.000	10.671	19.048	28.863	47.951	140.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2025
IV A. B L O K I R**



Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691574] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2025
IV B. C A T A T A N



Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691574] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

Lampiran 5.5 DIPA Awal Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691607/2025



05.0080-2774-2384-0852

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode>Nama Satker	: (891607)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp.	45.000.000 (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.06.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang	45.000.000
146.06.1A.7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.		45.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	45.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	45.000.000
-------------------	-----------	------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0080-2774-2394-0652

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691607) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			45.000.000
Kegiatan	:	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			45.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan skema pembiayaan alternatif yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau			
		2. 02	Tersusunnya NSPK yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau			
		3. 03	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi standar keandalan bangunan (Kab/Kota)			
		4. 04	Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan infrastruktur perumahan yang siap dikerjasamakan (%)			
Klasifikasi Rincian Output	1	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan	45.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1,00	Rekomendasi Kebijakan	45.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025
I B. SUMBER DANA



DS:0080-2774-2394-0652

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691607) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	45.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	45.000.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0080-2774-2394-0652

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691607) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691607	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	-	45.000	-	-	-	45.000		
146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	45.000	-	-	-	45.000		
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	45.000	-	-	-	45.000		
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	45.000	-	-	-	45.000	16.51	
01	RM	-	45.000	-	-	-	45.000	046	
JUMLAH		-	45.000	-	-	-	45.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691607) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	691607	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	10.000	28.000	45.000
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	10.000	28.000	45.000
		146.06.1A.7652 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	10.000	28.000	45.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	10.000	28.000	45.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025
IV A. B L O K I R



Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691607] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0080-2774-2394-0652

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691607] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

Lampiran 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Akhir TA 2025

Lampiran 6.1 DIPA Akhir Sekretariat Jenderal TA 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691412/2025



05:5122-5163-0327-8811

Revisi ke 08

Tanggal : 26 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Salur	: (691412)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp. 1.470.197.000	(SATU MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	Jumlah Uang
146.01.WA	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	1.470.197.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.470.197.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	1.470.197.000
-------------------	-----------	---------------

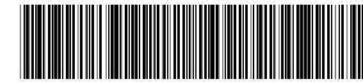
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salur dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5122-5163-0327-8811

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691412) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

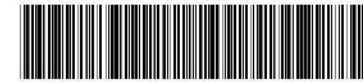
Halaman : I A. 1

Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			1.470.197.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			1.470.197.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan

Jakarta, 02 Desember 2024
A. N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
I B. SUMBER DANA



DS:5122-5163-0327-8811

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691412) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.470.197.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.470.197.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5122-5163-0327-8811

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (691412) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691412	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	-	1.470.197	-	-	-	1.470.197	16. 51	
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	1.470.197	-	-	-	1.470.197		
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	-	1.470.197	-	-	-	1.470.197		
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	1.470.197	-	-	-	1.470.197		
01	RM	-	1.470.197	-	-	-	1.470.197	046	
JUMLAH		-	1.470.197	-	-	-	1.470.197		

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

td.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691412) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

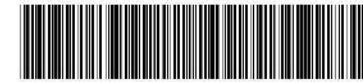
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	691412	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	112.952	249.946	260.783	260.783	260.785	324.948	1.470.197
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	112.952	249.946	260.783	260.783	260.785	324.948	1.470.197
		Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	0	0	0	0	0	0	112.952	249.946	260.783	260.783	260.785	324.948	1.470.197
	146.01.WA.7665	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	112.952	249.946	260.783	260.783	260.785	324.948	1.470.197

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
IV A. B L O K I R**



DS:5122-5163-0327-8811

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691412] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

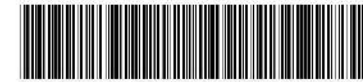
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:5122-5163-0327-8811

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691412] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

Lampiran 6.2 DIPA Akhir Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691466/2025



05:6407-9178-1013-1070

Revisi ke 05
Tanggal : 22 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (891466)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp.	465.126.000 (EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA SERATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	465.126.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	465.126.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	465.126.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	465.126.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6407-9178-1013-1070

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			465.126.000	
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			465.126.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2,00	Laporan, Layanan	415.126.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1,00	Laporan	84.826.000
		02	FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1,00	Laporan	330.300.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	50.000.000
Rincian Output	:	01	PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	50.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025
I B. SUMBER DANA



DS:6407-9178-1013-1070

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I B. 1

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	465.126.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	465.126.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6407-9178-1013-1070

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691466	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	-	465.126	-	-	-	465.126		
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	465.126	-	-	-	465.126		
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	-	465.126	-	-	-	465.126		
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	415.126	-	-	-	415.126	16. 51	
01 RM		-	415.126	-	-	-	415.126	046	
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	50.000	-	-	-	50.000	16. 51	
01 RM		-	50.000	-	-	-	50.000	046	
JUMLAH		-	465.126	-	-	-	465.126		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6407-9178-1013-1070

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	691466	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	18.306	33.500	84.494	90.000	115.550	123.276	465.126
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	18.306	33.500	84.494	90.000	115.550	123.276	465.126
	146.03.1A.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	18.306	33.500	84.494	90.000	115.550	123.276	465.126
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	18.306	33.500	84.494	90.000	115.550	123.276	465.126

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttid.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6407-9178-1013-1070

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691466] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:6407-9178-1013-1070

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691466] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191994031003

Lampiran 6.3 DIPA Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan TA 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691520/2025



DS.5108-6463-7685-0056

Revisi ke 05

Tanggal : 22 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode>Nama Satker	: (691520)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp.	626.466.000 (ENAM RATUS DUA PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	626.466.000
146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	626.466.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	626.466.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	626.466.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Kelentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024

A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

LUKY ALFIRMAN

NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5108-8463-7685-0058

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			626.466.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			626.466.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7660.AEA Koordinasi	1,00	kegiatan	476.162.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	kegiatan	476.162.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7660.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	150.304.000
Rincian Output	:	01	FAE.005 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,00	Laporan	150.304.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
ttd.
Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
I B. SUMBER DANA



DS:5108-8463-7685-0058

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I B. 1

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	626.466.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	626.466.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5108-8463-7685-0058

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691520	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	-	626.466	-	-	-	626.466		
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	626.466	-	-	-	626.466		
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	-	626.466	-	-	-	626.466		
7660.AEA	Koordinasi (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	476.162	-	-	-	476.162	16. 51	
01 RM		-	476.162	-	-	-	476.162	046	
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	150.304	-	-	-	150.304	16. 51	
01 RM		-	150.304	-	-	-	150.304	046	
JUMLAH		-	626.466	-	-	-	626.466		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttid.
Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5108-8463-7685-0058

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	691520	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	49.863	66.464	72.024	88.645	99.726	249.723	626.466
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	49.863	66.464	72.024	88.645	99.726	249.723	626.466
	146.04.1A.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	0	0	0	0	0	0	49.863	66.464	72.024	88.645	99.726	249.723	626.466
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	49.863	66.464	72.024	88.645	99.726	249.723	626.466

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttd.
Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
IV A. B L O K I R**



DS:5108-8463-7685-0058

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691520] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttd.
Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2025
IV B. C A T A N**



DS:5108-8463-7685-0058

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691520] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

ttd.
Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
197310261993021001

Lampiran 6.4 DIPA Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691574/2025



05:1062:9977:2940:5362

Revisi ke 06

Tanggal : 15 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (891574)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp.	1.291.222.000 (SATU MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	1.291.222.000
146.05.1A.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	1.291.222.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.291.222.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	1.291.222.000
-------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024

A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.

LUKY ALFIRMAN

NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1082-9977-2940-5382

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			1.291.222.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			1.291.222.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00	Rekomendasi Kebijakan	942.323.000
Rincian Output		01 ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	408.618.000
		02 ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	221.235.000
		03 ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	312.470.000
Klasifikasi Rincian Output	2	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	348.899.000
Rincian Output		01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan	348.899.000

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.
SRI HARYATI
197107071997032004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2025
I B. SUMBER DANA



DS:1082-9977-2940-5382

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.291.222.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.291.222.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1082-9977-2940-5382

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691574	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	-	1.291.222	-	-	-	1.291.222		
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1.291.222	-	-	-	1.291.222		
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	-	1.291.222	-	-	-	1.291.222		
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	942.323	-	-	-	942.323	16. 51	
01 RM		-	942.323	-	-	-	942.323	046	
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	348.899	-	-	-	348.899	16. 51	
01 RM		-	348.899	-	-	-	348.899	046	
JUMLAH		-	1.291.222	-	-	-	1.291.222		

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

td.
SRI HARYATI
197107071997032004

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	691574	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	53.231	97.695	130.038	203.517	260.550	546.190	1.291.222
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	53.231	97.695	130.038	203.517	260.550	546.190	1.291.222
	146.05.1A.7651	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	0	0	0	0	0	0	53.231	97.695	130.038	203.517	260.550	546.190	1.291.222
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	53.231	97.695	130.038	203.517	260.550	546.190	1.291.222

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.
SRI HARYATI
197107071997032004

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2025
IV A. B L O K I R**



DS:1082-9977-2940-5382

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691574] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.
SRI HARYATI
197107071997032004

Lampiran 6.5 DIPA Akhir Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691607/2025



05.6247-3331-0451-5205

Revisi ke 05

Tanggal : 26 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (891607)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp.	303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	303.466.000
146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	303.466.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	303.466.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN SAMARINDA (046) Rp. 303.466.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6247-3331-0451-5205

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691607) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			303.466.000	
Kegiatan	:	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			303.466.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan	303.466.000
Rincian Output	:	01	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1,00	Rekomendasi Kebijakan	129.233.000
		02	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1,00	Rekomendasi Kebijakan	174.233.000

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

ttd.
AZIS ANDRIANSYAH
NRP. 77050672

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025
I B. SUMBER DANA



DS:6247-3331-0451-5205

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691607) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	303.466.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	303.466.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6247-3331-0451-5205

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (691607) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
691607	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	-	303.466	-	-	-	303.466		
146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	303.466	-	-	-	303.466		
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	303.466	-	-	-	303.466		
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	303.466	-	-	-	303.466	16.51	
01	RM	-	303.466	-	-	-	303.466	046	
JUMLAH		-	303.466	-	-	-	303.466		

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

ttd.
AZIS ANDRIANSYAH
NRP. 77050672

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (691607) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	691607	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000	36.000	50.000	70.000	97.466	303.466
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000	36.000	50.000	70.000	97.466	303.466
		146.06.1A.7652 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000	36.000	50.000	70.000	97.466	303.466
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000	36.000	50.000	70.000	97.466	303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

ttd.
AZIS ANDRIANSYAH
NRP. 77050672

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6247-3331-0451-5205

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691607] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

ttd.
AZIS ANDRIANSYAH
NRP. 77050672

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:6247-3331-0451-5205

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [691607] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

ttd.
AZIS ANDRIANSYAH
NRP. 77050672

Lampiran 7. Laporan Kondisi Barang Milik Negara BP3KP Kalimantan II Tahun 2025

LAPORAN KONDISI BARANG UNTUK SEMUA KONDISI PER NOVEMBER 2025

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
KODE UAKPB : 146.01.1600.691412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16
Halaman : 1 dari 13
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.02.01.03.002	Pick Up	1	Unit	508,000,000	1	0	0
2			2	Unit	508,000,000	1	0	0
3			3	Unit	498,600,000	1	0	0
Jumlah Pick Up					1,514,600,000	3	0	0
1	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	Unit	27,404,312	1	0	0
2			2	Unit	27,404,312	1	0	0
Jumlah Sepeda Motor					54,808,624	2	0	0
1	3.03.03.01.141	Distance Meter	1	unit	1,758,000	1	0	0
Jumlah Distance Meter					1,758,000	1	0	0
1	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	Buah	4,180,000	1	0	0
2			2	Buah	4,180,000	1	0	0
3			3	Buah	4,180,000	1	0	0
4			4	Buah	4,180,000	1	0	0
5			5	Buah	4,180,000	1	0	0
6			6	Buah	4,180,000	1	0	0
7			7	Buah	4,180,000	1	0	0
8			8	Buah	3,244,050	1	0	0
9			9	Buah	3,244,050	1	0	0
10			10	Buah	2,900,000	1	0	0
11			11	Buah	2,900,000	1	0	0
12			12	Buah	2,628,000	1	0	0
13			13	Buah	2,628,000	1	0	0
14			14	Buah	1,300,000	1	0	0
Jumlah Lemari Besi/Metal					48,104,100	14	0	0
1	3.05.01.04.007	Brandkas	1	Buah	4,391,500	1	0	0
Jumlah Brandkas					4,391,500	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 2 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	20,925,000	1	0	0
2			2	Buah	3,732,152	1	0	0
<i>Jumlah CCTV - Camera Control Television System</i>					24,657,152	2	0	0
1	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	1,678,000	1	0	0
2			2	Buah	2,059,250	1	0	0
3			3	Buah	2,059,250	1	0	0
<i>Jumlah Alat Penghancur Kertas</i>					5,796,500	3	0	0
1	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	Buah	1,173,000	1	0	0
<i>Jumlah Mesin Absensi</i>					1,173,000	1	0	0
1	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	1	Buah	7,000,000	1	0	0
2			2	Buah	7,000,000	1	0	0
3			3	Buah	5,950,000	1	0	0
<i>Jumlah LCD Projector/Infocus</i>					19,950,000	3	0	0
1	3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	1	Buah	1,100,000	1	0	0
2			2	Buah	1,100,000	1	0	0
3			3	Buah	1,100,000	1	0	0
4			4	Buah	1,100,000	1	0	0
5			5	Buah	1,100,000	1	0	0
6			6	Buah	1,100,000	1	0	0
7			7	Buah	1,100,000	1	0	0
8			8	Buah	1,100,000	1	0	0
9			9	Buah	1,100,000	1	0	0
10			10	Buah	1,100,000	1	0	0
<i>Jumlah Meja Kerja Besi/Metal</i>					11,000,000	10	0	0
1	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1	Buah	4,500,000	1	0	0
2			2	Buah	4,500,000	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 3 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			3	Buah	4,500,000	1	0	0
4			4	Buah	4,500,000	1	0	0
5			5	Buah	4,500,000	1	0	0
6			6	Buah	4,500,000	1	0	0
7			7	Buah	5,095,000	1	0	0
8			8	Buah	3,233,000	1	0	0
9			9	Buah	3,233,000	1	0	0
10			10	Buah	1,100,000	1	0	0
11			11	Buah	1,100,000	1	0	0
12			12	Buah	1,100,000	1	0	0
13			13	Buah	1,100,000	1	0	0
14			14	Buah	1,100,000	1	0	0
15			15	Buah	1,100,000	1	0	0
16			16	Buah	1,100,000	1	0	0
17			17	Buah	1,100,000	1	0	0
18			18	Buah	1,100,000	1	0	0
19			19	Buah	1,100,000	1	0	0
20			20	Buah	1,100,000	1	0	0
21			21	Buah	1,100,000	1	0	0
22			22	Buah	1,751,000	1	0	0
23			23	Buah	1,751,000	1	0	0
24			24	Buah	1,751,000	1	0	0
25			25	Buah	1,751,000	1	0	0
26			26	Buah	1,751,000	1	0	0
27			27	Buah	1,075,000	1	0	0
28			28	Buah	1,075,000	1	0	0
29			29	Buah	1,075,000	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 4 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30			30	Buah	1,075,000	1	0	0
31			31	Buah	1,075,000	1	0	0
32			32	Buah	1,075,000	1	0	0
<i>Jumlah Meja Kerja Kayu</i>					66,966,000	32	0	0
1	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1	Buah	1,100,000	1	0	0
2			2	Buah	1,100,000	1	0	0
3			3	Buah	1,100,000	1	0	0
4			4	Buah	1,100,000	1	0	0
5			5	Buah	1,100,000	1	0	0
6			6	Buah	1,100,000	1	0	0
7			7	Buah	1,100,000	1	0	0
8			8	Buah	1,100,000	1	0	0
9			9	Buah	1,100,000	1	0	0
10			10	Buah	1,100,000	1	0	0
11			11	Buah	1,100,000	1	0	0
12			12	Buah	1,100,000	1	0	0
13			13	Buah	1,100,000	1	0	0
14			14	Buah	1,100,000	1	0	0
15			15	Buah	1,100,000	1	0	0
16			16	Buah	1,821,820	1	0	0
17			17	Buah	1,100,000	1	0	0
18			18	Buah	1,100,000	1	0	0
19			19	Buah	1,204,667	1	0	0
20			20	Buah	1,204,667	1	0	0
21			21	Buah	1,204,667	1	0	0
22			22	Buah	1,204,667	1	0	0
23			23	Buah	1,204,667	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 5 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24			24	Buah	1,204,667	1	0	0
25			25	Buah	1,204,667	1	0	0
26			26	Buah	1,204,667	1	0	0
27			27	Buah	1,204,667	1	0	0
28			28	Buah	1,204,667	1	0	0
29			29	Buah	1,204,667	1	0	0
30			30	Buah	1,204,667	1	0	0
31			31	Buah	1,204,667	1	0	0
32			32	Buah	1,204,667	1	0	0
33			33	Buah	1,204,667	1	0	0
34			34	Buah	1,250,000	1	0	0
35			35	Buah	1,250,000	1	0	0
36			36	Buah	1,250,000	1	0	0
37			37	Buah	1,250,000	1	0	0
38			38	Buah	1,250,000	1	0	0
39			39	Buah	1,250,000	1	0	0
40			40	Buah	2,500,000	1	0	0
41			41	Buah	1,900,000	1	0	0
42			42	Buah	1,100,000	1	0	0
43			43	Buah	1,100,000	1	0	0
44			44	Buah	1,100,000	1	0	0
45			45	Buah	1,100,000	1	0	0
46			46	Buah	1,100,000	1	0	0
47			47	Buah	1,100,000	1	0	0
48			48	Buah	1,100,000	1	0	0
49			49	Buah	1,100,000	1	0	0
50			50	Buah	1,900,000	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 6 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51			51	Buah	1,184,500	1	0	0
52			52	Buah	1,184,500	1	0	0
53			53	Buah	1,184,500	1	0	0
54			54	Buah	1,184,500	1	0	0
55			55	Buah	1,184,500	1	0	0
56			56	Buah	1,184,500	1	0	0
57			57	Buah	1,184,500	1	0	0
58			58	Buah	1,184,500	1	0	0
59			59	Buah	1,184,500	1	0	0
60			60	Buah	1,184,500	1	0	0
61			61	Buah	1,500,000	1	0	0
62			62	Buah	1,500,000	1	0	0
63			63	Buah	1,500,000	1	0	0
64			64	Buah	1,500,000	1	0	0
65			65	Buah	1,500,000	1	0	0
66			66	Buah	1,500,000	1	0	0
<i>Jumlah Kursi Besi/Metal</i>					82,036,825	66	0	0
1	3.05.02.01.033	Sofa	1	set	12,309,300	1	0	0
2			2	set	7,349,020	1	0	0
<i>Jumlah Sofa</i>					19,658,320	2	0	0
1	3.05.02.04.004	A.C. Split	1	Buah	8,470,000	1	0	0
2			2	Buah	4,189,000	1	0	0
3			3	Buah	4,189,000	1	0	0
4			4	Buah	5,600,000	1	0	0
5			5	Buah	5,600,000	1	0	0
6			6	Buah	7,379,000	1	0	0
7			7	Buah	5,600,000	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 7 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah A.C. Split					41,027,000	7	0	0
1	3.05.02.06.002	Televisi	1	Buah	19,414,500	1	0	0
2			2	Buah	5,692,500	1	0	0
3			3	Buah	9,558,000	1	0	0
4			4	Buah	24,396,000	1	0	0
5			5	Buah	24,396,000	1	0	0
6			6	Buah	12,998,000	1	0	0
Jumlah Televisi					96,455,000	6	0	0
1	3.05.02.06.007	Loudspeaker	1	Buah	4,005,450	1	0	0
2			2	Buah	4,005,450	1	0	0
3			3	Buah	7,500,000	1	0	0
Jumlah Loudspeaker					15,510,900	3	0	0
1	3.05.02.06.014	Microphone	1	Buah	1,723,900	1	0	0
Jumlah Microphone					1,723,900	1	0	0
1	3.05.02.06.017	Unit Power Supply	1	Buah	1,350,000	1	0	0
2			2	Buah	1,500,000	1	0	0
3			3	Buah	1,500,000	1	0	0
4			4	Buah	1,500,000	1	0	0
Jumlah Unit Power Supply					5,850,000	4	0	0
1	3.05.02.06.036	Dispenser	1	Buah	1,750,000	1	0	0
Jumlah Dispenser					1,750,000	1	0	0
1	3.05.02.06.070	Tangga	1	Buah	2,099,000	1	0	0
Jumlah Tangga					2,099,000	1	0	0
1	3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	dummy	1,248,920	1	0	0
Jumlah Alat Rumah Tangga Lainnya					1,248,920	1	0	0
1	3.06.01.02.128	Camera Digital	1	Buah	15,000,000	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 8 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2			2	Buah	26,600,000	1	0	0
3			3	Buah	26,600,000	1	0	0
4			4	Buah	12,989,780	1	0	0
<i>Jumlah Camera Digital</i>					81,189,780	4	0	0
1	3.06.01.02.132	Video Conference	1	Buah	15,202,800	1	0	0
2			2	Buah	16,000,000	1	0	0
3			3	Buah	14,389,000	1	0	0
<i>Jumlah Video Conference</i>					45,591,800	3	0	0
1	3.06.01.02.167	Drone	1	Buah	27,699,000	1	0	0
2			2	Buah	33,798,500	1	0	0
3			3	Buah	33,798,500	1	0	0
4			4	Buah	31,329,001	1	0	0
5			5	Buah	29,129,700	1	0	0
<i>Jumlah Drone</i>					155,754,701	5	0	0
1	3.06.01.05.038	GPS Receiver	1	Buah	5,280,000	1	0	0
2			2	Buah	9,615,900	1	0	0
<i>Jumlah GPS Receiver</i>					14,895,900	2	0	0
1	3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	1	Buah	2,400,000	1	0	0
2			2	Buah	2,400,000	1	0	0
3			3	Buah	2,400,000	1	0	0
4			4	Buah	2,400,000	1	0	0
5			5	Buah	2,400,000	1	0	0
6			6	Buah	2,400,000	1	0	0
7			7	Buah	2,400,000	1	0	0
8			8	Buah	2,400,000	1	0	0
9			9	Buah	2,400,000	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 9 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10			10	Buah	2,400,000	1	0	0
11			11	Buah	6,660,000	1	0	0
12			12	Buah	1,315,467	1	0	0
13			13	Buah	1,315,467	1	0	0
14			14	Buah	1,315,467	1	0	0
15			15	Buah	1,315,467	1	0	0
16			16	Buah	1,315,467	1	0	0
17			17	Buah	1,315,467	1	0	0
18			18	Buah	7,537,500	1	0	0
Jumlah Handy Talky (HT)					46,090,302	18	0	0
1	3.10.01.02.001	P.C Unit	1	Buah	14,550,900	1	0	0
Jumlah P.C Unit					14,550,900	1	0	0
1	3.10.01.02.002	Lap Top	1	Buah	19,300,000	1	0	0
2			2	Buah	72,500,000	1	0	0
3			3	Buah	41,950,000	1	0	0
4			4	Buah	17,882,500	1	0	0
5			5	Buah	17,882,500	1	0	0
6			6	Buah	11,282,500	1	0	0
7			7	Buah	11,129,750	1	0	0
8			8	Buah	11,129,750	1	0	0
9			9	Buah	11,129,750	1	0	0
10			10	Buah	11,129,750	1	0	0
11			11	Buah	15,000,000	1	0	0
12			12	Buah	18,000,000	1	0	0
13			13	Buah	18,000,000	1	0	0
14			14	Buah	18,000,000	1	0	0
15			15	Buah	18,000,000	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 10 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16			16	Buah	18,000,000	1	0	0
17			17	Buah	18,000,000	1	0	0
18			18	Buah	18,000,000	1	0	0
19			19	Buah	18,000,000	1	0	0
20			20	Buah	18,000,000	1	0	0
21			21	Buah	18,000,000	1	0	0
22			22	Buah	12,000,000	1	0	0
23			23	Buah	12,000,000	1	0	0
24			24	Buah	12,000,000	1	0	0
25			25	Buah	12,000,000	1	0	0
26			26	Buah	12,000,000	1	0	0
27			27	Buah	12,000,000	1	0	0
28			28	Buah	12,000,000	1	0	0
29			29	Buah	12,000,000	1	0	0
30			30	Buah	12,000,000	1	0	0
31			31	Buah	12,000,000	1	0	0
32			32	Buah	18,000,000	1	0	0
33			33	Buah	18,000,000	1	0	0
34			34	Buah	18,000,000	1	0	0
35			35	Buah	18,000,000	1	0	0
36			36	Buah	18,000,000	1	0	0
37			37	Buah	18,000,000	1	0	0
38			38	Buah	18,000,000	1	0	0
39			39	Buah	18,000,000	1	0	0
40			40	Buah	18,000,000	1	0	0
41			41	Buah	18,000,000	1	0	0
42			42	Buah	25,832,600	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 11 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43			43	Buah	17,500,000	1	0	0
44			44	Buah	17,500,000	1	0	0
45			45	Buah	17,500,000	1	0	0
<i>Jumlah Lap Top</i>					798,649,100	45	0	0
1	3.10.01.02.009	Tablet PC	1	Buah	21,698,000	1	0	0
2			2	Buah	20,232,002	1	0	0
<i>Jumlah Tablet PC</i>					41,930,002	2	0	0
1	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	1,815,000	1	0	0
2			2	Buah	3,025,000	1	0	0
3			3	Buah	4,125,000	1	0	0
4			4	Buah	12,970,350	1	0	0
5			5	Buah	2,579,750	1	0	0
6			6	Buah	2,408,750	1	0	0
7			7	Buah	4,305,000	1	0	0
8			8	Buah	2,200,000	1	0	0
9			9	Buah	3,000,000	1	0	0
10			10	Buah	3,000,000	1	0	0
11			11	Buah	3,000,000	1	0	0
12			12	Buah	3,000,000	1	0	0
13			13	Buah	3,000,000	1	0	0
14			14	Buah	3,000,000	1	0	0
15			15	Buah	8,900,000	1	0	0
16			16	Buah	4,218,550	1	0	0
17			17	Buah	4,218,550	1	0	0
18			18	Buah	7,956,400	1	0	0
19			19	Buah	3,967,700	1	0	0
20			20	Buah	3,967,200	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 12 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21			21	Buah	3,967,200	1	0	0
22			22	Buah	3,308,310	1	0	0
23			23	Buah	3,308,310	1	0	0
24			24	Buah	3,000,000	1	0	0
25			25	Buah	3,000,000	1	0	0
26			26	Buah	3,881,300	1	0	0
27			27	Buah	3,881,300	1	0	0
<i>Jumlah Printer (Peralatan Personal Komputer)</i>					109,003,670	27	0	0
1	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	7,370,000	1	0	0
2			2	Buah	5,740,000	1	0	0
3			3	Buah	5,665,000	1	0	0
4			4	Buah	5,916,000	1	0	0
5			5	Buah	5,916,000	1	0	0
6			6	Buah	5,916,000	1	0	0
<i>Jumlah Scanner (Peralatan Personal Komputer)</i>					36,523,000	6	0	0
1	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	1	Buah	721,500	1	0	0
2			2	Buah	721,500	1	0	0
3			3	Buah	1,800,000	1	0	0
4			4	Buah	1,800,000	1	0	0
5			5	Buah	1,800,000	1	0	0
6			6	Buah	1,800,000	1	0	0
7			7	Buah	1,800,000	1	0	0
8			8	Buah	1,380,800	1	0	0
9			9	Buah	1,675,000	1	0	0
10			10	Buah	1,675,000	1	0	0
11			11	Buah	2,218,500	1	0	0
12			12	Buah	1,700,000	1	0	0

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER NOVEMBER 2025**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Kantor Satker

NAMA UAKPB : BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

KODE UAKPB : 146.01.1600.891412

Tanggal : 26/11/2025 15.14.16

Halaman : 13 dari 13

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13			13	Buah	1,700,000	1	0	0
<i>Jumlah External/ Portable Hardisk</i>					20,792,300	13	0	0
1	8.01.01.01.001	Software Komputer	1	dummy	55,000,000	1	0	0
2			2	dummy	55,000,000	1	0	0
3			3	dummy	55,000,000	1	0	0
4			4	dummy	55,000,000	1	0	0
<i>Jumlah Software Komputer</i>					220,000,000	4	0	0

Penanggung Jawab UAKPB

Lampiran 8. Bukti Dukung Capaian Kinerja

Verifikasi Penerima Bantuan Rumah CSR PT.SMF di Kab. Hulu Sungai Selatan



Monitoring dan Evaluasi Perumahan yang ada di Kota Samarinda



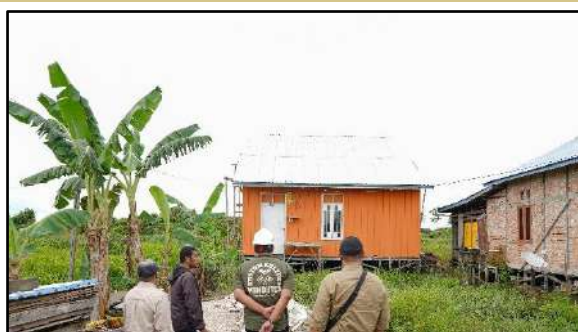
Peninjauan Akhir Terkait Pembangunan Akses Jalan di Kabupaten Barito Kuala, Kalsel



Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tentang Rumah Subsidi serta Monitoring Perumahan Grand Fitri



Monitoring Program BPS, Perumahan Subsidi, dan Bantuan PSU di Kabupaten Bulungan



Monitoring Pekerjaan Pembangunan Rusun ASN 4 di IKN Nusantara



Monitoring Perumahan Subsidi Perumahan Hanum Imperial, Kabupaten Banjar



Monitoring Rumah CSR PT. Adaro di Kab. Tabalong, Kalsel



Rapat Inventarisasi Fisik Barang Milik Negara (BMN) di IKN Nusantara



Kunjungan Kemenhan TNI di HMT, Paspampres, Pos Jaga di IKN



Rapat Defect List Bersama OIKN dan Kontraktor di Kemenko 3



Monitoring Penerima Bantuan RTLH Perkim Balikpapan dan Rumah CSR DPD REI Kaltim





Monitoring Calon Penerima BPS di Kecamatan Babulu, Penajam.Paser Utara, Kaltim



Monitoring Rusun Tanah Bumbu, Kecamatan Batulicin, Kalsel



Rapat Kontrak Rusun MBR IKN Satker Kaltim



Monitoring IKN Nusantara



Monitoring Pembangunan MBR





Penandatanganan dan Penyaluran BSPS di Kab. Kukar



Monitoring Hunian Vertikal TNI di IKN Nusantara



Monitoring BSPS di Babulu, Penajam Paser Utara



Monitoring Penerima BSPS dan Pemilihan Toko Terbuka di Kalsel





Monitoring Bantuan PSU di Perumahan Permata Regency, Banjarmasin, Kalsel



Rapat Kordinasi Pembahasan Usulan Kumuh di Balai P3KP Kal. II, IKN



Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan BP3KP Kalimantan II

Rakor Sosialisasi Dinas Perkim Balikpapan di Hotel Platinum



Seminar Nasional dan Internasional Dinas Perkim Provinsi Kalsel



Ucapara HUT RI KE 80 di Lingkungan BP3KP Kalimantan II



Kedatangan 53 CPNS BP3KP Kalimantan II di IKN Nusantara



Penandatanganan Komitmen ZI



Rapat Internal Kegiatan BP3KP Kalimantan II di Kemenko 3, IKN



Rapat Koordinasi dan Sinergi 1 Juta Rumah di Balikpapan



Sosialisasi Penyusunan ZI, MR dan SPIP di Gedung Kemenko, IKN



Sosialisasi dan Diskusi Manajemen Risiko di Kantor Dinas Perkim Kalsel



Rapat Internal Terkait Aset BMN BP3KP Kalimantan II di Kemenko 3, IKN



Bimtek SAKIP di BP3KP Kalimantan II



Sosialisasi Klinik PKP di GOR Segiri



Bimtek Penyusunan LKE Zona Integritas

